

Pengantar **SOSIOLOGI** **PERDESAAN**



Prof. Dr. Damsar
Dr. Indrayani

PENGANTAR SOSIOLOGI PERDESAAN

Edisi Pertama

Copyright © 2016

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN 978-602-422-029-7

15 x 23 cm

xiv, 262 hlm

Cetakan ke-1, September 2016

Kencana. 2016.0687

Penulis

Prof. Dr. Damsar

Dr. Indrayani

Desain Sampul

Irfan Fahmi

Penata Letak

Y. Rendy

Percetakan

PT Kharisma Putra Utama

Penerbit

K E N C A N A

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SOSIOLOGI PERDESAAN	1
A. Pengertian Sosiologi	1
1. Emilē Durkheim	2
2. Max Weber	9
3. Peter L. Berger	15
B. Pengertian Perdesaan	19
C. Pengertian Sosiologi Perdesaan	22
D. Perdesaan sebagai Kajian Interdisiplin dan Intradisiplin	26
E. Sosiologi Perdesaan sebagai Ilmu Murni dan Ilmu Terapan	27
1. Sosiologi sebagai Ilmu Murni versus Ilmu Terapan	27
2. Sosiologi Perdesaan: Ilmu Murni atau Ilmu Terapan?	31
BAB 2 PERKEMBANGAN SOSIOLOGI PERDESAAN	33
A. Peletak Fondasi Sosiologi Perdesaan	33
1. Sumbangan Karl Marx (1818-1883)	34
2. Sumbangan Emilē Durkheim (1858-1917)	37

3. Sumbangan Max Weber (1864-1920)	39
4. Sumbangan Ferdinand Tönnies (1855-1936)	42
5. Sumbangan Pitirim A. Sorokin (1889-1968)	43
B. Penguat Fondasi Sosiologi Perdesaan	44
1. Sumbangan Antonio Gramsci (1891-1937)	44
2. Sumbangan Talcott Parsons (1902-1979)	45
3. Sumbangan Louis Althusser (1918-1990)	49
4. Sumbangan Piere Bourdieu (1930-2002)	50
C. Perkembangan Teori Sosiologi sebagai Sejarah Pendekatan Sosiologi Perdesaan	50
1. Teori Struktural Fungsional	51
2. Teori Struktural Konflik	56
3. Teori Interaksionisme Simbolik	59
4. Teori Pertukaran	62
D. Percabangan dan Revitalisasi Sosiologi Perdesaan	64
BAB 3 MASYARAKAT PERDESAAN	71
A. Penelusuran Ulang Konsep Masyarakat Perdesaan	71
B. Masyarakat Perdesaan dalam Perspektif Sosiologis	75
1. <i>Gemeinschaft</i> versus <i>Gesellschaft</i>	76
2. Solidaritas Mekanik versus Solidaritas Organik	76
3. Masyarakat Agraris versus Masyarakat Kapitalis	81
C. Tipologi Masyarakat Perdesaan	84
1. Stephen K. Sanderson	85
2. Sediono M.P. Tjondronegoro	86
3. Pemerintah	86
BAB 4 SISTEM SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PERDESAAN	89
A. PENGERTIAN SISTEM SOSIAL BUDAYA	89
1. Pengertian Sistem	89
2. Pengertian Sosial	91
3. Pengertian Sistem Sosial	91
4. Pengertian Budaya	94



5. Pengertian Sistem Budaya	95
6. Hubungan Sistem Sosial dan Sistem Budaya	95
7. Pengertian Sistem Sosial Budaya	96
B. Masyarakat Perdesaan sebagai Suatu Sistem	97
1. Masyarakat Perdesaan sebagai Sistem Sosial	97
2. Masyarakat Perdesaan sebagai Sistem Interaksi	98
3. Masyarakat Perdesaan sebagai Sistem Pertukaran	100
C. Sistem Sosial Budaya Masyarakat Perdesaan	101
1. Gagasan	101
2. Nilai	102
3. Norma	112
D. Sistem Sosial Budaya Masyarakat Petani	113
1. Ekologi Desa Pertanian	113
2. Siapakah Petani?	114
3. Arti Subsistensi	114
4. Tanah dalam Konsepsi Masyarakat Adat	115
5. Solidaritas Sosial Masyarakat Petani	118
6. Jaminan Sosial Masyarakat Petani	119
E. Sistem Sosial Budaya Masyarakat Pesisir	120
1. Ekologi Desa Pesisir	120
2. Siapa Itu Nelayan?	121
3. Laut dalam Konsepsi Nelayan	122
4. Gejala Garret Hardin pada Nelayan	124
5. Solidaritas Sosial	125
6. Jaminan Sosial Masyarakat Pesisir	125
F. Stratifikasi Sosial Masyarakat Perdesaan	126
 BAB 5 SISTEM DAN TINDAKAN EKONOMI MASYARAKAT PERDESAAN	 129
A. Sistem Ekonomi Perdesaan	129
1. Konsep Sistem Ekonomi	129
2. Produksi pada Masyarakat Perdesaan	131
3. Distribusi Masyarakat Perdesaan	134
4. Konsumsi pada Masyarakat Perdesaan	138



5. Tipologi Kepemilikan Masyarakat Perdesaan	144
6. Tipologi Distribusi dan Pertukaran Masyarakat Perdesaan	145
B. Tindakan Ekonomi	146
1. Ekonomi Moral	149
2. Ekonomi Rasional	160
C. Ekonomi Perdesaan Indonesia: Ekonomi Moral atau Ekonomi Rasional?	162
BAB 6 KAPITAL DESA	165
A. Pengertian Kapital	165
B. Kapital (<i>Das Kapital</i>)	166
C. Kapital Sosial	170
1. Pengertian Kapital Sosial?	170
2. Kontroversi Pemahaman Kapital Sosial	171
D. Kapital Budaya	178
E. Kapital Simbolik	182
BAB 7 KEARIFAN SOSIAL MASYARAKAT PERDESAAN	185
A. Konsepsi dan Falsafah Adat Kearifan Lokal	185
1. Konsep Kearifan Sosial	185
2. Falsafah Adat tentang Kearifan Lokal	187
B. Implementasi Kearifan Lokal	193
1. Kearifan Lokal dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	193
2. Kearifan Lokal dan Antisipasi Bencana	198
3. Kearifan Sosial Penanganan Bencana	203
BAB 8 PEMBANGUNAN PERDESAAN	207
A. Konsep Pembangunan Perdesaan	207
1. Makna Konsep Pembangunan	207
2. Makna Pembangunan Perdesaan	211
B. Teori Pembangunan Perdesaan	212
1. Teori Pembangunan	212
2. Teori Pembangunan Perdesaan	216



C. Penelusuran Singkat Pembangunan Baru	219
D. Partisipasi dalam Pembangunan Perdesaan	220
1. Batasan Partisipasi	221
2. Jenis Partisipasi	225
3. Alasan Partisipasi	231
4. Faktor Pengaruh dalam Partisipasi	235
5. Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	240
D. Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	241
1. Batasan Pemberdayaan	241
2. Jenis Proses Pemberdayaan	242
3. Aspek Pemberdayaan	243
REFERENSI	247
INDEKS	255
TENTANG PENULIS	261



BAB 1

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SOSIOLOGI PERDESAAN

A. PENGERTIAN SOSIOLOGI

Memahami batasan suatu kajian ilmu perlu dilakukan karena dengan pemahaman tersebut seseorang bisa menentukan ruang kajian keilmuan. Namun pekerjaan tersebut tidaklah mudah, termasuk mengonstruksi batasan sosiologi. Dalam merumuskan batasan suatu kajian ilmu, biasanya para ilmuwan memberikan pengertian atau membuat definisi. Ketidakmudahan membuat batasan muncul pada saat menelusuri pengertian atau definisi para ilmuwan tentang suatu ilmu, karena para ilmuwan berbeda-beda dalam memberikan pengertian atau definisi. Oleh sebab itu, perlu dijelaskan apa pengertian atau definisi sosiologi yang digunakan untuk memahami sosiologi politik ini.

Sebelum dirumuskan batasan atau pengertian sosiologi yang dipakai dalam tulisan ini, ada baiknya ditelusuri bagaimana pendapat para sosiolog tentang hal ini. Untuk memahami pengertian sosiologi secara lebih luas dan dalam, berikut disajikan dua pandangan para peneroka sosiologi, yaitu Emile Durkheim dan Max Weber. Selanjutnya didiskusikan pengertian yang dikemukakan oleh Peter L. Berger. Dalam memahami pandangan ketiga tokoh tersebut, sebelumnya akan didiskusikan tentang riwayat hidup singkat hidup mereka.

1. Emile Durkheim



Durkheim dilahirkan di Epinal Prancis pada 1858 dari keluarga yahudi, ayahnya Rabi. Studi di Ecole Supérieure di Paris. Dari 1887 sampai 1902 menjadi gurubesar dalam ilmu-ilmu sosial di Bordeaux. Pada masa tersebut ia berhasil menulis buku yang monumental yaitu tentang *the*

division of labor in Society, the Rules of Sociological Method, dan *Suicide*. Setelah itu ia pindah ke Universitas Sorbonne di Paris. Pada masa ini, ia kembali menerbitkan buku *the*

Elementary Forms of the Religious Life. Berbeda dengan Karl Marx, sumbangan Emile Durkheim menekankan sisi yang berbeda dalam melihat realitas.

Adapun karya-karya utama yang sering dirujuk oleh para ahli sosiologi dari Emile Durkheim, adalah sebagai berikut:

The Division of Labor in Society (1893)

The Rules of Sociological Method (1895)

Suicide (1897)

The Elementary Forms of Religious Life (1912)

Untuk memisahkan sosiologi dari filsafat sosial dan menguatkan sosiologi sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang mandiri, maka Emile Durkheim menulis *the Rules of Sociological Methods* untuk menegaskan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari fakta sosial. Batasan yang dikemukakan Durkheim tersebut tidak dengan sendirinya bisa dipahami sebelum diterangkan apa yang dimaksud dengan konsep ilmu dan fakta sosial.

a. Konsep Ilmu

Konsep ilmu dimaksud di sini adalah ilmu pengetahuan (sain/*science*). Pada masa Durkheim, sosiologi masih melekat pada filsafat, khususnya filsafat sosial, sehingga ada gerakan dari berbagai cabang ilmu, khususnya ilmu-ilmu sosial, untuk melepaskan diri dari filsafat tersebut. Dalam kerangka itulah Durkheim mendeklarasikan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari fakta sosial. Pandangan Durkheim tersebut dipengaruhi oleh positivisme.

Apa itu positivisme? Konsep positivisme, dikenal juga dengan metode positif, digagas pertama kali oleh Henri de Saint Simon (Laeyendecker, 1983; 137). Metode positif menunjuk pada pendekatan terhadap pengetahuan empirik. Menurut pendekatan ini, semua yang kita tahu akhirnya berasal dari pengalaman inderawi atau data empirik (Johnson, 1986: 26). Metode positif ini selanjutnya dikembangkan oleh Auguste Comte, dikenal juga sebagai Bapak Sosiologi. Comte, seperti yang dikatakan Laeyendecker (1983: 145), mengemukakan beberapa karakteristik dari metode positif, yaitu antara lain:

satu, metode positif memiliki pengertian bahwa metode ini diarahkan kepada fakta-fakta dan tidak kepada misteri-misteri yang tidak dapat diketahui. Dua, metode ini mengarahkan perhatian kepada hal-hal yang bermanfaat, yaitu untuk perbaikan berkelanjutan dari persyaratan kehidupan, dan dengan demikian berlawanan dengan metode yang hanya membantu untuk memberi kepuasan kepada kehendak keingintahuan semata. Tiga, metode ini berusaha ke arah kepastian. Empat, metode ini berusaha ke arah kecermatan. Jadi, lanjut Laenderker, metode positif merupakan pengetahuan tentang fakta-fakta yang pasti, cermat dan berguna.

Para penganut positivisme percaya bahwa masyarakat atau kehidupan sosial merupakan bahagian dari alam. Sedangkan alam itu sendiri dipandang memiliki hukum-hukumnya sendiri yang bersifat universal, misalnya hukum Boyle, hukum gravitasi, dan lain sebagainya. Karena masyarakat atau kehidupan sosial merupakan bahagian dari alam, maka oleh sebab itu dapat pula ditemukan hukum-hukum masyarakat atau kehidupan sosial yang bersifat universal pula, berlaku pada semua ruang dan waktu. Untuk menemukan hukum masyarakat atau kehidupan sosial yang universal tersebut, teknik, cara atau metode yang dimiliki oleh ilmu pengetahuan alam dapat pula digunakan. Adapun metode positif yang digunakan untuk menemukan hukum universal tersebut berupa observasi (pengamatan), komparasi (perbandingan), eksperimen, dan metode historis.

Kembali kepada konsep ilmu, apa sebenarnya dipahami sebagai ilmu? Apa saja suatu pokok persoalan kajian dapat dikatakan sebagai suatu ilmu? Untuk memahami itu perlu kiranya merujuk apa saja sebenarnya karakteristik ilmu? Berikut beberapa karakteristik ilmu:

1. Empiris

Karakteristik empiris dipahami sebagai sesuatu yang didasarkan atas pengamatan (observasi) dan penalaran. Pengamatan menunjuk pada penggunaan panca indra dalam memahami dan mengalami kehidupan, termasuk kehidupan sosial. Sedangkan penalaran berkaitan dengan penggunaan akal budi (rasio) manusia. Sehingga hasil kegiatan empiris ini tidak dipandang sebagai suatu hal yang spekulatif, karena kegiatan empiris selalu dikaitkan dengan fakta dan data. Bagaimana kita memahami hal ini? Mari kita ambil

sepotong contoh. Masyarakat Tionghoa di Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki jiwa wiraswasta (*entrepreneurship*). Pernyataan ini bersifat empiris. Kenapa? Kalau kita melancong ke berbagai penjuru kota menengah dan besar di nusantara ini maka akan ditemukan komunitas Tionghoa yang bergerak dalam bisnis, terutama perdagangan. Kenapa jiwa wiraswasta dimiliki oleh masyarakat Tionghoa? Jika ditelusuri jauh ke dalam komunitas Tionghoa tersebut ternyata ditemukan kenyataan bahwa terdapat kecenderungan keluarga Tionghoa tinggal di rumah toko (ruko). Dengan tinggal di ruko, antara dunia kerja dengan dunia keluarga dan kerumahtanggaan tidak terpisah secara tegas. Pada saat seorang anggota keluarga bekerja di toko, yaitu bahagian terbawah dari bangunan yang dimiliki, sebenarnya, aktivitasnya terkait dengan aktivitas anggota lainnya yang berada pada bahagian lain bangunan yang disebut dengan tempat tinggal. Demikian juga dengan generasi muda dari keluarga tersebut belajar tentang berbagai dunia kehidupan secara sekaligus, yaitu antara dunia kerja dan dunia keluarga dan kerumahtanggaan. Ketika sang anak baru bangun tidur, suasana dan situasi yang pertama dikenalnya adalah ibu dan kakaknya yang sibuk di dapur serta ayah dan abangnya yang sedang sibuk melayani pembeli.

2. Teoretis

Ilmu ditandai dengan abstraksi yang disusun dari hasil pengamatan dan penalaran yang telah dilakukan. Abstraksi tersebut disusun secara logis, sistematis serta bertujuan untuk menjelaskan hubungan-hubungan sebab akibat, sehingga menjadi teori. Mari kita lanjutkan contoh keluarga Tionghoa di atas. Realitas yang digambarkan di atas, yaitu proses belajar anak Tionghoa tentang dunia kerja dan dunia keluarga dan kerumahtanggaan tersebut di atas dapat kita abstraksikan sebagai realitas sosialisasi. Karena sosialisasinya berkait dengan dunia bisnis, maka kita bisa menyusun teori atas kenyataan tersebut sebagai berikut: “sosialisasi keluarga menentukan jiwa wiraswasta (*entrepreneurship*) dari anak Tionghoa”.

3. Kumulatif

Ilmu bersifat kumulatif berarti teori dibangun atas teori-teori yang berkembang sebelumnya. Dengan kata lain, teori-teori yang ada (lama) diperhalus, dipertajam,

dikembangkan, dimodifikasi, dan disempurnakan atas kenyataan empiris yang baru. Mari kembali lagi bersama contoh di atas. Ternyata kesempatan yang dibatasi oleh aturan perundangan yang diciptakan oleh pemerintahan kolonial Belanda dan dilanjutkan oleh pemerintahan Republik Indonesia di mana masyarakat Tionghoa tidak diizinkan untuk melakukan pekerjaan pemerintahan seperti pegawai pemerintahan sipil, polisi, tentara, dan lainnya sehingga hanya bisnis satu-satunya yang tersedia bagi komunitas Tionghoa sebagai pekerjaan maka teori sebelumnya dipertajam menjadi “jiwa wiraswasta (*entrepreneurship*) orang Tionghoa dipengaruhi oleh kesempatan yang tersedia dan sosialisasi dalam keluarga”.

4. Obyektif

Apabila ilmu(an) harus memiliki sifat obyektif berarti bahwa ilmu(an) tidak mempersoalkan buruk-baiknya fakta tertentu, tetapi tujuannya adalah menjelaskan fakta secara apa adanya dengan kerangka teori yang ada tanpa memasukkan unsur subyektif pribadi. Dalam hal penjelasan fakta jiwa wiraswasta (*entrepreneurship*) orang Tionghoa mungkin tidak terkait terlalu banyak dengan nilai subyektif ilmu(an). Namun apabila penelitiannya berkisar tentang sesuatu yang bersinggungan dengan moral, akhlak, susila dan sejenisnya, maka persoalan subyektivitas akan muncul. Jika meneliti tentang korupsi, misalnya, seorang ilmuwan tidak akan memberikan penilaian subyektif baik buruk secara moral dan agama tetapi barangkali ia menanyakan tentang mengapa korupsi bisa muncul, bertahan bahkan menjadi bahagian dari kehidupan.

b. Fakta Sosial

Konsep berikutnya yang perlu dipahami adalah fakta sosial. Fakta sosial yang dimaksudkan oleh Durkheim tidak sama dengan konsep fakta yang dipahami oleh orang awam (orang kebanyakan). Dalam kehidupan sehari-hari, orang awam memahami fakta berhubungan dengan semua yang tampak dan ditangkap oleh panca indera. Sedangkan fakta sosial menurut Durkheim adalah semua cara bertindak, berpikir dan merasa yang ada di luar individu, bersifat memaksa dan umum. Fakta sosial, oleh karena itu, memiliki tiga karakteristik: satu, eksternal, yaitu di luar individu. Fakta sosial ada sebelum individu ada dan akan tetap ada setelah individu tiada. Dua, *determined / coercive*, yaitu

fakta sosial memaksa individu agar selalu sesuai dengannya (fakta sosial). Tiga, *general*, yaitu tersebar luar dalam komunitas/masyarakat, milik bersama, bukan milik individu. Jadi, kepentingan dan motif individu, misalnya, tidak termasuk fakta sosial dalam pandangan Durkheim, karena kepentingan dan motif merupakan sesuatu yang bersifat internal dari seorang individu.

Mari kita pahami dengan contoh. Misalkan Anda melakukan studi tentang konsumsi dengan menggunakan fakta sosial. Bagaimana Anda melakukannya? Anda harus membatalkan pemikiran Anda bahwa konsumsi dipandang sebagai fakta sosial. Itu artinya bahwa kenyataan konsumsi, misalnya pola busana, pola konsumsi, atau cara makan, merupakan kenyataan yang bersifat eksternal, umum dan memaksa. Apa maksudnya? Misalkan pernahkah Anda memimpikan tampil beda secara ekstrim dengan apa yang diterima secara apa adanya selama ini? Katakanlah dalam berbusana misalnya! Jika Anda seorang pria, mungkin pernah terlintas dalam pikiran untuk memperlihatkan tubuh Anda yang atletis bak otot besi, kokoh, kuat dan menarik, kepada khalayak melalui busana renang, seperti yang dipertunjukkan iklan dari salah satu produk minuman suplemen di televisi. Lintasan pikiran tersebut tidak pernah diwujudkan dalam dunia nyata, kecuali di kolam renang. Kenapa? Karena Anda takut tampil beda dengan pola busana yang ada dalam masyarakat Anda! Dengan kata lain, Anda takut terhadap sifat (karakteristik) memaksa dari fakta sosial. Jika Anda realisasikan lintasan pikiran Anda tersebut untuk memakai busana renang pada saat Anda mengunjungi, misalnya, apa yang terjadi? Orang-orang yang berpapasan dengan Anda akan kaget melihat cara Anda berbusana. Di antara mereka mungkin ada yang berucap: “kasihan ya, orangnya gagah, tapi gila!”, “bocor kali ya”, atau “lupa makan obat kali”. Atau bahkan sebelum masuk ke kampus Anda sudah dicegat terlebih oleh petugas keamanan kampus, karena dikira orang tidak waras yang mungkin akan merusak keamanan dan ketentraman kampus. Sifat memaksa fakta sosial dalam kasus ini ditunjukkan oleh ucapan orang lain terhadap Anda bahwa Anda tidak waras, oleh sebab itu pula petugas keamanan melarang Anda masuk kampus. Sedang karakteristik eksternal diperlihatkan dengan adanya ketidakinginan untuk berbeda dari pola busana yang telah ada dalam masyarakat. Pola busana, oleh karena itu, merupakan sesuatu yang berada diluar individu dan bukan milik individu

pribadi tetapi milik bersama, yang tersebar meluas dalam suatu komunitas atau disebut umum.

Mungkin Anda masih belum begitu paham tentang apa itu fakta sosial. Untuk itu penajaman pemahaman mari kita ambil suatu contoh lain. Katakanlah Anda adalah seorang perempuan yang baru saja satu jam berlalu ditinggalkan oleh suami karena meninggal dunia akibat suatu kecelakaan pesawat, Karena Anda seorang wanita tegar dan sabar Anda sebenarnya mampu mengelola kesedihan dan kedukaan yang mendalam sehingga Anda tidak tampak sedih dan menangis di hadapan khalayak. Namun itu tidak Anda lakukan, sebab dalam masyarakat di mana Anda tinggal, apabila seorang istri ditinggal oleh suami karena meninggal, maka ia harus memperlihatkan kesedihan dan kedukaan. Jika tidak, masyarakat akan melekatkan Anda dengan suatu stigma, misalnya, pernyataan, “pantasan tidak sedih suami meninggal, senang sih bersama selingkuhan” atau masyarakat curiga jika Anda tidak sehat alias kurang waras. Kenapa demikian? Karena kesedihan dan kedukaan harus menyertai meninggalnya seseorang yang dicintai, seperti yang orang lain juga lakukan. Hal itu disosialisasikan dalam masyarakat kepada semua anggota masyarakat, sehingga hal itu tersebar di seluruh anggota masyarakat (bersifat umum) dan bersifat eksternal dari diri sendiri, karena itu merupakan hasil proses sosialisasi. Sedangkan sifat memaksa terlihat dari stigma yang dikenakan oleh masyarakat kepada seseorang yang merasa, bertindak dan berperilaku yang tidak sesuai dengan fakta sosial.

Apa asumsi yang ada dibalik fakta sosial? Adapun asumsi tentang fakta sosial meliputi: satu, gejala sosial itu riil dan mempengaruhi kesadaran individu serta perilakunya yang berbeda dari karakteristik psikologis, biologi, atau karakteristik individu lainnya. Apa maksudnya? Fakta sosial dipandang sebagai gejala riil, dirasakan keberadaannya oleh anggota masyarakat dan menjadi tuntunan bagi individu dalam merasa, bersikap, bertindak dan berperilaku. Fakta sosial berbeda dengan fakta psikologis karena fakta sosial bukan fenomena kesadaran individual seperti motif dan tujuan pribadi, juga berbeda dengan fakta biologis, karena fakta sosial bukan berupa warisan individual yang melekat pada diri orang perseorangan seperti warna kulit atau latarbelakang ras, melainkan sesuatu yang dianut dan dipakai secara bersama. Dua, oleh karena gejala

sosial adalah fakta yang riil, maka gejala-gejala tersebut dapat diamati/dipelajari dengan metoda empirik. Apa maksud dapat diamati/dipelajari? Fakta sosial dipahami sebagai suatu kenyataan yang dapat dirasakan melalui inderawi manusia. Oleh karena secara inderawi bisa menangkap dan merasakan kehadiran fakta sosial, maka ia dapat diamati/dipelajari. Ini mengingatkan kita pengaruh positivisme Prancis terhadap Durkheim. Merujuk pada asumsi dan karakteristik fakta sosial di atas maka, fakta sosial harus dianggap sebagai suatu hal yang nyata. Apa yang dimaksud dengan sebagai suatu hal yang nyata? Menurut Durkheim sebagai suatu yang nyata tersebut dapat mengambil dua bentuk, seperti dikatakan oleh Ritzer (1985: 17), yaitu:

1. dalam bentuk material : yaitu barang sesuatu yang dapat disimak, ditangkap, dan diobservasi seperti arsitektur dan norma hukum.
2. dalam bentuk non material : yaitu sesuatu yang dianggap nyata, muncul dalam kesadaran manusia, seperti rasa hiba, kemarahan, dll.

Jika fakta sosial dalam bentuk material dapat ditangkap, disimak dan diamati seperti pola pemukiman dan pola busana, maka itu artinya melalui inderawi manusia bahwa kenyataan tentang pola pemukiman tersebut merupakan sesuatu hal yang nyata diobservasi dan ditangkap. Pola busana muslimah, misalnya, berbeda dengan pola busana perempuan Eropa. Perbedaan pola busana tersebut merupakan sesuatu yang nyata dan dapat diamati dan ditangkap melalui inderawi manusia.

Sedangkan apabila fakta sosial dalam bentuk non material, maka ia dapat dirasakan kenyataannya dalam kesadaran manusia. Kenyataan yang muncul dalam kesadaran manusia tersebut, seperti kesedihan atau kegembiraan, dipandang sebagai sesuatu yang dapat diamati dalam kenyataan keseharian pada suatu komunitas, berbeda dari sesuatu yang bersifat subjektif dan individual. Kesedihan, misalnya, dipelajari dalam masyarakat. Karena ia dipelajari maka kesedihan tidak dilihat sebagai fakta psikologis, melainkan ia dipandang sebagai fakta sosial. Jika kesedihan sebagai fakta psikologis, maka ketika orangtua dari seorang anak usia 3 tahun meninggal dunia, mengapa sang anak tidak merasakan kesedihan tentang kepergian orangtuanya dari muka bumi ini menuju alam kubur? Seorang anak baru akan merasakan kesedihan ketika dia telah belajar dan memahami tentang konsep orangtua dan konsep kematian secara utuh dan

jelas. Itu artinya munculnya kesadaran tentang kesedihan tatkala kesedihan telah dipelajari seseorang dari komunitasnya, sehingga orang tersebut dapat merasakan kenyataan tentang kesedihan itu seperti apa dan bagaimana.

2. Max Weber



Weber dilahirkan di Erfurt tahun 1864 sebagai anak tertua dari 8 orang bersaudara. Ayahnya seorang otoriter sedangkan ibunya adalah seorang saleh yang teraniaya. Oleh karena itu terjadi cekcok hebat antara Max Weber dengan ayahnya, sehingga dia mengusir ayahnya. Ia lebih banyak dipengaruhi paman dan tantenya. Weber mengecap berbagai pendidikan, antara lain ekonomi, sejarah, hukum, filosofi, dan teologi. Ia meraih gelar doktor dalam studi organisasi dagang abad pertengahan. Ia diangkat jadi guru besar dalam studi sejarah agraria Romawi di Berlin serta menjadi guru besar ekonomi di Freiburg 1894 dan 1896 di Heidelberg.

Adapun karya-karya utama yang sering dirujuk oleh para ahli sosiologi dari Max Weber, adalah sebagai berikut:

Methodological Essays (1902)

The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (1902-1904)

Economy and Society (1910-1914)

Sociology of Religion (1916)

Max Weber mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang berhubungan dengan pemahaman interpretatif mengenai tindakan sosial. Dalam pandangan Weber tentunya perlu kita pahami konsep pemahaman interpretatif dan tindakan sosial.

a. Pemahaman Interpretatif

Pemahaman interpretatif merupakan konsep yang diterjemahkan dari konsep *verstehen*. Pemahaman interpretatif yaitu suatu cara atau usaha untuk memahami suatu tindakan arti/makna subyektif bagi dirinya dan dikaitkan dengan orang lain. Ada beberapa cara untuk memahami (*verstehen/understanding*) makna :

1. Rasional

Rasional dipahami secara sederhana sebagai sesuatu yang dipahami secara masuk akal. Misalnya, “jika air membasahi sedangkan api membakar”, “matahari terbit pada sebelah timur, dan akan tenggelam pada sisi barat”, atau $1 + 1 = 2$ bukan yang lain.

2. Empatik

Empatik merupakan suatu kemampuan untuk menempatkan diri dalam kerangka berpikir orang lain. Di sini peneliti melibatkan diri secara emosional eksternal. Sering dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan ungkapan berikut: “jika saya Anda, saya akan melakukan hal yang sama “. Itulah merupakan cara empatik untuk memahami suatu tindakan sosial. Misalnya, kalau saya perempuan, sebenarnya saya berkelamin laki-laki, ingin tampil menarik maka saya juga menggunakan lipstik.

3. Apresiatif

Apresiatif adalah cara pemahaman arti subyektif sendiri untuk memahami arti subyektif tindakan orang lain. Di sini peneliti melibatkan diri secara emosional internal. Pemahaman tersebut juga sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia seperti jika kaki kita ter(di)injak terasa sakit, maka demikian pula orang lain merasakan sakit jika kaki mereka ter(di)injak. Oleh karena itu kita harus berhati-hati agar kaki orang lain tidak ter(di)injak.

Pemahaman (*understanding*) dapat dibagi dua jenis, yaitu : satu, *observational understanding/aktualles verstehen* (pemahaman observasional atau pemahaman aktual), pemahaman melalui observasi langsung atau ekspresi simbolis tanpa melihat konteks yang lebih luas. Misalnya seseorang yang terserang kesedihan mendalam atau kemarahan besar terlihat dari wajahnya. Seseorang yang dirundung kesedihan mendalam tampak dari kerutan atau mimik wajah yang sendu dan kelam. Sedangkan seseorang yang terserang kemarahan besar terlihat dari wajah yang memerah, menahan marah.

Dua, *explanatory understanding/eklarandes verstehen* (pemahaman penjelasan) merupakan pemahaman dengan menempatkan aksi ke dalam konteks makna yang lebih luas. Pemahaman ini mencari bentuk motif, yaitu : apa yang menyebabkan seseorang melakukan hal seperti itu dalam situasi itu. Misalnya, seseorang membeli gas tabung

karena persediaan gas di rumahnya telah habis. Seseorang harus memantik tombol pemantik kompor gas agar menyala apinya sehingga bisa memanaskan makanan. Kata karena dan agar menunjukkan suatu motif. Kaitan antara bahagian yang disatukan oleh kata karena dan agar menunjukkan suatu motif. Apabila konteks pemaknaan peristiwa di atas diperluas maka bisa dipahami sebagai berikut: seseorang membeli gas tabung karena persediaan gas di rumahnya telah habis sehingga dia tidak bisa memanaskan makanan. Agar menyala apinya dia harus memantik tombol pemantik kompor. Pemahaman penjelasan dapat dimengerti disebabkan oleh susunan keseluruhannya memperlihatkan konsistensi logis, harmoni yang estetik, atau kecocokan antara tujuan dan cara.

Setiap interpretasi pemahaman tentunya diusahakan mencapai tingkat kejelasan dan kepastian yang tinggi. Meskipun demikian, betapapun jelasnya interpretasi itu, tidak dapat dikatakan “*causally valid*” (absah secara kausal), itu hanya dilihat sebagai “*peculiarly plausible hypothesis*” (sebagai hipotesa saja). Hal tersebut disebabkan karena:

1. motif yang disadari, bahkan oleh aktornya sendiri, dimungkinkan menyelubungi motif lainnya yang merupakan pendorong utama aksi itu.
2. dua proses aksi yang bagi pengamat kelihatan persis sama bentuknya, dapat saja didorong oleh dua motif yang sama sekali berbeda.
3. aktor dalam suatu situasi sering didorong oleh beberapa dorongan yang kontradiktif yang masing-masing dapat dipahami. Dalam keadaan seperti ini, sukar sekali menduga dengan pasti dorongan yang mana menyebabkan terjadinya aksi itu.

b. Tindakan Sosial

Tindakan sosial merupakan suatu tindakan individu yang memiliki arti atau makna (*meaning*) subjektif bagi dirinya dan dikaitkan dengan orang lain. Untuk memahami batasan konsep tindakan sosial ada baiknya kita ambil suatu contoh. Kita ambil sebuah kasus berikut. Tirto melempar batu ke sungai adalah suatu tindakan, namun hal itu belum dapat dikategorikan sebagai tindakan sosial, apalagi sebagai interaksi sosial. Namun apabila Tirto melempar batu ke sungai agar temannya, Hidayat, yang sedang di seberang sungai melihat dia. Maka aktifitas seperti itu dapat dipandang sebagai

tindakan sosial, yaitu suatu tindakan individu yang memiliki arti atau makna (*meaning*) subjektif bagi dirinya dan dikaitkan dengan orang lain.

Jika contoh tersebut masih belum memberikan suatu pemahaman, maka ada baiknya didiskusikan contoh lain. Katakanlah Anda seorang pria, biasanya dipandang tidak sebagai pesolek. Ketika gaya rambut Anda berubah, dari sisiran ke samping, dikenal dengan *beatle*, menjadi belah tengah, membuat para sahabat Anda memberikan bermacam komentar. Jawaban Anda adalah, “cari suasana baru saja!”. Maka aktifitas merubah gaya rambut, apapun alasannya, dapat dipandang sebagai tindakan sosial. Kenapa demikian? Apapun alasan Anda, tetap akan berujung pada keberadaan kaitan dengan orang lain atau dikenal dengan konsep sosial. Oleh sebab itu, tindakan Anda yang memiliki makna subjektif, seperti “cari suasana baru saja!”, berkait dengan orang lain. Kenapa bisa begitu? Sebab Anda perlu “cari suasana baru saja!” agar ada sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya dalam kaitannya dengan orang lain. Inilah dimensi sosial dari suatu tindakan subjektif.

Weber menemukan bahwa tindakan sosial tidak selalu memiliki dimensi rasional tetapi terdapat berbagai tindakan non rasional yang dilakukan oleh orang, termasuk dalam tindakan orang dalam kaitannya dengan berbagai aspek dari kehidupan, seperti politik, sosial, dan ekonomi. Weber menemukan 4 tipe dari tindakan sosial, yaitu:

1. Tindakan rasional instrumental (*Zweckrationalität / instrumentally rational action*), yaitu suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pilihan yang sadar dalam kaitannya dengan tujuan suatu tindakan dan alat yang dipakai untuk meraih tujuan yang ada. Misalnya kenapa para pengusaha banyak menjadi calon anggota legislatif? Ternyata dari pengalaman hidup para pengusaha dalam dunia bisnis, kehidupan mereka tidak bisa dilepaskan dari dunia politik. Oleh sebab itu mengombinasikan dua aspek kehidupan, yaitu bisnis dan politik, merupakan usaha yang strategis untuk meraih kesempatan (di dalamnya terdapat keuntungan material) yang lebih besar dibandingkan jika hanya berbisnis saja. Tindakan pengusaha tersebut dapat dipandang sebagai tindakan rasional instrumental, karena mempertimbangkan antara tujuan yang ingin dicapai (keuntungan material yang lebih besar) dan alat yang digunakan untuk mencapai

tujuan (berbisnis sambil berpolitik) tersebut. Bila Anda perlu contoh lain untuk memahami lebih dalam. Berikut ini disajikan contoh tersebut. Jika Anda seorang pekerja, maka apapun alasannya dipastikan Anda memilih pekerjaan yang dimiliki tersebut merupakan hasil dari pertimbangan alat dan tujuan yang Anda miliki seperti pendidikan, keterampilan (keahlian), kesempatan, latarbelakang dan kondisi keluarga.

2. Tindakan rasional nilai (*Wertrationalität / value rational action*), yaitu tindakan di mana tujuan telah ada dalam hubungannya dengan nilai absolut dan nilai akhir bagi individu, yang dipertimbangkan secara sadar adalah alat mencapai tujuan. Memberi infaq dan sadhaqah di kalangan umat Islam, misalnya, dapat dilihat sebagai tindakan rasional nilai. Menjadi hamba Allah yang diridhoi dan meraih surga di akhirat kelak merupakan tujuan yang berorientasi kepada nilai absolut dan nilai akhir. Pilihan memberi infaq dan sadhaqah sebanyak mungkin sebagai alat untuk meraih tujuan yang berorientasi kepada nilai absolut dan nilai akhir tersebut tidak bisa dinilai apakah lebih efisien dan efektif dibandingkan mengerjakan sholat sunat, misalnya. Mungkin ada baiknya dilanjutkan dengan contoh lain. Untuk hidup Anda jelas membutuhkan suatu pekerjaan, apakah Anda mencarinya atau membuat sendiri. Itu salah satu tujuan Anda. Namun tidak semua pekerjaan mau Anda lakukan. Kenapa? Sebab Anda memiliki nilai dan norma yang menjadi patokan atau rujukan Anda dalam melakukan sesuatu, termasuk dalam hal pekerjaan. Oleh karena itu, Anda tidak akan bekerja dalam perjudian dan prostitusi, misalnya, meskipun pendapatan yang akan diperoleh relatif besar. Jadi, tindakan tersebut dipandang sebagai tindakan rasional nilai.
3. Tindakan afektif (*affectual action*), yaitu tindakan yang didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Misalnya tindakan-tindakan yang dilakukan karena cinta, marah, takut, gembira sering terjadi tanpa diikuti dengan pertimbangan rasional, logis dan ideologis. Ketika dua anak manusia berlainan jenis sedang dilanda badai asmara, misalnya, yang menyebabkan mereka mengalami “mabuk cinta”, tidak jarang mereka melakukan suatu tindakan yang tidak rasional dan logis, sehingga seolah-olah merasakan “tahi gigi jadi cokelat”. Contoh lain adalah misalkan Anda merasa

terhina oleh perlakuan seorang tetangga, oleh karenanya Anda marah dan tidak terima atas perlakuan tersebut. Pada hal Anda terhina karena tetangga tersebut mengeritik Anda dihadapan orang ramai atas sikap Anda yang tidak memerhatikan (cuek) terhadap penampilan diri, sehingga Anda terkesan kampungan. Karena Anda marah dan tersinggung maka apa saja yang dikerjakan oleh tetangga tersebut Anda pandang jelek selalu, tidak pernah benar di mata Anda. Tindakan ini mencerminkan tindakan afektif, tindakan didasari emosi atau perasaan tanpa refleksi intelektual.

4. Tindakan tradisional (*traditional action*), yaitu tindakan karena kebiasaan atau tradisi. Tindakan tersebut dilakukan tanpa refleksi yang sadar dan perencanaan. Apabila ditanyakan kenapa hal tersebut dilakukan? Jawaban yang diberikan adalah karena nenek moyang mereka telah melakukannya semenjak dahulu kala. Oleh karena itu tradisi ini harus dilanjutkan, kata pelaku tindakan tradisional. Jika ditanyakan kepada para aktivis mahasiswa, sebagai suatu contoh, kenapa mereka masih melakukan plonco terhadap mahasiswa baru? Jawaban mereka adalah ini sudah jadi tradisi mahasiswa. Alasan untuk menciptakan keakraban yang dilontarkan mahasiswa untuk menopang alasan tradisi sering dipatahkan oleh argumentasi bahwa secara sosiologis dan psikologis manusia cenderung untuk berteman. Oleh sebab itu tidakpun ada plonco, mahasiswa junior akan berusaha berteman dengan seniornya. Lagipula kenapa harus dengan pemaksaan jika tujuannya untuk menciptakan hubungan antara senior dan junior? Jika belum paham, berikut contoh kedua. Jika Anda ditanyakan terhadap suatu tindakan yang Anda lakukan, sedangkan jawabannya adalah semua orang melakukannya dan Anda juga melakukannya seperti nenek moyang Anda. Maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindakan tradisional. Karena Anda melakukan suatu tindakan karena orang lain melakukan dan juga Anda berulang kali melakukan, tanpa ada suatu refleksi sadar dan perencanaan terhadap hal itu.

Apakah Anda sudah paham? Jika belum, kiranya perlu untuk melihat penjelasan Pip Jones (2009: 115) tentang tipologi tindakan sosial dengan cara menarik, lugas dan tajam. Berikut ini penjelasan dari Jones:

Tindakan tradisional	Saya melakukan ini karena saya selalu melakukannya
Tindakan afektif	Apa boleh buat saya lakukan
Tindakan rasional nilai	Yang saya tahu saya hanya melakukan ini
Tindakan rasional instrumental	Tindakan ini paling efisien untuk mencapai tujuan ini, dan inilah cara terbaik untuk mencapainya

3. Peter L. Berger

Peter L Berger mengemukakan bahwa sosiologi merupakan studi ilmiah tentang hubungan antara masyarakat dan individu. Pada batasan yang dikemukakan Peter L. Berger terdapat 3 konsep yang harus dipahami agar kita mengerti tentang definisi Berger tersebut, yaitu studi ilmiah, masyarakat, dan individu. Konsep studi ilmiah merupakan konsep lain dari konsep ilmu atau ilmu pengetahuan (sain) seperti yang telah didiskusikan di atas.

a. Masyarakat

Konsep masyarakat, menurut P. L. Berger, dipandang sebagai suatu keseluruhan kompleks hubungan yang luas sifatnya. Maksud keseluruhan kompleks hubungan adalah adanya bagian-bagian yang membentuk kesatuan. Misalnya tubuh manusia terdiri dari berbagai macam organ seperti jantung, hati, limpa, pembuluh darah, jaringan otak, dan sebagainya. Keseluruhan bagian yang ada membentuk suatu sistem yang dikenal sebagai manusia. Analogi bagian-bagian dalam masyarakat adalah hubungan sosial, seperti hubungan antar jenis kelamin, hubungan antar usia, hubungan antar dan inter keluarga, hubungan perkawinan, dan seterusnya. Keseluruhan hubungan sosial tersebut dikenal dengan masyarakat.

Hubungan-hubungan tersebut tidak terbentuk secara tidak beraturan atau sembarangan, tetapi sebaliknya hubungan tersebut memiliki semacam keteraturan atau pola. Seperti hubungan persahabatan dalam kehidupan keseharian memiliki pola yang berbeda dengan hubungan pertemanan. Hubungan persahabatan menuntun para sahabat

untuk saling membantu, saling berbagi, dan saling mendukung. Tuntunan berperilaku saling secara positif tersebut dikenal sebagai resiprositas. Asas resiprositas merupakan dasar pembentuk pola hubungan. Apabila asas resiprositas dilanggar oleh salah satu aktor pembentuk suatu hubungan persahabatan maka hubungan persahabatan bisa bubar. Keteraturan hubungan persahabatan ditandai oleh konsistensi dalam implementasi asas resiprositas, akan dibahas lebih rinci pada bab 4.

Oleh karena itu, masyarakat, berdasarkan definisi Berger, dilihat sebagai sesuatu yang menunjuk sistem interaksi. Sistem adalah sekumpulan dari bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan dalam ketergantungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Dari pengertian tersebut, maka sistem memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. terdiri dari berbagai/banyak bagian atau komponen
- b. bagian-bagian dari sistem berjalın-kulindan satu sama lain dalam hubungan saling ketergantungan
- c. suatu keseluruhan atau totalitas menunjuk pada kompleksitas hubungan yang harus dipahami secara holistik.

Sementara konsep interaksi, seperti telah dipahami sebelumnya, sebagai tindakan yang terjadi paling kurang antara dua orang yang saling mempengaruhi perilakunya. Dari definisi tersebut maka hubungan persahabatan seperti yang telah didiskusikan di atas dapat dipandang sebagai suatu bentuk masyarakat.

b. Individu

Individu adalah subyek yang bertindak (aktor). Konsep subyek menunjuk sesuatu yang berhubungan dengan dunia internal manusia. Subyek memiliki keinginan, kemauan, kehendak, pikiran, gagasan, dan kebebasan dalam melakukan sesuatu seperti memberikan makna, menilai sesuatu, menentukan pilihan, dan menginterpretasi keadaan berdasarkan keinginan, kemauan, kehendak, pikiran, gagasan, dan kebebasan yang dimilikinya tersebut. Untuk memahami ini mari kita ambil suatu contoh. Ketika sapu tangan seorang gadis jatuh pada suatu pertemuan akan dimaknai berbeda oleh setiap orang. Sebutlah namanya Bujang akan memandang jatuhnya sapu tangan sebagai suatu

ketidaksengajaan, mungkin karena tergesa-gesa meletakkannya. Sedangkan bagi Jaka, misalnya, berdasarkan pengalaman bertemu, bertatap muka, dan saling tukar senyum pada masa sebelumnya, dapat saja menginterpretasikan sapu si gadis sebagai “undangan”, “wahai pria dekatilah daku”, demikian makna yang diberikan oleh Jaka. Perbedaan interpretasi keadaan dan definisi situasi tersebut memperlihatkan bagaimana individu memiliki keinginan, kemauan, kehendak, pikiran, gagasan, dan kebebasan dalam melakukan hal tersebut.

c. Hubungan antara Masyarakat dan Individu

Hubungan antara masyarakat dan individu bersifat dialektik dalam proses eksternalisasi, obyektifikasi, dan internalisasi. Momen eksternalisasi dari proses dialektik hubungan antara masyarakat dan individu merupakan momen di mana individu atau manusia memberikan makna, menilai sesuatu, menentukan pilihan, dan menginterpretasi keadaan berdasarkan keinginan, kemauan, kehendak, pikiran, gagasan, dan kebebasan yang dimilikinya. Misalnya dalam hubungan antara dua orang anak manusia, katakanlah antara Irwan dan Adam, menunjukkan hubungan yang dipenuhi oleh proses memberikan makna, menilai sesuatu, menentukan pilihan, dan menginterpretasi keadaan berdasarkan keinginan, kemauan, kehendak, pikiran, gagasan, dan kebebasan yang dimiliki mereka masing-masing. Ketika Irwan mempunyai kesulitan maka ia akan “curhat” pada Adam. Demikian pula sebaliknya apabila Adam mempunyai persoalan, maka ia mengharapkan ada perhatian dari Irwan terhadap persoalan yang sedang melilitnya tersebut. Ini merupakan momen eksternalisasi pada proses dialektik hubungan antara Irwan dan Adam.

Ketika pemaknaan, penilaian dan interpretasi yang dilakukan oleh Irwan dan Adam terhadap perilaku yang diharapkan dalam menghadapi persoalan atau masalah seperti yang disebut di atas berulang dan terpola, dan menjadi baku dan sesuatu obyektif, yaitu sesuatu yang berada di luar individu, maka terjadilah obyektifikasi. Pada momen obyektifikasi, perulangan tindakan sehingga menjadi suatu pola tindakan terhadap sesuatu menandai munculnya struktur sebagai sesuatu yang obyektif, sebagai standar untuk melakukan tindakan. Untuk memahami ini mari kita lanjutkan kisah hubungan antara Irwan dan Adam di atas. Apabila Irwan mempunyai masalah maka Adam akan siap sedia

menerima “curhat”, mencurahkan perhatian, dan memberikan bantuan pada Irwan. Demikian pula, sebaliknya, bila Adam dirundung persoalan maka Irwan siap sedia pula melakukan hal yang sama. Perulangan tindakan Irwan dan Adam tersebut membentuk pola hubungan antara Irwan dan Adam, yang dikenal dengan struktur, yaitu struktur persahabatan. Struktur persahabatan ini bersifat obyektif. Ia menuntun cara berpikir, bertindak, dan perilaku Irwan dan Adam dalam hubungan di antara sesama mereka.

Struktur persahabatan inilah dalam pandangan Berger dikenal pula sebagai sistem interaksi. Dengan kata lain, hubungan antara Irwan dan Adam yang terpolakan membentuk sistem interaksi. Ini artinya pula, hubungan mereka, dalam perspektif Berger, membentuk masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat dipahami sebagai sesuatu yang obyektif, yaitu sesuatu yang berada di luar diri mereka.

Bagaimana hubungan yang berulang dan terpolakan antara Irwan dan Adam, yang membentuk struktur persahabatan tidak lagi menjadi sesuatu hal yang bersifat obyektif, sesuatu yang berada di luar sana? Internalisasi merupakan momen dialektis di mana sesuatu yang berada di luar sana menjadi sesuatu yang berada di dalam diri. Proses ini “mendarah-dagingkan” sesuatu yang obyektif menjadi sebagai sesuatu yang subyektif sehingga masyarakat yang tadinya dipandang hanya sebagai entitas obyektif di luar manusia, melalui internalisasi sekaligus dilihat sebagai entitas yang subyektif di dalam kesadaran manusia.

Dari ketiga tokoh sosiologi tersebut ternyata terdapat perbedaan tajam di antara mereka. Emile Durkheim menekankan pada tataran makro, di mana fakta sosial sebagai fokus kajian sosiologi. Sedangkan Max Weber menekankan pada tataran mikro, di mana tindakan sosial sebagai fokus kajian sosiologi. Sementara Peter L. Berger menjembatani pemikiran sosiologi makro dan mikro, di mana sosiologi membahas hubungan antara masyarakat (fakta sosial, dalam konsepsi Durkheim) dan individu (tindakan sosial, dalam konsepsi Weber). Dengan kata lain, aspek masyarakat dipengaruhi oleh pemikiran Durkheim dengan fakta sosial-nya sedangkan aspek individu dipengaruhi oleh pemikiran Weber dengan tindakan sosialnya.

B. PENGERTIAN PERDESAAN

Perdesaan berasal dari kata desa. Kata yang berasal dari bahasa Jawa. Desa dalam bahasa etnik yang terdapat di Indonesia, mengenal berbagai istilah seperti Batak disebut dengan *huta* atau *kuta*, Minangkabau dikenal sebagai *nagari*, Aceh disebut sebagai *gampong*, Bugis dikenal dengan *matowa*, Makasar disebut dengan *gukang*, atau Minahasa disebut dengan *wanua*.

Dalam berbagai literatur, konsep desa dipersandingkan dengan kota. Sehingga ketika desa didiskusikan sebagai suatu konsep maka biasanya terkait pula pembicaraan dengan konsep perkotaan atau kota. Apa yang dilakukan oleh para ahli ketika mereka akan merumuskan konsep desa? Paling tidak ada beberapa cara yang dilakukan oleh para ahli, antara lain: satu, perbedaan statistik penduduk. Para ahli tidak bersepakat berapa jumlah penduduk atau warga apabila wilayah tersebut disebut sebagai desa. Namun dari beberapa pendapat yang ada, penduduk atau warga desa berkisar pada 2000-2500 orang. Dua, perbedaan relasi sosial. Para ahli mencoba membandingkan antara desa dan kota berdasarkan perbedaan dasar dan kualitas relasi sosial, yaitu antara lain Ferdinand Tönnies dan Emile Durkheim. Misalnya relasi sosial di desa cenderung alamiah, intim, dan intens. Tiga, perbedaan infrastruktur ekonomi. Seperti halnya perbedaan statistik penduduk dan relasi sosial, para ahli membuat perbedaan antara desa dan kota berdasarkan landasan infrastruktur ekonomi yang ada. Para ahli cenderung menetapkan ciri desa dengan ekonomi pertanian, sedangkan kota dengan ekonomi industri.

Bagaimana posisi buku ini memahami perbedaan antara desa dan kota? Desa dan kota adalah konsep lokalitas (tempatan), yaitu suatu konsep ruang di mana orang menghabiskan sebagian besar waktunya dalam relasi dengan orang lain, yang merupakan produk dari kehendak manusia (*Wille/will*). Manusia, menurut Ferdinand Tönnies, memiliki kehendak yang bersifat *Wessenwille* (kehendak alamiah) dan *Kurwille* (kehendak rasional). Kehendak alamiah (*Wessenwille*) manusia menghasilkan relasi sosial yang bersifat intim, pribadi dan afeksi. Relasi sosial yang berlandaskan *Wessenwille* (kehendak alamiah) inilah menjadi karakteristik utama dari relasi sosial desa, yang dibedakan dengan relasi sosial kota yang bercirikan hubungan parsial, transaksional, dan netral afeksi, yang dihasilkan oleh kehendak rasional (*Kurwille*).

Selain itu, perbedaan desa dan kota berhubungan dengan ada atau tidaknya ekonomi pasar. Apa itu ekonomi pasar? Dalam bukunya *The Great Transformation* pada bab "Rise and Fall of Market Economy", Karl Polanyi menjelaskan bagaimana muncul ekonomi pasar dalam masyarakat. Penjelasan Polanyi tentang munculnya ekonomi pasar berangkat dari pendapat Thurnwald dari bukunya *Economic in Primitive Communities*, "pasar tidak ditemukan di mana-mana. Ketiadaannya, menunjukkan adanya isolasi tertentu dan kecenderungan ke arah isolasi, tidak lagi dikaitkan dengan suatu perkembangan khusus sebagaimana halnya yang dapat disimpulkan dari kehadirannya". Untuk menunjang kutipan tersebut, Polanyi mengutip pendapat penulis lain, "fakta bahwa suatu suku menggunakan uang, sedikit sekali membedakannya dari suku-suku lain yang secara ekonomis tidak menggunakannya pada tingkat budaya yang sama". Berdasarkan kutipan tersebut Polanyi menegaskan bahwa ada atau tidaknya pasar atau uang tidak perlu memengaruhi sistem ekonomi suatu masyarakat primitif. Ini membuktikan ketidakbenaran mitos abad ke-19 bahwa uang adalah sebuah penemuan yang kemunculan mau tidak mau merubah suatu masyarakat dengan menciptakan pasar, mempercepat pembagian kerja dan menyalurkan kecenderungan alami manusia untuk melakukan tukar-menukar. Karena pasar dalam masyarakat primitif cenderung ke arah isolasi.

Ekonomi klasik berlandaskan pandangan yang berlebihan tentang pentingnya pasar. Mereka memandang bahwa kecenderungan pribadi untuk melakukan barter akan mengarah perlunya pasar lokal dan pembagian kerja yang akhirnya memunculkan perdagangan. Lanjutan perkembangannya adalah munculnya perdagangan luar negeri yang akhirnya akan meluas menjadi perdagangan jarak jauh. Argumen ekonomi klasik tersebut, menurut Polanyi, tidak bersua dalam kenyataan. Oleh sebab itu Polanyi (1957: 58) membalikkan rangkaian argumen tersebut: "titik tolak yang betul adalah perdagangan jarak jauh, suatu akibat logis dari lokasi barang-barang yang bersifat geografis, serta "pembagian kerja" yang diakibatkan oleh lokasi tersebut. Perdagangan jarak jauh melahirkan pasar, yakni sebuah pranata yang melibatkan tindakan barter, serta pembelian dan penjualan, jika uang digunakan, dan dengan demikian, akhirnya menjadi benar-benar diperlukan, untuk menawarkan kepada beberapa individu suatu kesempatan memenuhi kecenderungan mereka melakukan tawar-menawar.

Di sini terlihat bahwa Polanyi menekankan asal muasal perdagangan dalam sebuah lingkungan eksternal yang tidak mempunyai kaitannya dengan ekonomi internal. Dengan kata lain perdagangan muncul dari usaha untuk mencari barang di luar batas wilayah, adanya suatu jarak. Jika suatu komunitas manusia tidak pernah melakukan perdagangan eksternal sama sekali, maka tidak perlu (tidak muncul) pasar.

Berdasarkan data sejarah, Polanyi melihat ketidakmungkinan pasar lokal berkembang dari tindakan barter yang bersifat individual. Karena awal dari pasar lokal masih kabur. Polanyi melihat bahwa pranata ini diselimuti oleh penjagaan organisasi ekonomi masyarakat, misalnya melalui tabu, sehingga ia terlindung dari kegiatan pasar. Perdagangan internal juga dibaluti oleh lembaga sosial politik, seperti monopoli, yang menghambat munculnya pasar.

Pasar mengatur kehidupan sosial, termasuk ekonomi, secara otomatis. Karena pencapaian kepentingan pribadi dan kesejahteraan individu akan membawa hasil yang terbaik, tidak hanya mereka sebagai pribadi tetapi juga kepada masyarakat sebagai keseluruhan (Thompson et al, 1991). Mekanisme ini dipandang oleh Adam Smith sebagai "tangan-tangan tersembunyi" (*invisible hand*). Dengan kata lain, seperti kata Levacic (1991), karakteristik yang penting dari pasar, dipandang sebagai salah satu mekanisme yang bekerja dalam kehidupan sosial, adalah pertukaran bebas terhadap barang dan jasa antara dua partai pada suatu harga yang disepakati. Melalui perangkat yang kompleks dari suatu pertukaran, aktifitas ekonomi dari orang-orang yang berjarak dan yang tidak menyadari keberadaan satu sama lain dapat diatur. Harga berfungsi sebagai kunci dalam mekanisme ini. Menurut Levacic, suatu harga yang relatif tinggi terhadap biaya produksi dari suatu barang berarti merupakan suatu keuntungan yang besar. Namun, jatuhnya permintaan dari konsumen ditandai oleh jatuhnya harga secara relatif terhadap biaya produksi dan membuat kerugian bagi produser. Ini pada gilirannya akan membuat industri tutup dan orang kehilangan pekerjaan. Jadi, harga dipandang sebagai penyeimbang antara penawaran dan permintaan (*self-adjusting mechanism of the market*). Ketika permintaan naik harga cenderung meningkat. Ketika harga naik maka terjadi peningkatan keuntungan yang gilirannya memberi insentif buat memproduksi lebih banyak.

Jadi, kota dicirikan dengan keberadaan ekonomi pasar. Sedangkan ketiadaan atau tidak berkembangnya pasar merupakan ciri dari desa. Kita akan diskusikan lebih lanjut tentang hal ini pada bab 2 dan bab 3.

C. PENGERTIAN SOSIOLOGI PERDESAAN

Sosiologi perdesaan didefinisikan sebagai pendekatan sosiologis yang diterapkan pada fenomena perdesaan. Pendekatan sosiologis terdiri dari konsep-konsep, variabel-variabel, teori-teori, dan metode yang digunakan dalam sosiologi untuk memahami kenyataan sosial, termasuk di dalamnya kompleksitas aktifitas yang berkaitan dengan perdesaan.

Konsep merupakan pengertian yang menunjuk pada sesuatu. Apa yang membedakan antara orang kebanyakan dan sosiolog (ahli sosiologi) ketika berdiskusi tentang masyarakat ? Perbedaannya adalah terletak pada konsep yang digunakan. Orang kebanyakan menggunakan konsep sosial sedangkan sosiolog memakai konsep sosiologis. Apa beda antara keduanya ? Konsep sosial adalah konsep keseharian yang digunakan untuk menunjuk sesuatu dan yang dipahami secara umum dalam suatu masyarakat. Sedangkan konsep sosiologis merupakan konsep yang digunakan sosiologi untuk menunjuk sesuatu dalam konteks akademik. Dalam dunia keseharian, orang kebanyakan mendiskusikan banyak hal tentang masyarakat di berbagai tempat misalnya di kedai kopi, warung, tempat kerja ataupun di rumah. Dalam dunia keseharian, orang kebanyakan, misalnya, menggunakan konsep sosialisasi menunjuk pada pengertian sesuatu yang baru yang perlu diperkenalkan pada sekelompok orang yang belum tahu. Ketika ada suatu program baru tentang pengentasan kemiskinan yang sedang diperkenalkan, maka orang kebanyakan mengatakan peristiwa tersebut sebagai sosialisasi program pengentasan kemiskinan. Sedangkan dalam dunia akademik, konsep sosialisasi, menunjuk pada suatu proses mempelajari nilai, norma, peran dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan partisipasi yang efektif dalam masyarakat. Nah ternyata jauh sekali perbedaan pengertian sosialisasi antara orang kebanyakan dan sosiolog.

Mari kita ambil contoh perbedaan yang lain. Orang kebanyakan menemukan perbedaan posisi, peran dan perlakuan antar individu dan antar kelompok dalam suatu

komunitas. Dalam masyarakat tradisional Minangkabau, misalnya, mengenal konsep tingkatan untuk membedakan posisi, peran dan perlakuan terhadap seseorang. Dalam satu marga (*fam / clan*), masyarakat Minang mengenal konsep tingkatan kemenakan, yaitu tingkatan posisi, status dan perlakuan terhadap orang yang diayomi, diasuh atau dikuasai. Terdapat 3 tingkatan kemenakan dalam masyarakat Minangkabau, yaitu kemenakan di bawah dagu, kemenakan di bawah pusat dan kemenakan di bawah lutut. Kemenakan di bawah dagu merupakan kemenakan yang memiliki hubungan darah dengan pengayom. Kemenakan di bawah pusat menunjuk kemenakan yang datang dari daerah lain, biasanya satu marga dengan pengayom. Sedangkan kemenakan di bawah lutut adalah kemenakan yang berasal dari budak. Semakin tinggi posisi kemenakan, semakin baik perlakuan pengayom. Konsep tingkatan dalam masyarakat Minangkabau, oleh sosiolog dikenal dengan konsep stratifikasi sosial, yaitu penggolongan individu secara vertikal berdasarkan status yang dimilikinya.

Dari dua contoh tentang konsep di atas, ternyata terdapat hal yang berbeda. Pertama, konsep yang sama, dalam hal ini konsep sosialisasi, memiliki pengertian atau definisi yang berbeda antara orang kebanyakan dan sosiolog. Kedua, kenyataan atau peristiwa yang sama, dalam hal ini perbedaan kemenakan, digunakan konsep yang berbeda, yaitu tingkatan bagi orang Minangkabau dan stratifikasi sosial bagi sosiolog.

Variabel adalah konsep akademik, termasuk sebagai konsep sosiologis, bukan konsep sosial. Variabel merupakan konsep yang memiliki variasi nilai. Stratifikasi sosial, misalnya, dapat disebut sebagai variabel, karena stratifikasi sosial memiliki variasi nilai yaitu tinggi, menengah, dan bawah.

Teori merupakan abstraksi dari kenyataan yang menyatakan hubungan sistematis antara fenomena sosial. Ketika seseorang sosiolog mengamati terdapat perbedaan antara petani, pedagang, dan guru dalam mensosialisasikan anak-anak mereka. Melalui pengamatan dan wawancara dengan berbagai macam orang tua ternyata dia menemukan posisi dan status orang tua mempengaruhi anak-anak mereka dalam bersosialisasi. Maka sang sosiolog bisa mengabstraksikan kenyataan tersebut dengan kalimat sebagai berikut: “stratifikasi sosial orang tua akan mempengaruhi sosialisasi anak-anak mereka”. Kalimat tersebut bisa dipandang sebagai teori.

Teori dalam sosiologi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat sekali. Perkembangan teori dilihat dari teori yang dibangun oleh peneruka utama sosiologi seperti Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber dan lainnya. Dari basis pandangan tokoh tersebut berkembang berbagai teori sosiologi modern seperti teori struktural fungsional, teori struktural konflik, teori interaksionisme simbolik, teori fenomenologi, teori etnometodologi, teori dramaturgi, teori konstruksi sosial dan teori pertukaran. Selanjutnya berkembang pula teori feminisme, teori post modern dan teori kritis. Dalam bab selanjutnya, teori sosiologi akan kita bahas lagi dengan mengaitkannya pada kenyataan dan fenomena perdesaan.

Sedangkan metode sosiologi bertujuan sebagai alat untuk melakukan penelitian. Metode penelitian sosiologi berkembang dalam bentuk pendekatan penelitian kualitatif dan pendekatan penelitian kuantitatif yang meliputi metode survey, studi kasus, studi eksperimen, analisis sekunder, studi dokumen, analisis isi, *grounded reasearch*, dan sebagainya.

Berikut sajian suatu model penelitian, secara umum mengikuti langkah yang relatif sama dengan penambahan dan pengurangan tahapan:

Satu: memilih suatu topik

Dua : mendefinisikan masalah

Tiga: meninjau bahan pustaka

Empat: merumuskan suatu hipotesis

Lima: merumuskan definisi operasional atau definisi konsep

Enam: memilih suatu metode penelitian

Tujuh: mengumpulkan data

Delapan: analisis hasil

Sembilan: menulis dan menyebarkan hasil penelitian

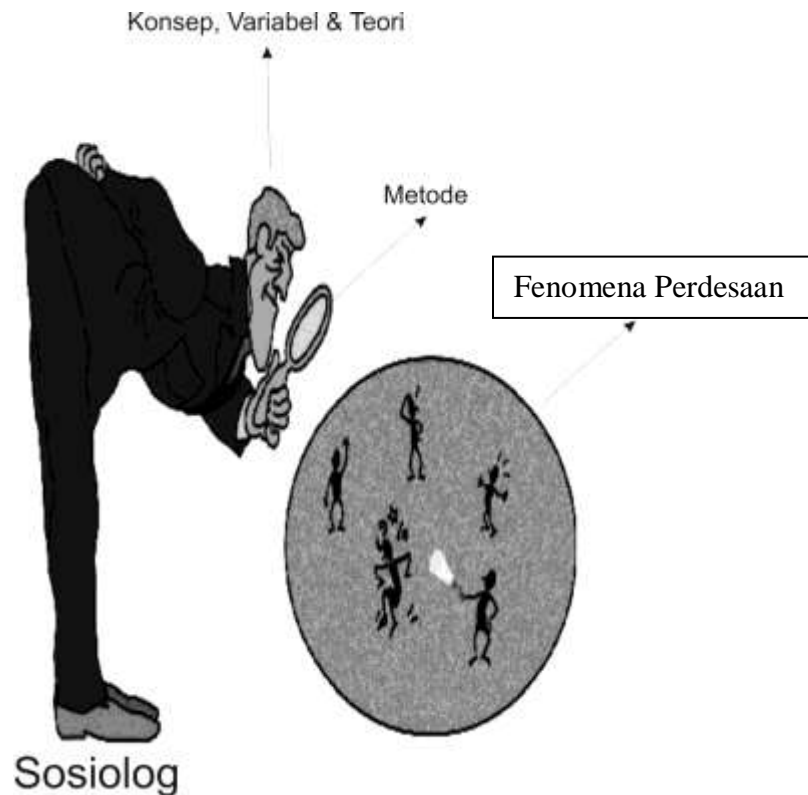
Selanjutnya kita mencoba untuk memahami apa saja fenomena-fenomena yang termasuk dalam fenomena perdesaan. Berikut ini disajikan di dalam tabel di bawah ini fenomena perdesaan. Fenomena tersebut dapat ditambah sesuai dengan perkembangan realitas perdesaan lintas negara, bahkan lintas benua yang ada.

Tabel 1.1. Fenomena Perdesaan

Struktur Sosial Perdesaan (organisasi, kesatuan ekologis, kelompok, stratifikasi sosial, interaksi sosial, nilai dan sistem nilai)
Lembaga Perdesaan (lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga politik dan lembaga pendidikan)
Kapital (sosial, budaya, simbolik, dan spritual)
Mobilitas Sosial
Perubahan Sosial (pembangunan, pemberdayaan, transformasi)
Pemerintahan Desa
Kearifan Lokal (pengetahuan dan teknologi lokal)
Dan sebagainya

Dari tabel di atas terlihat bahwa fenomena perdesaan sangat banyak dan beragam. Fenomena tersebut di atas berada tidak hanya pada tataran mikro seperti interaksi sosial tetapi juga ada pada tataran makro seperti politik perdesaan. Selain itu tidak hanya menyangkut sebagai realitas subjektif seperti sosialisasi, tetapi juga realitas objektif seperti sistem nilai. Fenomena perdesaan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan masyarakat perdesaan. Oleh karena itu, perkembangan sosiologi perdesaan selalu terbuka dan dinamis seiring dengan perkembangan masyarakat dan kehidupan yang melingkupinya.

Untuk memahami secara visual tentang definisi dari sosiologi perdesaan, disajikan gambar 1.1. berikut.



Gambar 1.1. Cara Pandang Sosiolog terhadap Fenomena Perdesaan

Gambar di atas memperlihatkan bagaimana sosiolog melihat fenomena perdesaan. Sosiolog memiliki konsep, variabel dan teori sosiologi dalam kerangka pikir. Sedangkan metode merupakan alat untuk mendapatkan atau memperoleh data. Melalui teori dan metode yang dimiliki, sosiolog mengkaji fenomena perdesaan yang berkembang dalam proses interaksi sosial dan masyarakat.

D. PERDESAAN SEBAGAI KAJIAN INTERDISIPLIN DAN INTRADISIPLIN

Untuk memahami topik ini, ada baiknya kita samakan terlebih dahulu pemahaman kita tentang konsep interdisiplin dan intradisiplin. Konsep disiplin dalam pembicaraan kita adalah ilmu pengetahuan (*science*) misalnya ilmu ekonomi, manajemen, sosiologi, antropologi, psikologi, dan lainnya. Dengan demikian, kajian interdisiplin dimaksudkan di sini adalah kajian lintas ilmu yang berbeda atau antar ilmu yang berbeda. Sedangkan

kajian intradisiplin adalah kajian di dalam ilmu itu sendiri yang memiliki berbagai macam cabang ilmu. Sosiologi berkembang dengan berbagai cabang, misalnya sosiologi industri, sosiologi hukum, sosiologi ekonomi, sosiologi keluarga, sosiologi pendidikan, sosiologi politik, sosiologi perkotaan, sosiologi perdesaan, sosiologi perilaku menyimpang, dan sebagainya. Perkembangan berbagai cabang sosiologi yang ada tersebut berkembang seiring dengan perkembangan fokus perhatian tertentu dalam mendiskusikan atau menjelaskan suatu kenyataan atau fenomena sosial. Sederhananya divisualisasi melalui gambar 1.2.



Gambar 1.2. Percabangan Sosiologi

Perdesaan merupakan salah satu wilayah yang memiliki karakteristik tertentu di dalamnya ada interaksi sosial dan masyarakat. Perdesaan, oleh karena itu, merupakan kajian dari berbagai disiplin ilmu antara lain sosiologi, ilmu ekonomi, antropologi, planologi, sejarah, dan politik. Dengan kenyataan ini maka di antara berbagai sudut pandang ilmu terdapat bahagian yang tumpang-tindih satu sama lain dalam melihat perdesaan. Itu berarti ada bahagian yang sama-sama diperhatikan baik sosiologi maupun ilmu sosial lainnya ketika mengkaji fenomena perdesaan. Seperti yang diperlihatkan oleh Gambar 1.3. di bawah, daerah irisan merupakan pokok bahasan yang menjadi kajian bersama antara berbagai bidang ilmu yang ada.



**Gambar 1.3. Tumpang Tindih Fokus Perhatian
Antara Berbagai Ilmu dalam Kajian Perdesaan**

E. SOSIOLOGI PERDESAAN SEBAGAI ILMU MURNI DAN ILMU TERAPAN

Sebelum membahas topik ini, terlebih dahulu, ada baiknya kita mendiskusikan apa yang dimaksud dengan ilmu murni dan ilmu terapan. Setelah itu kita akan membahas apakah sosiologi perdesaan dipandang sebagai ilmu murni, ilmu terapan atau masuk kedua bentuk ilmu tersebut.

1. Sosiologi Sebagai Ilmu Murni Versus Ilmu Terapan

Perdebatan para sosiolog tentang kedudukan sosiologi, yaitu apakah sosiologi merupakan ilmu murni atau sebagai ilmu terapan, telah lama berlangsung. Pada tahap awal perkembangan sosiologi, Auguste Comte, sebagai bapak Sosiologi, telah menggiring sosiologi ke arah reformasi sosial, yaitu suatu usaha membangun kembali masyarakat sebagaimana yang diharapkan. Apa yang dilakukan oleh Comte juga dilaksanakan oleh Karl Marx. Marx mengembangkan gagasan masyarakat ideal tanpa kelas, melalui suatu revolusi. Pemikiran Comte dan ajakan Marx tersebut tidak diteruskan oleh para peneroka sosiologi lainnya seperti Emile Durkheim dan Max Weber. Kedua

tokoh yang disebut belakangan ini mengembangkan bermacam pemikiran sosiologi yang mengarah pada pengembangan ilmu murni. Pemikiran seperti ini begitu berkembang dalam sosiologi, sehingga Robert Bierssedt dalam *The Social Order: An Introduction to Sociology*, menulis bahwa sosiologi bersama ilmu hukum, geologi, sejarah, ilmu politik, ilmu ekonomi dikelompokkan ke dalam ilmu murni. Sedangkan politik, manajemen, dan akuntansi dimasukkan ke dalam kelompok ilmu terapan.

Perdebatan para sosiolog tersebut secara gamblang ditulis oleh Henslin (2007: 11) sebagai berikut:

Kontradiksi nyata antara dua tujuan ini –menganalisis masyarakat versus upaya mereformasinya- menciptakan suatu ketegangan dalam sosiologi yang sampai sekarang masih hadir di antara kita. Beberapa sosiolog percaya bahwa peran mereka yang pantas ialah untuk menganalisis segi masyarakat dan untuk menerbitkan temuan mereka dalam jurnal sosiologi. Sosiolog lain bertanggungjawab untuk memanfaatkan keahlian mereka untuk berupaya menjadikan masyarakat sebagai suatu tempat yang lebih baik untuk hidup dan membawa keadilan bagi orang miskin.

Perbedaan antara penganut sosiologi murni dan sosiologi terapan ditandai oleh khalayak yang dijadikan sasaran dan produk yang dihasilkan. Menurut Henslin (2007: 11) bahwa sosiologi murni ditujukan pada sesama sosiolog sebagai khalayak sasarannya, sedangkan sosiologi terapan diarahkan pada klien yang terdiri dari berbagai macam jenisnya mulai dari perorangan sampai kelompok (perusahaan, komunitas, dan pemerintah). Selanjutnya, produk yang dihasilkan oleh sosiologi murni berupa pengetahuan, sedangkan produk dari sosiologi terapan berupa perubahan.

Berikut untuk memahami perbedaan antara sosiologi murni dan sosiologi terapan secara ringkas dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2. Perbandingan antara Sosiologi Murni dan Sosiologi Terapan

	Sosiologi Murni	Sosiologi Terapan
Khalayak	Sesama sosiolog	Klien
Produk	Pengetahuan	Perubahan

Sumber: Henslin (2007) yang dimodifikasi

Jadi, kata Henslin bahwa sosiologi terapan tidak sama dengan reformasi sosial. Tetapi ia lebih merupakan penerapan sosiologi pada suatu situasi yang khas, bukan suatu upaya untuk membangun kembali masyarakat. Apa yang dikemukakan oleh Henslin tersebut juga ditegaskan oleh Schaefer bahwa sosiologi terapan merupakan penggunaan disiplin sosiologi yang bertujuan secara spesifik untuk menghasilkan aplikasi praktis bagiperilaku manusia dan organisasi. Sosiologi terapan pada tahapan berikutnya dikembangkan oleh Louis Wirth menjadi sosiologi klinis. Jika sosiologi terapan mengevaluasi isu sosial, lanjut Schaefer, sosiologi klinis ditujukan untuk memfasilitasi perubahan dengan mengubah hubungan sosial (seperti dalam terapi keluarga) atau merestrukturasi institusi sosial, seperti mereorganisasi pusat kesehatan (2012: 20-21). Perkembangan sosiologi klinis telah memasuki tahapan di mana para anggotanya disertifikasi sebagai ahli sosiologi klinis dalam melakukan intervensi sosiologis terhadap individu dan perubahan sosial.

Untuk membedakan antara sosiologi murni dan sosiologi terapan, Henslin membuat suatu tipologi dikhotomis yang terdiri dari dua kutub bersebarangan, yaitu sosiologi murni di satu kutub dan sosiologi terapan di kutub lain. Tipologi dikhotomis tersebut terdapat berbagai kegiatan sosiolog yang terbentang antara ke dua kutub tersebut, yaitu konstruksi teori di kutub sosiologi terapan dan sosiologi klinis pada kutub sosiologi terapan. Di antara kegiatan tersebut terdapat berbagai kegiatan lainnya yang dilakukan oleh para sosiolog antara lain: penelitian terhadap dasar kehidupan, bagaimana kelompok mempengaruhi manusia, jalan tengah kritik terhadap masyarakat dan kebijakan sosial, analisis masalah khusus, evaluasi keefektifan kebijakan dan program, menawarkan penyelesaian masalah, serta mengusulkan cara untuk memperbaiki kebijakan dan program.

Untuk memudahkan pemahaman, berikut disajikan gambar 1.4. yang menjelaskan pelbagai kegiatan sosiolog yang dapat dikategorikan ke dalam titik pada garis kontinum dari dua kutub yang bersebarangan, yaitu sosiologi murni dan sosiologi terapan.

X Sosiologi Murni

Sosiologi Terapan X



Sumber: Henslin (2007) yang dimodifikasi

Catatan:

- 1 = konstruksi teori, menguji hipotesis
- 2 = penelitian terhadap dasar kehidupan, bagaimana kelompok mempengaruhi manusia
- 3 = jalan tengah kritik terhadap masyarakat dan kebijakan sosial
- 4 = analisis masalah khusus, evaluasi keefektifan kebijakan dan program
- 5 = menawarkan penyelesaian masalah, mengusulkan cara untuk memperbaiki kebijakan dan program
- 6 = menerapkan penyelesaian masalah (sosiologi klinis)

**Gambar 1.4. Tipologi Beragam Kegiatan Sosiolog dalam Dikhotomi
Sosiologi Murni-Sosiologi Terapan**

Bagaimana para sosiolog memahami kenyataan adanya perbedaan antara sosiologi murni dan sosiologi terapan? Untuk menemukan pemahaman tersebut, mari kita telusuri bagaimana kata para sosiolog yang menulis buku “pengantar sosiologi”. Bagaimana menemukan pemahaman tersebut? Kita bisa merekam pemikiran mereka melalui apa yang mereka tulis tentang pekerjaan apa saja yang bisa atau dapat digeluti oleh sarjana sosiologi. Horton dan Hunt dalam bukunya “Sosiologi” (1987) mengemukakan bahwa peran yang dapat dimainkan oleh para sosiolog atau profesi yang dapat dipilih oleh ahli sosiologi, yaitu sebagai ahli riset, konsultan kebijakan, teknisi, guru/pendidik, dan kegiatan sosial.

Dengan cara berbeda, namun esensi dari pemikiran yang sama dengan Horton dan Hunt, Henslin (2007) dalam bukunya “Sosiologi dengan Pendekatan Membumi” mengemukakan beberapa pekerjaan yang dilakoni oleh para ahli sosiologi yaitu antara lain sebagai pengajar, konselor di berbagai bidang (seperti anak-anak atau penularan penyakit), peneliti (pemasaran atau kesehatan masyarakat), konsultan, pekerja sosial, dan seterusnya.

Dari penjelasan tentang berbagai bidang pekerjaan yang bisa atau dapat dimasuki oleh para ahli sosiologi tersebut maka dapat dinyatakan bahwa para sosiolog tidak begitu

mempermasalahkan apakah sosiologi sebagai ilmu murni, ilmu terapan atau keduanya. Kenapa demikian? Seorang sosiolog yang bekerja sebagai dosen pada suatu perguruan tinggi, dalam kenyataannya, juga melakukan penelitian, diminta pandangannya untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam masyarakat, atau diminta pemikirannya oleh media massa tentang jalan keluar dari berbagai persoalan yang sedang dihadapi oleh negara atau pemerintah. Kenyataan ini menunjukkan kepada kita bahwa sosiolog bisa saja memasuki kedua ranah sosiologi tersebut, yaitu sebagai ilmu murni dan ilmu terapan. Hal tersebut tergantung pada kapasitas, keahlian dan kompetensi dari seorang sosiolog di bidang sosiologi.

2. Sosiologi Perdesaan: Ilmu Murni atau Ilmu Terapan?

Berdasarkan pengalaman mengajar di berbagai perguruan tinggi, pada saat mengajar mahasiswa pasca sarjana yang berasal dari latarbelakang birokrat, guru, wartawan, dan praktisi lainnya, mereka memiliki kecenderungan mengajukan pertanyaan atau analisa tentang sesuatu yang berhubungan dengan kegunaan sosiologi bagi masyarakat, negara atau bisnis. Ketika mendiskusikan sosialisasi, misalnya, mereka menanyakan tidak hanya tentang bagaimana memahami sosialisasi terjadi dalam masyarakat, tetapi juga bagaimana sosialisasi seharusnya dilakukan agar generasi yang diharapkan bisa terbentuk melalui rekayasa sosial.

Hal tersebut di atas bisa dipahami karena mereka para praktisi biasanya memiliki kecenderungan untuk berpikir bagaimana membantu masyarakat memecahkan masalah yang sedang dihadapi di satu sisi, serta pekerjaan sebagai praktisi (dalam berbagai bidang) menuntunnya untuk memahami tidak hanya sesuatu yang bersifat apa adanya (*das Sein*) tetapi juga sesuatu yang seharusnya ada (*das Sollen*), di sisi lain. Dari sisi *das Sollen*, seorang mahasiswa tergerak ide dan pemikirannya untuk menemukan jalan atau solusi sehingga apa yang menjadi *das Sollen* tersebut tercapai.

Dari kenyataan tersebut di atas, bagaimana posisi sosiologi perdesaan dalam kaitannya dengan percabangan sosiologi antara sebagai ilmu murni dan ilmu terapan? Dalam buku ini, posisi kita adalah membuka peluang bagi semua pilihan yang ada, yaitu sosiologi perdesaan sebagai ilmu murni dan/atau ilmu terapan. Dengan kata lain,

sosiologi perdesaan dilihat sebagai ilmu murni karena dalam materinya memberikan kontribusi bagi kompetensi, keahlian, dan kemampuan dalam memahami fenomena perdesaan berdasarkan teori sosiologi perdesaan. Kemampuan teoritis tersebut membuat mahasiswa mampu melakukan penelitian tentang fenomena perdesaan serta mengeritik fenomena dan kebijakannya. Kemampuan seperti itu menunjukkan pada bidang kegiatan sosiologi perdesaan sebagai ilmu murni.

Kemampuan teoritis yang dimiliki juga memberikan kemampuan bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan atau kompetensi dalam evaluasi keefektifan kebijakan dan program, menawarkan penyelesaian masalah, serta mengusulkan cara untuk memperbaiki kebijakan dan program yang berkaitan dengan pemberdayaan komunitas atau masyarakat perdesaan. Oleh sebab itu, sosiologi perdesaan juga bisa diarahkan sebagai ilmu terapan. Demikian pula tidak tertutup kemungkinan, mahasiswa mampu menjadikan sosiologi perdesaan sebagai ilmu murni dan ilmu terapan sekali gus.

BAB 2

PERKEMBANGAN SOSIOLOGI PERDESAAN

A. PELETAK FONDASI SOSIOLOGI PERDESAAN

Penelusuran sejarah asal usul atau perkembangan suatu bidang kajian ilmu atau cabangnya, biasanya akan terjebak pada pengambilan keputusan untuk menentukan siapa yang pertama kali membahas hal tersebut dan pada akhirnya cenderung menonjolkan individu tertentu sebagai “bapak pendiri” dari suatu bentuk ilmu pengetahuan. Hal ini, menurut Rush dan Althoff (2003: 5), merupakan proses yang sangat berbahaya. Oleh sebab itu, untuk menghindari penonjolan tokoh tertentu, sementara yang lain tersembunyikan, maka dipandang elok untuk mendiskusikan beberapa tokoh yang berjasa dalam meletakkan fondasi sosiologi pedesaan, sehingga mereka menjadi rujukan oleh penerus atau sebaliknya sebagai sanggahan oleh pembaharu dalam pemikiran sosiologi pedesaan pada masa berikutnya.

Berikut beberapa tokoh yang dipandang berjasa dalam meletakkan fondasi sosiologi pedesaan:

1. Sumbangan Karl Marx (1818-1883)



Marx lahir dari keluarga Yahudi di Trier, Jerman, pada tahun 1818. Ibunya berasal dari keluarga Rabbi Yahudi, sedangkan ayahnya berpendidikan sekuler dan pengacara yang sukses. Ketika suasana politik tidak menguntungkan bagi pengacara yahudi, ayah dan keluarganya pindah menjadi pemeluk agama Protestan. Tahun 1841 Marx meraih gelar doktor filsafat dari Universitas Berlin, universitas yang dipengaruhi oleh pemikiran Hegel dan pengikutnya yang kritis. Ia menikah pada 1843 dan hijrah ke Paris. Di sana ia berkenalan dengan St. Simon dan Proudhon, tokoh pemikir sosialis, dengan Engels, mitra menulis sekaligus sahabat penopang ekonomi, serta dengan berbagai pemikiran ekonomi politik

Inggris seperti Adam Smith dan David Ricardo. Aktif dalam berbagai gerakan buruh dan komunis. Karl Marx memberikan beberapa sumbangan metodologis dan teoritis terhadap pengembangan sosiologi perdesaan. Apa sumbangan Marx tersebut?

Sumbangan metodologis Marx yang terpenting adalah pendekatan materialisme historis. Istilah materialisme historis tidak pernah digunakan oleh Marx sebagai pendekatan yang digunakannya untuk menjelaskan realitas. Ada 4 konsep sentral penting dalam memahami pendekatan materialisme historis (Morisson, 1995). Pertama, *Means of Production* (cara produksi) yaitu sesuatu yang digunakan untuk memproduksi kebutuhan material dan untuk mempertahankan keberadaan. Kedua, *Relations of Production* (hubungan produksi), yaitu hubungan antara cara suatu masyarakat memproduksi dan peranan sosial yang terbagi kepada individu-individu dalam produksi. Misalnya, pemilik dan bukan pemilik alat-alat produksi. Ketiga, *Mode of Production* (mode produksi), yaitu elemen dasar dari suatu tahapan sejarah dengan memperlihatkan bagaimana basis ekonomi membentuk hubungan sosial, yaitu cara mengorganisir produksi. Marx mengidentifikasi terdapat 5 mode produksi yang terdapat sepanjang sejarah, secara berurutan: komunisme primitif, masa kuno, feodal, kapitalis, dan komunis. Keempat, *Force of Production* (kekuatan produksi), yaitu kapasitas dalam benda-benda dan orang yang digunakan bagi tujuan produksi. Misalnya pada masa feodal, kekuatan produksi bersumber pada tanah, alat-alat pertanian dan teknik penggarapan. Atau masa kapitalis, kekuatan produksi berasal dari teknik industri, ilmu, modal, dan teknologi mesin.

Perubahan sosial dan budaya, termasuk juga perubahan dalam dimensi pendidikan, bersumber pada perubahan yang terjadi pada cara produksi. Perubahan cara produksi meliputi perkembangan teknologi baru, penemuan sumber-sumber baru, atau perkembangan baru lain apapun dalam bidang kegiatan produktif (Johnson, 1986: 132). Karena cara produksi berubah maka muncul kontradiksi antara cara produksi dan hubungan produksi. Ketika kontradiksi telah merusak parah keseimbangan, maka ia akan berdampak pada perubahan terhadap hubungan produksi seperti perubahan pada pembagian kerja, dasar dan bentuk struktur kelas. Pada gilirannya bisa merubah mode produksi.

Sumbangan berikutnya adalah teori alienasi. Apa yang membedakan manusia dengan makhluk lain ? Kata Marx, kerja ! Hanya manusialah, makhluk yang mampu melakukan kerja. Melalui kerja, oleh sebab itu, manusia sebagai produsen. Dengan demikian, produk dari kegiatan produktif (kerja) manusia merupakan hakekat manusia, yang menjadi pembeda dengan makhluk lain seperti binatang. Kalau manusia itu produsen, bagaimana mungkin manusia kehilangan kekuasaan atas produknya sendiri ? atau lebih tegas lagi, bagaimana mungkin produk itu mendapat kekuasaan atas produsennya ? Inilah masalah alienasi (keterasingan) (Layendecker, 1983: 248).

Kapitalisme telah menyebabkan manusia mengalami alienasi karena hasil kreatifitas produsen menjadi terasing/diasingkan dari produsen itu sendiri. Alienasi ini bisa mengambil bentuk (1) produk diluar kontrol dari produsen seperti jenis, kualitas, kuantitas, harga dan pemasaran produk. (2) produsen harus menyesuaikan diri dengannya seperti mengikuti kapasitas produksi mesin. Oleh karena itu, menurut McLellan (1973: 111), manusia mengalami alienasi dalam 3 arti. Pertama, manusia teralienasi dari produk kerjanya sendiri dalam arti bahwa ia hanya sekedar embel-embel dari proses produksi, sebagai pelayan mesin atau orang yang memindahkan-mindahkan kertas di kantor. Kedua, manusia juga teralienasi dari dirinya sendiri dalam arti bahwa ia kerja karena terpaksa, dan sebagai akibatnya manusia diubah menjadi hewan, “karena ia hanya merasa senang apabila melakukan fungsi-fungsi hewani, yakni makan, minum dan memiliki anak-anak”. Terakhir, manusia teralienasi dari sesamanya. Hubungan yang ada di tempat kerja mempengaruhi hubungan dalam kehidupan di luar kerja.

Marx juga memberikan sumbangan teori perubahan sosial. Pada *The communist Manifesto*, Marx menyatakan “sejarah dari semua masyarakat hingga saat ini adalah sejarah perjuangan kelas”. Perjuangan kelas berakar dari adanya pembagian kerja dan pemilikan pribadi. Keberadaan pembagian kerja dan pemilikan pribadi menghasilkan kontradiksi yang dalam dan luas pada masyarakat, yaitu antara kelompok yang memiliki (pemilik) dan kelompok yang tidak memiliki serta menciptakan stratifikasi sosial dalam masyarakat yaitu kelas pemilik dan kelas bukan pemilik.

Pada masa feodal, kontradiksi terjadi antara tuan tanah sebagai pemilik tanah pertanian dan hamba sahaya sebagai orang yang tidak memiliki alat produksi, yang

bekerja bagi tuan tanah. Kontradiksi dialektis antara tuan tanah dan hamba sahaya menghasilkan sintesa masyarakat kapitalis melalui perubahan cara produksi dan kekuatan produksi meliputi perkembangan teknologi baru seperti ditemukan mesin uap, pemintal dan industri lainnya serta perubahan hubungan produksi seperti migrasi penduduk desa-pertanian ke daerah industri-perkotaan.

Pada masyarakat kapitalis, juga ditemukan kontradiksi yang bersumber pada kepemilikan dan pembagian kerja, yaitu antara kelas borjuis, sebagai pemilik alat produksi seperti mesin, gedung dan modal lainnya, dan kelas proletar, sebagai kelompok yang bekerja bagi kepentingan kapitalis. Perbedaan kelas yang ada bisa tidak disadari, khususnya oleh kelas proletar. Kelas proletar tidak memiliki kesadaran kelas, yaitu satu kesadaran subyektif akan kepentingan kelas obyektif yang mereka miliki bersama orang-orang lain dalam posisi yang serupa dalam sistem produksi. Konsep “kepentingan” mengacu pada sumber-sumber material yang aktual yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan individu (Johnson, 1986 : 150-151). Keadaan ini disebabkan oleh superstruktur sosial-budaya seperti ideologi, agama, dan aturan-perundangan dibangun di atas infrastruktur ekonomi, yang notabene dikuasai oleh kelas borjuis. Superstruktur budaya seperti itu menciptakan “kesadaran palsu”.

Bagaimana munculnya kesadaran kelas dan perjuangan kelas ? Kata Marx, terpusatnya kelas proletar dalam suatu daerah perkotaan tertentu akan terbentuknya jaringan komunikasi. Sekali jaringan komunikasi itu dibentuk dan kepentingan bersama menjadi jelas maka dibentuklah organisasi kelas proletar melawan musuh bersama (Johnson, 1986 : 152). Ketika organisasi telah dikembangkan maka perlu ideologi yang mengikatnya. Krisis ekonomi masyarakat kapitalis bisa dijadikan momen untuk melakukan revolusi.

Sumbangan berikutnya dari Marx adalah pandangannya tentang agama. Pandangan Marx yang amat mengejutkan umat beragama adalah, “agama sebagai candu masyarakat”. Pernyataan tersebut dapat dipahami karena Marx melihat bahwa superstruktur sosio-budaya, -- termasuk di dalamnya ideologi, politik dan agama --, dibangun di atas infrastruktur ekonomi. Semua institusi sosial, termasuk agama, didirikan atas dasar infrastruktur ekonomi (yaitu, alat-alat produksi dan hubungan sosial dalam

produksi) dan menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan dan persyaratan-persyaratan yang dimiliki oleh infrastruktur ekonomi tersebut. Pengalaman ayahnya yang berpindah agama dari Yahudi menjadi Protestan adalah contoh faktual dan aktual dari pengalamannya berkaitan dengan agama dan ekonomi.

Oleh karena infrastruktur dikuasai oleh orang/kelompok yang memiliki maka agama melayani kepentingan para pemilik melalui berbagai ide, ritual dan praktek keagamaan. Dalam situasi seperti ini, berbagai ide, ritual dan praktek keagamaan menciptakan kesadaran palsu bagi para kaum yang tidak memiliki. Ketidaksadaran terhadap kepentingan kelas objektif para kaum yang tidak memiliki karena berbagai ide, ritual dan praktek keagamaan itulah yang menyebabkan Marx melihat agama sebagai candu, yang menciptakan masyarakat tidak sadar akan kepentingan objektif mereka.

2. Sumbangan Emile Durkheim (1858-1917)

Durkheim, seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, memberikan sumbangan dalam metode sosiologi dalam memahami fenomena perdesaan melalui bukunya *the Rules of Sociological Methods*. Selain itu, dia juga merupakan peletak dasar teori struktural fungsional, sebagai alat untuk memahami realitas perdesaan. Sumbangan berikutnya adalah tesis solidaritas sosial. Dalam bukunya *the division of labor in Society*, Durkheim menjelaskan tentang dua tipe solidaritas sosial dalam masyarakat, yaitu masyarakat yang berlandaskan solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Pokok permasalahan dari gagasan atau ide buku tersebut adalah pertanyaan tentang apa yang mengikat dan mempersatukan orang ? Apa yang mempersatukan orang, misalnya, antara di dalam majlis taklim dan dalam perusahaan bisnis? Jawabannya dalam majelis taklim orang disatukan karena adanya kesamaan kepercayaan, cita-cita dan komitmen moral; sedangkan dalam perusahaan, orang disatukan karena adanya diferensiasi dan spesialisasi, ada ikatan seperti majelis taklim tapi tidak tegas. Untuk tujuan penguatan pemahaman, perbandingan antara solidaritas mekanik dan solidaritas organik dapat dianalogkan perbandingan antara kapur tulis dan tubuh manusia. Perbandingan antara masyarakat yang berlandaskan solidaritas mekanik dan solidaritas organik dapat dilihat pada tabel berikut. Sedangkan pembahasan yang mendalam akan didiskusikan pada bab selanjutnya.

Tabel 2.1. Perbandingan Karakteristik antara Solidaritas Mekanik dan Solidaritas Organik

	Solidaritas Mekanik	Solidaritas Organik
Pembagian Kerja	Rendah	Tinggi
Kesadaran Kolektif	Kuat	Lemah
Hukum Dominan	Represif	Restitutif
Individualitas	Rendah	Tinggi
Konsensus Terpenting	Pola Normatif	Nilai Abstrak & Umum
Penghukuman	Komunitas terlibat	Badan kontrol sosial
Saling Ketergantungan	Rendah	Tinggi
Komunitas	Primitif / Perdesaan	Industri Perkotaan
Pengikat	Kesadaran kolektif	Pembagian kerja

Sumber: Johnson (1986: 188)

Sumbangan berikutnya adalah teori perubahan sosial. Masih dalam bukunya *the division of labor in Society*, Durkheim menerangkan bahwa perubahan dari solidaritas mekanik menjadi solidaritas organik dimulai dengan adanya penambahan penduduk disertai oleh kepadatan moral, yaitu penambahan penduduk disertai penambahan komunikasi dan interaksi antara para anggota. Konsekuensinya perjuangan hidup menjadi tajam. Melalui pembagian kerja, setiap orang mengalami spesialisasi bidang keahlian dan pekerjaan sehingga konflik tidak muncul dan masyarakat dapat dipertahankan melaluinya.

Durkheim memberikan sumbangan teori tentang moralitas. Teori ini merupakan pengembangan lanjut dari penerapan metodologi Durkheim tentang fakta sosial. Moralitas dapat dipandang sebagai fakta sosial, karena ia memiliki karakteristik eksternal, umum, dan memaksa. Moralitas merupakan realitas yang berada di luar individu. Moralitas hadir dalam kesadaran individu karena dipelajari melalui proses sosialisasi. Oleh sebab itu, ia ada sebelum individu itu ada dan akan tetap ada jika individu itu telah tiada. Karena ia selalui ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui sosialisasi dalam masyarakat. Proses transmisi tersebut, atau dikenal

sebagai sosialisasi, menyebabkan moralitas tersebut hadir dalam kesadaran semua anggota masyarakat, tidak bersifat individual. Selanjutnya, moralitas memiliki sifat memaksa, di mana semua anggota masyarakat menginginkan keberadaan fakta moralitas tersebut. Jika tidak, akan ada sesuatu yang memaksa agar seseorang untuk berperilaku, bertindak dan merasa seperti yang dikehendaki oleh fakta moralitas.

Menurut Durkheim¹ (1986: 150-255), moralitas memiliki tiga unsur, yaitu semangat disiplin, ikatan pada kelompok, dan otonomi. Pada dasarnya moralitas adalah suatu disiplin. Semua disiplin bertujuan ganda: mengembangkan keteraturan tertentu dalam perilaku masyarakat, dan memberinya sasaran tertentu yang sekaligus juga membatasi cakrawalanya. Disiplin mengatur dan memaksa. Disiplin menjawab segala sesuatu yang selalu terulang dan bertahan lama dalam hubungan antar manusia. Oleh karena itu disiplin menciptakan ikatan pada kelompok. Dengan demikian, moralitas memiliki fungsi bagi bertahannya suatu masyarakat. Moralitas sebenarnya perwujudan dari tujuan impersonal dan umum, yang tidak tergantung dari pribadi dan kepentingan pribadi. Inilah bentuk otonomi dari moralitas.

3. Sumbangan Max Weber (1864-1920)

Sumbangan pemikiran Max Weber dalam sosiologi perdesaan dipandang tidak kalah pentingnya dengan Emile Durkheim dan Karl Marx. Berikut beberapa sumbangan pemikiran teoritis dan metodologis Weber pada sosiologi perdesaan. Sumbangan metodologis Weber adalah analisis tipe ideal dan metode *verstehen*, seperti yang telah didiskusikan pada bab sebelumnya.

Sumbangan teoritis Weber antara lain tesis perkembangan kapitalis. Dalam *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*, Weber menyatakan bahwa ketelitian yang khusus, perhitungan dan kerja keras dari Bisnis Barat didorong oleh perkembangan etika protestan yang muncul pada abad ke-16 dan digerakkan oleh *doktrin Calvinisme*, yaitu doktrin tentang takdir. Pemahaman tentang takdir menuntut adanya kepercayaan bahwa Tuhan telah memutuskan tentang keselamatan dan kecelakaan. Selain itu doktrin tersebut menegaskan bahwa tidak seorangpun yang dapat mengetahui apakah dia termasuk salah

¹ Beberapa bab dalam "Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas", sebuah buku yang disunting oleh Taufik Abdullah dan A.C. Van der Leeden, merupakan terjemahan langsung dari buku Emile Durkheim yang berbahasa Prancis, yaitu *L'education Morale* (1974).

seorang yang terpilih. Dalam kondisi seperti ini menurut Weber, pemeluk Calvinisme mengalami “panik terhadap keselamatan”. Cara untuk menenangkan kepanikan tersebut adalah orang harus berpikir bahwa seseorang tidak akan berhasil tanpa diberkati Tuhan. Oleh karena itu keberhasilan adalah tanda dari keterpilihan. Untuk mencapai keberhasilan, seseorang harus melakukan aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi dan politik, yang dilandasi oleh disiplin dan bersahaja, menjauhi kehidupan bersenang-senang, yang didorong oleh ajaran keagamaan. Menurut Weber etika kerja dari Calvinisme yang berkombinasi dengan semangat kapitalisme membawa masyarakat Barat kepada perkembangan masyarakat kapitalis modern. Jadi, doktrin Calvinisme tentang takdir memberikan daya dorong psikologis bagi rasionalisasi dan sebagai perangsang yang kuat dalam meningkatkan pertumbuhan sistem ekonomi kapitalis dalam tahap-tahap pembentukannya.

Hubungan antara semangat kapitalisme dan etika Protestan, oleh karena itu, memiliki kaitan konsistensi logis dan pengaruh motivasional yang bersifat mendukung secara timbal balik. Hubungan semacam itu disebut sebagai *elective affinity*. Hubungan tersebut menghantarkan kapitalisme mentransformasi diri dalam bentuk modern, yang bercirikan: tata buku / akuntansi rasional, hukum rasional, teknik rasional (mekanisasi), dan massa buruh menerima upah di pasar bebas karena mereka perlu untuk memperoleh penghasilan.

Apa kaitan tesis semangat kapitalisme dan etika Protestan dengan sosiologi perdesaan? Tesis tersebut memberikan inspirasi bagi sosiolog atau ilmuwan sosial berikutnya untuk mengembangkan suatu teori perubahan sosial dan pembangunan perdesaan melalui pengembangan suatu pelatihan dan pendidikan yang akan meningkatkan motivasi dan kemampuan yang dimiliki, seperti tesis *Need for Achievement* dari McClelland, *total quality management*, *spiritual capital*, dan lainnya.

c. Tipologi Tindakan Sosial, Kewenangan, dan Birokrasi

Sumbangan Weber berikutnya adalah gagasan tentang tipologi tindakan sosial dan kewenangan dan birokrasi. Pada bab sebelumnya telah didiskusikan secara mendalam tentang tindakan sosial dan tipologinya. Weber melihat bahwa tindakan sosial dari berbagai individu mengonstruksi suatu bangunan dasar bagi struktur-struktur sosial yang lebih

besar, salah satunya adalah kewenangan (*authority / Herrschaft*). Konstruksi bangunan kewenangan, oleh karena itu, tidak bisa dilepaskan dari berbagai tipe tindakan sosial yang ada. Suatu tindakan sosial bisa mengonstruksi suatu bentuk kewenangan tertentu. Tindakan sosial rasional instrumental, misalnya, bisa mengonstruksi kewenangan yang bersifat legal-rasional.


Berbeda dengan jumlah dari tipologi tindakan sosial dengan 4 tipe, Weber membangun tipologi kewenangan dengan 3 tipe, yaitu: kewenangan tradisional, kewenangan kharismatik, dan kewenangan legal-rasional. Tindakan tradisional mengkristalkan dan mempertahankan kewenangan tradisional. Tindakan rasional-instrumental dapat melahirkan dan mempertahankan suatu kewenangan legal-rasional. Bagaimana dengan tindakan rasional nilai? Tindakan rasional nilai bisa mengonstruksi kewenangan legal-rasional dan tindakan afektif. Sedangkan tindakan afektif mampu mengonstruksi kewenangan.

Weber juga melihat bagaimana tipe tindakan sosial tertentu memengaruhi suatu administrasi organisasi, tentunya termasuk sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Weber dalam *The Theory of Social and Economic Organization* menemukan administrasi organisasi tradisional tidak efisien, boros dan tidak rasional. Oleh karena itu, Weber mengusulkan suatu tipe ideal untuk administrasi organisasi (birokrasi) agar mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi yang dilandasi pada tindakan legal-rasional. Adapun tipe ideal birokrasi modern yang diusulkan oleh Weber memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Berbagai aktivitas reguler yang diperlukan untuk pencapaian tujuan-tujuan organisasi yang didistribusikan dengan suatu cara yang baku sebagai kewajiban-kewajiban resmi.
2. Organisasi kantor-kantor mengikuti prinsip hirarki, yaitu setiap kantor yang lebih rendah berada di bawah kontrol dan pengawasan yang lebih tinggi.
3. Operasi-operasi birokratis diselenggarakan “melalui suatu sistem kaidah-kaidah abstrak yang konsisten ... (dan) terdiri atas penerapan kaidah-kaidah ini terhadap kasus-kasus spesifik”.

4. Pejabat yang ideal menjalankan kantornya... berdasarkan impersonalitas formalistik, ‘*Sine ira et studio*,’ tanpa kebencian atau kegairahan, dan karenanya tanpa antusiasme atau afeksi”.
5. Perekrutan dalam organisasi birokrasi didasarkan pada kualifikasi-kualifikasi teknis dan yang terhindar dari tindakan pemecatan yang sewenang-wenang. Ada satu sistem promosi berdasarkan senioritas atau prestasi atau menurut keduanya.
6. Tipe organisasi administrasi yang murni birokratis, dalam arti teknis murni, mampu mencapai tingkat efisiensi yang paling tinggi.

4. Sumbangan Ferdinand Tönnies (1855-1936)

	<p>Ferdinand Tönnies lahir dalam keluarga petani kaya di Oldenswort, Frisia Utara, Schleswig, Holstein, Jerman pada 26 Juli 1855. Kuliah di berbagai universitas, namun dia berhasil meraih gelar doktor dari Universitas Tübingen pada 1877. Kemudian mengajar di Universitas</p>
--	--

Universitas Kiel. Ia meninggal dunia pada 9 April 1936 di Kiel. Berikut beberapa karya dari Tönnies:

Gemeinschaft und Gesellschaft

Einführung in die Soziologie (Introduction to Sociology)

Custom

Sumbangan Ferdinand Tönnies yang sangat fundamental dalam sosiologi adalah karyanya tentang *Gemeinschaft und Gesellschaft*. *Gemeinschaft* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai komunitas atau paguyuban sedangkan *Gesellschaft* sebagai masyarakat atau patembayan. *Gemeinschaft* dicirikan dengan adanya *wessenwille* (kehendak alamiah), sedangkan *Gesellschaft* ditandainya dengan keberadaan *kurwille* (kehendak rasional). *Wessenwille*, seperti telah disinggung pada bab 1, merupakan relasi sosial yang intim, pribadi dan afeksi yang bersifat alamiah. Sedangkan *kurwille* dicirikan relasi parsial, transaksional, dan netral afeksi. Tesis Tönnies dalam *Gemeinschaft und Gesellschaft* adalah manusia memiliki kehendak (*Wille*) untuk melakukan relasi sosial.

Dalam *Gemeinschaft* relasi sosial dibangun atas dasar *wessenwille* sedangkan dalam *Gesellschaft* dilandasi oleh *kurwille*. Perubahan social terjadi dari *Gemeinschaft* menuju *Gesellschaft*. Hal ini akan didiskusikan lebih lanjut pada bab 3.

4. Sumbangan Pitirim A Sorokin (1889-1968)



Pitirim Alexandrovich Sorokin lahir pada 21 Januari 1889 di lingkungan pertanian Turya Rusia. Sorokin meraih gelar doctor dalam studi di Universitas St.Petersburg Rusia. Akibat berbeda pandangan dengan rezim pemerintahan kekaisaran Rusia dan

selanjutnya komunis Sovyet, ia melakukan kegiatan anti pemerintahan. Pitirim Alexandrovich Sorokin lahir pada 21 Januari 1889 di lingkungan pertanian Turya Rusia. Sorokin meraih gelar doctor dalam studi di Universitas St.Petersburg Rusia. Akibat berbeda pandangan dengan rezim pemerintahan kekaisaran Rusia dan selanjutnya komunis Sovyet, ia melakukan kegiatan anti pemerintahan. Konsekuensinya ia harus berhadapan dengan vonis hukuman mati rezim pemerintahan komunis, namun Sorokin berhasil lari ke pengasingan (Amerika Serikat) dan bebas dari hukuman. meninggal pada saat berusia 79 tahun pada tanggal 11 Februari 1968. Tempat berlabuh pertama karir akademiknya di Amerika adalah Universitas Minnesota (1924-1930), selanjutnya pindah ke Universitas Harvard (1930-1955) dan mendirikan jurusan Sosiologi di sana.

Systematic Source Book in Rural Sociology, 4 volume (1930-1932)

Social and Cultural Dynamic, 4 volume (1937-1941)

The Crisis of Our Age (1942)

Man and Society in Calamity (1942)

Altruistic Love (1950)

Sorokin dikenal sebagai salah satu sosiolog yang serius mengembangkan sosiologi perdesaan, sebagai salah satu cabang sosiologi di Amerika Serikat melalui Universitas Minnesota. Pada Universitas Minnesota, Sorokin berkolaborasi dengan beberapa

kologinya mengembangkan sosiologi perdesaan: dengan Carle C. Zimmerman menulis *Principles of Rural-Urban Sociology* serta bersama Carle C. Zimmerman dan Charles J. Galpin menulis *Systematic Source Book in Rural Sociology*.

Dalam buku mereka *Principles of Rural-Urban Sociology*, Sorokin dan Zimmerman membuat perbedaan tipologis antara kota dan desa. Buku ini memberikan landasan berpijak bagi para sosiolog perdesaan dan perkotaan selanjutnya dalam membicarakan perbedaan desa dan kota.

Tabel 2.1. Tipologi Desa dan Kota Menurut Sorokin dan Zimmerman

Kriteria	Desa	Kota
Pekerjaan	Umumnya terlibat pada pertanian, sedikit di luar itu	Umumnya terlibat kegiatan manufaktur, perdagangan, komersial, profesional, dan non pertanian lainnya
Lingkungan	Pengaruh alam terhadap lingkungan sosiobudaya. Hubungan langsung dengan alam.	Terbukanya isolasi alam dan adanya pengaruh lingkungan yang dibuat manusia terhadap alam
Ukuran komunitas	Kecil	Besar
Keadaan Penduduk	Homogen	Heterogen
Diferensiasi dan stratifikasi sosial	Lemah	Kuat
Intensitas Mobilitas	Kurang	Besar
Sistem interaksi	Sedikit kontak melalui area sempit, hubungan bersifat personal dan lama	Lebih banyak kontak melalui area lebar, hubungan bersifat impersonal dan singkat

Sumber: Sorokin dan Zimmerman yang dmodifikasi

B. PENGUAT FONDASI SOSIOLOGI PERDESAAN

Penguat fondasi dimaksud sebagai para tokoh teori sosiologi yang melakukan suatu aktivitas ilmiah untuk mengembangkan, merevisi, dan mempertajam teori yang telah dikembangkan oleh para peletak fondasi seperti yang disebut sebelumnya di atas, seperti Marx, Durkheim, Weber, Tönnies dan Sorokin. Adapun tokoh penguat fondasi sosiologi pendidikan yang diperbincangkan adalah antara lain:

1. Sumbangan Antonio Gramsci (1891-1937)



Antonio Gramsci dilahirkan di Sardinia pada 1891. Dia pergi ke Turin sebagai seorang mahasiswa di sana dan aktif sebagai seorang komentator politik dan jurnalis sampai 1918. Setelah itu ia aktif dalam politik melalui keterlibatan dalam gerakan buruh dan Partai Sosialis

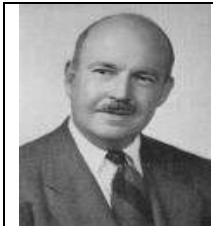
Italia serta kemudian mendirikan Partai Komunias Itali. Pada tahun 1926, dia dipenjara oleh pemerintah fasis dan meninggal di sana pada tahun 1937.

Gramsci dipandang sebagai seorang intelektual yang dipengaruhi pemikiran Marx. Pemikiran Gramsci yang paling banyak dikutip oleh para ilmuwan sosial dan humaniora adalah konsep hegemoni. Sederhananya, menurut Robinson (1986: 46), hegemoni dapat dipahami sebagai “pengaruh yang memimpin”. Dengan mengutip Williams, Robinson menulis hegemoni sebagai satu keseluruhan himpunan kebiasaan dan harapan-harapan; penggunaan energi kita, pemahaman kita yang biasa mengenai kodrat manusia dan dunianya. Ia merupakan satu perangkat makna-makna dan nilai-nilai yang, sebagaimana, terjadi dalam praktek, tampak sebagai saling memperkuat. Atau juga bisa dipahami melalui pemahaman Strinati (2003: 188-196) yang melihat ia sebagai sarana kultural maupun ideologis di mana kelompok-kelompok yang dominan dalam masyarakat, termasuk pada dasarnya tetapi bukan secara eksklusif kelas penguasa, melestarikan dominasinya dengan mengamankan “persetujuan spontan” kelompok-kelompok subordinat, termasuk kelas pekerja, melalui penciptaan negosiasi konsensus politik maupun ideologis yang menyusup ke dalam kelompok-kelompok dominan maupun yang didominasi.

Apa hubungan antara konsep hegemoni dengan sosiologi perdesaan? Dalam masyarakat perdesaan, pendidikan dilihat memiliki peran yang strategis dalam mengabsahkan hegemoni yang dominan. Ia mensosialisasikan kaum muda bukan hanya fakta-fakta dunia tetapi juga tentang sikap terhadap fakta tersebut. Kaum intelektual dapat memainkan peranan penting untuk mempertahankan statusquo yang ada, termasuk hegemoni kebudayaan dominan. Namun sebaliknya juga kaum intelektual dapat pula

membangun suatu budaya kebudayaan kontra-hegemoni yang melalui kebudayaan dominan dapat dilawan.

2. Sumbangan Talcott Parsons (1902-1979)



Talcott Parsons lahir 13 Desember 1902 di Colorado Springs, Colorado, Amerika Serikat dari seorang anak pendeta yang intelektual. Ia menamatkan sarjana mudanya dalam bidang studi biologi di Kolese Amherst (1920-1924). Bidang studi ini dikemudian hari memberikan

fondasi dalam cara memandang kenyataan hidup di tengah masyarakat. Kemudian dia mengikuti program pasca sarjana di London School of Economics pada tahun 1924. selanjutnya dia pergi ke Heidelberg, Jerman, tempat ia memulai tesis doktoralnya, sehingga dia berkenalan dengan berbagai karya ilmuwan sosial Jerman seperti Karl Marx, Max Weber, dan Sombart.

Parsons merupakan salah seorang tokoh utama yang mempopulerkan pendekatan sistem dalam sosiologi kontemporer. Suatu sistem, menurut Parsons, hanya bisa fungsional apabila semua persyaratan terpenuhi. Apa saja persyaratan fungsional yang dibutuhkan oleh suatu sistem? Ada empat persyaratan fungsional yang dibutuhkan oleh suatu sistem, yaitu: Adaptation/adaptasi (A), Goal attainment/pencapaian tujuan (G), Integration/integrasi (I), dan Latent pattern maintenance/pola pemeliharaan laten (L).

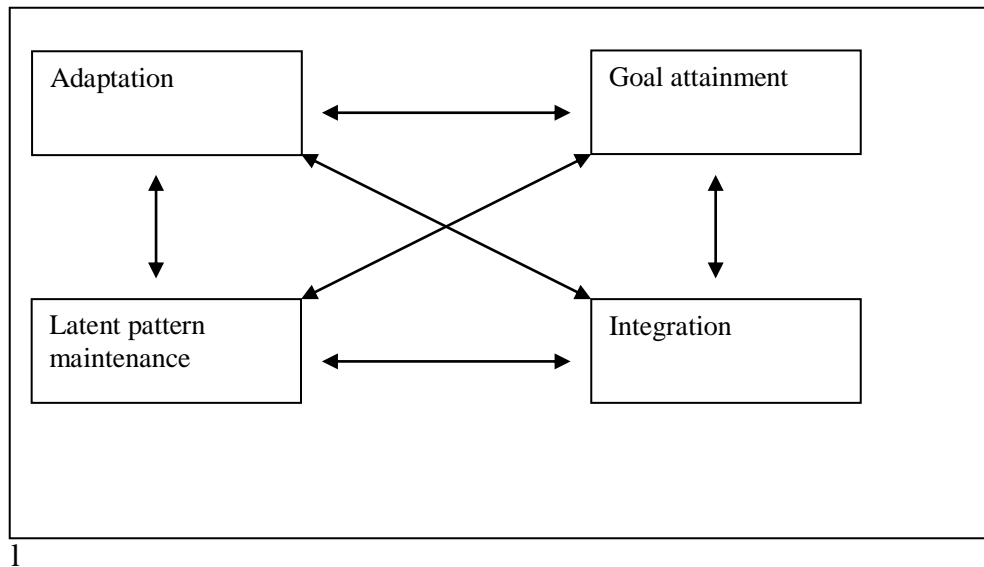
Prasyarat fungsional adaptasi (A) merupakan suatu kebutuhan sistem untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dihadapinya. Lingkungan dapat berupa sosial maupun non sosial/fisik seperti lingkungan perdesaan. Melalui adaptasi, sistem mampu menjamin apa yang dibutuhkan dari lingkungannya serta mendistribusikan sumber-sumber tersebut ke dalam seluruh sistem.

Goal attainment/pencapaian tujuan (G) merupakan prasyarat fungsional yang menentukan tujuan dan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang ada. Setiap orang bertindak selalu diarahkan oleh suatu pencapaian tujuan. Namun, perhatian utama bukan terfokus pada tujuan pribadi individual, melainkan diarahkan pada tujuan bersama para anggota dalam suatu sistem sosial.

Prasyarat fungsional integrasi (I) adalah suatu kebutuhan sistem yang dapat mengkoordinasikan dan menciptakan kesesuaian antar bagian-bagian atau anggota-anggota dalam suatu sistem. Fungsi integrasi bisa terpenuhi apabila bagian-bagian atau anggota-anggota dalam suatu sistem berperan sesuai dengan fungsinya dalam satu keseluruhan. Agar sistem sosial berfungsi efektif sebagai satu kesatuan, harus terdapat paling kurang suatu tingkat solidaritas di antara bagian atau individu yang termasuk di dalamnya. Masalah integrasi menunjuk pada kebutuhan untuk menjamin bahwa ikatan emosional yang cukup yang menghasilkan solidaritas dan kerelaan untuk bekerjasama dikembangkan dan dipertahankan. Ikatan-ikatan emosional tersebut tidak boleh tergantung pada keuntungan yang diterima atau sumbangan yang diberikan untuk tercapainya tujuan individu atau kolektif. Jika tidak, solidaritas sosial dan kesediaan untuk kerjasama akan jauh lebih goyah sifatnya, karena hanya didasarkan pada kepentingan diri pribadi semata (Johnson, 1986: 130).

Latent pattern maintenance/pola pemeliharaan laten (L) adalah prasyarat fungsional yang dibutuhkan sistem untuk menjamin kesinambungan tindakan dalam sistem sesuai dengan beberapa aturan atau norma-norma. Konsep laten menunjuk pada sesuatu yang tersembunyi atau tidak kelihatan. Kenapa perlu prasyarat fungsional ini? Apabila sistem sosial menghadapi kemungkinan terjadinya disintegrasi atau perpecahan, maka ada pola pemeliharaan yang tersembunyi yang dapat memelihara agar sistem tetap terintegrasi atau tetap terpelihara.

Bagaimana hubungan antar persyaratan fungsional tersebut? Hubungan antar persyaratan fungsional bersifat saling pengaruh-mempengaruhi secara timbal balik. Untuk lebih sederhananya lihat gambar berikut ini.



Gambar 2.1. Skema AGIL Parsons

Dari gambar di atas terlihat, di satu sisi, bahwa setiap persyaratan fungsional memiliki batas yang jelas dan tegas dengan persyaratan fungsional lainnya. Namun, di sisi lain, suatu persyaratan fungsional dapat memberikan masukan (input) dan output bagi persyaratan fungsional lainnya.

Sistem sosial, seperti halnya sistem yang lain, memiliki persyaratan fungsional AGIL. Dalam sistem sosial, kebutuhan fungsional AGIL diemban beberapa sub-sistem seperti sistem ekonomi, *polity* (sistem politik), komunitas *societal*, dan *Fiduciary* (sistem sosialisasi). Ekonomi merupakan sub-sistem yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan persyaratan fungsional adaptif (A) dalam suatu sistem sosial. Kegiatan produksi dalam sub-sistem ekonomi merupakan suatu usaha adaptif manusia agar dapat bertahan hidup (*survive*) dengan mengubah alam menjadi fasilitas yang dapat digunakan atau sesuatu yang sangat bermanfaat untuk bermacam tujuan individu dan kolektif, termasuk mencukupi kebutuhan dasar fisik-biologis manusia sebagai organisme.

Sementara itu dalam sistem sosial, *polity* (sistem politik) merupakan sub-sistem yang memikul tanggungjawab untuk memenuhi persyaratan fungsional pencapaian tujuan (G). Sistem politik, yang dilakoni oleh suatu pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudikatif), menentukan tujuan dan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang ada. Setiap unsur atau bagian dari sistem politik bertindak selalu diarahkan oleh suatu pencapaian tujuan. Tujuan individual, secara teoritis, berbeda dengan tujuan komunitas *societal*.

Tujuan individual berkaitan dengan tujuan komunitas *societal*, manakala peran dimainkan seseorang berhubungan dengan perannya sebagai warganegara. Dalam sistem politik, partai politik dan kelompok kepentingan memiliki pengaruh terhadap penentuan tujuan masyarakat.

Sedangkan kebutuhan prasyarat fungsional integrasi dalam sistem sosial diemban oleh komunitas *societal*. Seperti telah dikemukakan di atas bahwa integrasi menunjuk pada persyaratan untuk mengkoordinasikan dan menciptakan kesesuaian antar bagian-bagian atau anggota-anggota dalam suatu sistem. Yang diperlihatkan oleh suatu tingkat solidaritas minimal sehingga bagian-bagian atau anggota-anggotanya akan bersedia untuk bekerjasama dan menghindari terjadinya konflik yang akan merusak. Dalam komunitas *societal*, Parsons menemukan bahwa sistem hukum, kontrol sosial, kebiasaan dan norma antarpribadi serta agama sebagai suatu mekanisme utama yang berkaitan dengan masalah integrasi dalam sistem sosial.

Terakhir, prasyarat kebutuhan fungsional pemeliharaan pola laten dalam sistem sosial dipikulkan tanggungjawabnya kepada sistem *fiduciary* (sistem sosialisasi). Konsep *fiduciary* menunjuk pada peranan-peranan sebagai wali yang dilakukan oleh para pengemban tradisi kultural maupun mereka yang memindahkan tradisi tersebut pada anggota masyarakat. Dalam masyarakat Minangkabau, misalnya, peran *fiduciary* diemban oleh lembaga “tigo tungku sajarangan”, yaitu ninik mamak (penghulu/datuk), alim ulama, dan cerdik pandai. Ninik mamak memerankan peran *fiduciary* dalam adat, alim ulama memerankan *fiduciary* dalam agama, dan cerdik pandai memerankan *fiduciary* dalam tradisi pengetahuan dan ilmu.

3. Sumbangan Louis Althusser (1918-1990)



Louis Althusser lahir pada 1918 di Birmandreis Aljazair dari pasangan Charles Althusser dan Lucienne Berger. Ayahnya bekerja sebagai manajer di sebuah perbankan. Dia diterima menjadi mahasiswa di the Ecole Normale Supérieure pada tahun 1939 dan menyelesaikan tesis

masternya pada tahun 1948. Pemikiran Althusser dipengaruhi oleh cara pandang Marx, namun cara pandang yang direvisi oleh Althusser sendiri. Secara amat sederhana,

menurut Strinati (2003: 167), tujuan Althusser adalah mengukuhkan Marxisme sebagai sebuah ilmu pengetahuan dan melepaskannya dari determinisme ekonomi.

Untuk memahami inti dari pemikiran Althusser, ada baiknya dikutip pernyataan Strinati (2003: 169-170) :

“masyarakat harus dipertimbangkan dalam hal relasi antar struktur daripada suatu esensi beserta ekspresinya. Basis ekonomi atau cara produksi, dan superstruktur atau politik dan ideologi, melahirkan struktur-struktur terkait satu sama lain secara pasti. Superstruktur politik dan ideologi bukan semata-mata merupakan ekspresi esensi basis ekonomi. Pada contoh akhir, basis ekonomi akan menjadi penentu dikarenakan dampaknya terhadap struktur-struktur lain maupun dinamika masyarakat secara keseluruhan. Namun hal ini tidak mencegah superstruktur untuk menjadi “relatif mandiri” dari basisnya, atau dari melaksanakan kekuasaan, atau memberikan pengaruh tersendiri terhadap basis tersebut maupun terhadap kecepatan serta arah perubahan sosial. Dalam dunia nyata, determinisme ekonomi tidak pernah dalam bentuk murninya sehingga keberadaannya sukar untuk diputuskan dan dijabarkan dari berbagai pengaruh lainnya.”

Seperti pertanyaan kita di atas, apa sumbangan pandangan Althusser pada sosiologi pendidikan? Althusser, menurut Robinson (1986: 47), memandang negara sebagai sebuah mesin penindasan, yang memungkinkan kelas-kelas berkuasa ... menjamin dominasi mereka atas kelas buruh. Althusser menegaskan bahwa proses ini berlangsung melalui “aparatus represif” negara seperti polisi dan tentara, serta “aparatus ideologinya” seperti pendidikan, keluarga, dan media-massa. Ia melihat sekolah mengambil anak-anak dari setiap kelas pada usia taman kanak-kanak, lalu selama bertahun-tahun ... dalam keadaan terjepit antara aparat negara berupa keluarga dan aparat negara berupa pendidikan, kepada mereka dipompakan ... sejumlah tertentu “know-how” yang dibungkus ideologi yang berkuasa atau malahan ideologi ideologi yang berkuasa itu sendiri dalam keadaan yang murni.

4. Sumbangan Pierre Bourdieu (1930-2002)



Pierre Bourdieu dilahirkan di kota kecil selatan Perancis pada tahun 1930. Dia diterima di the Ecole Normale Supérieure pada tahun 1950-an, namun dia tidak menulis tesis masternya karena ketidaksetujuan terhadap struktur sekolah yang otoriter. Dia aktif menentang orientasi

komunis dari sekolahnya. Pengalaman wajib militer selama 2 tahun di Aljazair pada 1958-1960 mendorongnya untuk menulis buku. Setelah itu dia kembali ke Paris dan mengajar sebagai asisten di Universitas Paris. Dia mengikuti kuliah Levi-Straus di College de France dan menjadi asisten Raymond Aron. Ketika kedudukan pemimpin College de France lowong karena Raymond Aron memasuki pensiun pada 1981, Bourdieu menggantikannya. Semenjak itu dia memegang peranan kunci dalam sosiologi Perancis.

Sumbangan terbesar dari Bourdieu terhadap sosiologi perdesaan adalah idenya tentang kapital yang dihubungkan dengan pendidikan. Bourdieu melihat bahwa terdapat hubungan antara pendidikan dengan tentang kapital budaya dan kapital simbolik. Kedua kapital tersebut direproduksi dan dilanjutkan melalui sekolah. Hal ini akan dibahas lebih detil pada bab Kapital Desa.

C. PERKEMBANGAN TEORI SOSIOLOGI SEBAGAI SEJARAH PENDEKATAN SOSIOLOGI PERDESAAN

Pada bab Pengertian dan Ruang Lingkup, telah disinggung sebelumnya, bahwa salah satu pendekatan sosiologi adalah teori sosiologi itu sendiri. Teori merupakan alat untuk melakukan analisis. Oleh sebab itu, teori bukan merupakan tujuan suatu analisis, tetapi merupakan alat untuk memahami kenyataan atau fenomena. Sebagai alat untuk memahami kenyataan atau fenomena, suatu teori kadangkala tidak mampu secara tuntas menganalisis sesuatu. Oleh karenanya, melalui suatu penelitian, teori tersebut dipertajam, diperkuat, atau bahkan sebaliknya dibantah dengan suatu kenyataan atau fenomena.

Dalam sosiologi, teori telah mengalami perkembangan yang sangat pesat sekali. Dalam bab ini kita hanya membatasi empat teori saja, yaitu dua pada tingkatan makro dan dua pada mikro. Perbedaan antara makro dan mikro berkisar pada tingkatan mana suatu analisis itu dilakukan, apakah pada tingkatan individu/interaksi atau pada tataran struktur. Jika analisis dilakukan pada tataran individu/interaksi maka dikenal sebagai teori mikro; sebaliknya jika pada tingkatan struktur maka dikenal dengan teori makro. Pembahasan berkisar pada baik teori sosiologi makro maupun teori sosiologi mikro: yaitu teori struktural fungsional dan teori struktural konflik sebagai teori sosiologi makro

serta teori interaksionisme simbolik dan teori pertukaran sebagai teori sosiologi mikro. Perkembangan teori dalam sosiologi merefleksikan sejarah perkembangan pendekatan dalam sosiologi, termasuk sosiologi perdesaan.

1. Teori Struktural Fungsional

Teori Struktural Fungsional menjelaskan bagaimana berfungsinya suatu struktur. Setiap struktur (mikro seperti persahabatan, meso seperti organisasi dan makro seperti masyarakat dalam arti luas seperti masyarakat Jawa) akan tetap ada sepanjang ia memiliki fungsi. Oleh sebab itu, kemiskinan misalnya, akan tetap ada sepanjang ia memiliki fungsi. Apa fungsi kemiskinan? Herbert Gans (1972) menemukan 15 fungsi kemiskinan bagi masyarakat Amerika, yaitu: 1) menyediakan tenaga untuk pekerjaan kotor bagi masyarakat. 2) memunculkan dana-dana sosial (*funds*). 3) membuka lapangan kerja baru karena dikehendaki oleh orang miskin. 4) memanfaatkan barang bekas yang tidak digunakan oleh orang kaya. 5) menguatkan norma-norma sosial utama dalam masyarakat. 6) menimbulkan altruisme terutama terhadap orang-orang miskin yang sangat membutuhkan santunan. 7) orang kaya dapat merasakan kesusahan hidup miskin tanpa perlu mengalaminya sendiri dengan membayangkan kehidupan si miskin. 8) orang miskin memberikan standar penilaian kemajuan bagi kelas lain. 9) membantu kelompok lain yang sedang berusaha sebagai anak tangganya 10) kemiskinan menyediakan alasan bagi munculnya kalangan orang kaya yang membantu orang miskin dengan berbagai badan amal. 11) menyediakan tenaga fisik bagi pembangunan monumen-monumen kebudayaan. 12) budaya orang miskin sering diterima pula oleh strata sosial yang berada di atas mereka. 13) orang miskin berjasa sebagai “kelompok gelisah” atau menjadi musuh bagi kelompok politik tertentu. 14) pokok isu mengenai perubahan dan pertumbuhan dalam masyarakat selalu diletakkan di atas masalah bagaimana membantu orang miskin. 15) kemiskinan menyebabkan sistem politik menjadi lebih sentris dan lebih stabil. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah fungsi kemiskinannya sama seperti Amerika? Coba Anda amati fenomena kemiskinan yang berada di sekitar Anda, bandingkan dengan apa yang telah dikatakan Gans tersebut.

Apakah korupsi merupakan suatu hal fungsional bagi masyarakat Indonesia? Kalau jawabannya ya, apa fungsi korupsi? Dengan mengikuti cara berpikir Gans tentang kemiskinan, kita temukan beberapa fungsi korupsi, yaitu: 1) katub penyelamat bagi orang yang mempunyai pendapatan rendah. 2) sarana bagi-bagi (redistribusi) pendapatan. 3) cara singkat menjadi kaya. Fungsi korupsi bisa anda perpanjang sesuai dengan pengalaman Anda.

Asumsi Teori Struktural Fungsional

Sampai bahasan ini, apakah Anda sudah paham tentang struktural fungsional? Jika belum, mari kita pahami melalui pendapat Ralp Dahrendorf (1986 : 196) tentang asumsi dasar yang dimiliki oleh teori struktural fungsional

a. Setiap Masyarakat Terdiri Dari Berbagai Elemen yang Terstruktur Secara Relatif Mantap dan Stabil.

Ketika Anda bangun pagi, seperti biasa, Anda berwudhu untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah itu Anda bersiap untuk mandi, berpakaian, dan sarapan pagi. Selanjutnya Anda meninggalkan rumah menuju tempat kerja. Pada saat di tempat kerja Anda melakukan tugas dan melaksanakan fungsi seperti yang telah digariskan oleh aturan tempat kerja Anda. Ketika menjelang siang, Anda bersiap-siap untuk beristirahat, makan siang, dan sholat. Pada sore hari, Anda mulai merapikan pekerjaan untuk dilanjutkan besok jika masih belum selesai atau menyerahkan hasil pekerjaan jika selesai. Menjelang petang Anda bersama keluarga di rumah menyambut datangnya malam. Setelah selesai shalat magrib, Anda makan malam bersama keluarga. Kemudian sesudah shalat isya Anda bersiap istirahat tidur yang mungkin diselingi dengan melakukan aktifitas waktu senggang seperti membaca majalah, menonton televisi, atau membaca Al Quran. Orang lain juga melakukan hal yang sama dengan Anda, tentunya dengan beragam variasi yang ada. Kegiatan Anda dan orang lain dilakukan dalam suatu sistem interaksi antar orang dan kelompok. Anda tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi bersama orang lain, baik membantu maupun dibantu orang lain. Setiap individu yang bersama Anda tersebut memiliki sumbangan tersendiri bagi berlangsungnya kebersamaan tersebut. Demikianlah aktifitas Anda dalam masyarakat, juga aktifitas orang lain dalam masyarakat. Kegiatan

seperti itu anda lakukan secara mantap dan stabil: dari hari ke hari terus ke bulan terus ke tahun, Anda rasakan relatif sama, hampir tidak berubah.

Berdasarkan pandangan teori struktural fungsional, Anda dapat dipandang sebagai elemen dalam masyarakat; seperti juga orang lain sebagai elemen dari masyarakat. Jaringan hubungan antara Anda dan orang-orang lain yang terpola dilihat sebagai masyarakat. Jaringan hubungan yang terpola tersebut mencerminkan struktur elemen-elemen yang relatif mantap dan stabil. Kenapa dilihat sebagai sesuatu relatif stabil dan mantap? Karena dari hari ke hari terus ke bulan terus ke tahun, dirasakan relatif sama, hampir tidak berubah. Kalaupun berubah terjadi secara evolusi, berubah secara perlahan-lahan. Perubahan tersebut tidak begitu terasa. Terasanya perubahan tersebut pada saat memperbandingkannya dari suatu titik waktu dengan titik waktu lain yang sangat berjarak, misalnya sepuluh tahun. Misalkan menggunakan jangka waktu sepuluh tahun untuk memperbandingkan pola busana remaja. Andaikan Anda memperbandingkan pola busana remaja pada tahun 1990-an dengan tahun 2000-an. Coba Anda perhatikan, perubahan apa yang Anda temukan?.

b. Elemen-Elementer Terstruktur Tersebut Terintegrasi Dengan Baik

Anda baru saja memahami bahwa jaringan hubungan antara Anda dan orang-orang lain yang terpola dilihat sebagai masyarakat. Jaringan hubungan yang terpola tersebut mencerminkan struktur elemen-elemen yang terintegrasi dengan baik. Artinya, elemen-elemen yang membentuk struktur memiliki kaitan dan jalinan yang bersifat saling mendukung dan saling ketergantungan antara satu dengan lainnya. Anda perlu contoh, bukan? Anda, misalnya, sebagai pegawai negeri sipil di kelurahan adalah salah satu elemen dari masyarakat. Ada banyak elemen lain dari masyarakat dimana Anda berhubungan secara timbal-balik yang bersifat saling mendukung dan saling ketergantungan misalnya pak lurah sebagai atasan Anda, Mpok Atun si tukang cuci keluarga, Bang Togar si penambal ban motor Anda, Kang Asep si loper koran Anda, Uda Buyung si penjual nasi, Bang Abdi si penjual barang harian, dan lain sebagainya. Hubungan yang berjaln berkulindan bersifat saling mendukung dan saling ketergantungan tersebut membuahkan struktur elemen-elemen terintegrasi dengan baik.

c. Setiap Elemen dalam Struktur Memiliki Fungsi, yaitu Memberikan Sumbangan pada Bertahannya Struktur itu Sebagai Suatu Sistem

Setiap elemen dalam struktur memiliki fungsi. Apa maksudnya? Untuk menjawabnya mari kita kembali kepada contoh di atas. Anda adalah salah satu dari elemen dari struktur. Seperti telah dikemukakan di atas, Anda adalah PNS memiliki tugas dan fungsi sebagai aparat birokrasi. Anda adalah sekrup (mur) dari sebuah mesin birokrasi, yang bertugas dan berfungsi memberikan pelayanan publik bagi masyarakat. Sedangkan Mpok Atun si tukang cuci keluarga memberikan pelayanan rumah tangga, khususnya mencuci pakaian keluarga Anda. Sehingga Anda dan keluarga bisa tampil rapih dihadapan publik. Bang Togar si penambal ban motor menyediakan jasa tambal ban sehingga kerja Anda lancar pada saat ban motor Anda bocor. Kang Asep si loper koran menjembatani Anda memperoleh informasi terkini tentang yang terjadi hari ini, akan datang dan sebelumnya. Sementara Uda Buyung menyediakan masakan Padang yang Anda butuhkan pada saat lapar. Sedangkan Bang Abdi menjual barang harian yang dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari. Semua sumbangan yang ada (dari Anda, Mpok Atun, Bang Togar, Kang Asep, Uda Buyung dan Bang Abdi) memberikan sumbangan bagi bertahannya struktur itu sebagai suatu sistem. Bisakah Anda bayangkan jika salah satu fungsi tersebut tidak ada elemen yang mempunyainya? Akan terjadi kekacauan, bukan! Kehadiran Mpok Atun menyebabkan Anda tidak perlu mengalokasikan waktu dan tenaga kerja untuk mencuci. Begitu juga dengan Bang Togar. Apa jadinya jika tidak ada tukang tambal motor seperti Bang Togar. Tentu akan menjadi chaos. Jadi, semua elemen yang ada mempunyai fungsi. Fungsi tersebut memberikan sumbangan bagi bertahannya suatu struktur sebagai suatu sistem.

d. Setiap Struktur yang Fungsional Dilandaskan pada Suatu Konsensus Nilai di antara para Anggotanya.

Untuk memahami ini mari kita ambil sebuah contoh. Salah satu struktur yang sering mempengaruhi hidup Anda adalah keluarga. Tentu anda tahu banyak hal tentang keluarga Anda bukan! Apa fungsi bapak dalam keluarga batih, yaitu keluarga yang terdiri dari bapak, ibu beserta anak-anaknya ? Anda akan menjawab bahwa fungsi bapak dalam keluarga adalah pencari nafkah utama keluarga, pelindung keluarga, dan pendidik

anak-anak. Kemudian, apa fungsi ibu dalam keluarga? Anda akan menjawab bahwa fungsi ibu adalah pendidik utama anak-anak, penjaga konsumsi keluarga, dan bendahara keluarga. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang menetapkan fungsi tersebut? Mungkin Anda ragu menjawabnya. Fungsi bapak dan ibu yang Anda katakan tadi sudah ada sebelum kedua orangtua Anda lahir. Maksudnya ide atau gagasan tentang fungsi kedua orangtua telah ada jauh sebelum orangtua Anda ada di muka bumi ini. Artinya, ide atau gagasan tersebut telah menjadi konsensus nilai dalam masyarakat berupa adat kebiasaan, tata kelakuan, atau lainnya.

Mari kita lanjutkan dengan contoh lainnya, yaitu antara Anda bersama saudara Anda. Katakanlah Anda bersaudara 3 orang, dimana Anda punya seorang kakak dan adik. Anda bertiga ingin membantu orangtua melakukan pekerjaan rumah tangga yang ada. Oleh karena itu, Anda bersepakat melakukan pembagian kerja antara tiga orang bersaudara. Hasil kesepakatan tersebut menghasilkan anda mengerjakan pekerjaan dapur, kakak membersihkan rumah, sedangkan adik melakukan pekerjaan taman. Kesepakatan yang Anda buat bersama saudara Anda merupakan suatu konsensus antara tiga orang bersaudara. Kesepakatan tersebut dilandasi oleh keinginan membantu orangtua. Dalam masyarakat Indonesia, ide tentang membantu orang tua merupakan ide yang berasal dari nilai budaya dan agama yang dianut.

Berdasarkan dua contoh tersebut diatas, telah memperlihatkan bahwa fungsi dari elemen-elemen yang terstruktur dilandasi atau dibangun diatas konsensus nilai diantara para anggotanya. Konsensus nilai tersebut berasal baik dari kesepakatan yang telah ada dalam suatu masyarakat seperti adat kebiasaan, tata perilaku, dan sebagainya maupun kesepakatan yang dibuat baru.

2. Teori Struktural Konflik

Teori Struktural Konflik menjelaskan bagaimana struktur memiliki konflik. Berbeda dengan teori struktural fungsional yang menekankan pada fungsi dari elemen-elemen pembentuk struktur, teori struktural konflik melihat bahwa setiap struktur memiliki berbagai elemen yang berbeda. Elemen-elemen yang berbeda tersebut memiliki motif, maksud, kepentingan, atau tujuan yang berbeda-beda pula. Perbedaan tersebut

memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi, konflik, dan perpecahan. Konflik ada dimana-mana. Setiap struktur terbangun didasarkan pada paksaan dari beberapa anggotanya atas orang lain. Melalui teori ini dipahami bahwa buta huruf terjadi karena adanya perbedaan akses antara berbagai orang terhadap sumber-sumber langka seperti barang, jasa, informasi dan kekuasaan. Perbedaan akses ini terjadi karena struktur tertentu yang tercipta atau diciptakan oleh kelompok tertentu dipakaikan terhadap kelompok lain. Seperti itulah inti dari teori struktural konflik.

Asumsi Teori Struktural Konflik

Untuk menuju pada tingkatan pemahaman yang lebih mendalam, mari kita dalam pendapat Ralp Dahrendorf (1986 : 197-198) tentang asumsi dasar yang dimiliki oleh teori struktural konflik.

- a. Setiap Masyarakat, dalam setiap hal, Tunduk pada Proses Perubahan; Perubahan Sosial Terdapat di mana-mana.

Berbeda dengan teori struktural fungsional yang melihat masyarakat selalu dalam keadaan keseimbangan (ekuilibrium), teori struktural konflik melihat masyarakat pada proses perubahan. Hal tersebut terjadi karena elemen-elemen yang berbeda sebagai pembentuk masyarakat (struktur sosial) mempunyai perbedaan pula dalam motif, maksud, kepentingan, atau tujuan. Perbedaan yang ada tersebut menyebabkan setiap elemen berusaha untuk mengusung motif atau tujuan yang dipunyai menjadi motif, atau tujuan dari struktur. Ketika motif atau tujuan diri dari suatu elemen telah menjadi bagian dari struktur maka elemen tersebut cenderung untuk mempertahankannya di satu sisi. Sedangkan pada sisi lain, elemen lain terus berjuang mengusung motif atau kepentingan dirinya menjadi motif atau kepentingan struktur. Konsekuensi logis dari keadaan tersebut adalah perubahan yang senantiasa diperjuangkan oleh setiap elemen terhadap motif, maksud, kepentingan, atau tujuan diri.

Kita lanjutkan dengan contoh diatas. Anda sebagai pegawai negri sipil, Mpok Atun si tukang cuci keluarga, Bang Togar si penambal ban motor Anda, Kang Asep si loper koran Anda, Uda Buyung si penjual nasi, dan Bang Abdi si penjual barang harian

adalah elemen-elemen dari struktur sosial yang memiliki motif, maksud, kepentingan, atau tujuan yang berbeda. Perjuangan Anda, Mpok Atun, Bang Togar, Kang Asep. Uda Buyung, dan Bang Abdi dalam meraih motif, maksud, kepentingan, atau tujuan yang dimiliki merupakan penggerak terhadap perubahan dalam struktur sosial di mana mereka berada. Sepanjang mereka tetap berjuang meraih motif, maksud, kepentingan, atau tujuan yang dipunyai maka sepanjang itu pula perubahan dalam struktur terus bergerak

b. Setiap Masyarakat, dalam setiap hal, Memperlihatkan Pertikaian dan Konflik; Konflik Sosial Terdapat di mana-mana.

Kita telah diskusikan bahwa setiap struktur sosial terdiri dari beberapa elemen yang memiliki motif, maksud, kepentingan, atau tujuan yang berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut merupakan sumber terjadinya pertikaian dan konflik diantara berbagai elemen dalam struktur sosial. Selama perbedaan tersebut masih terdapat di dalam struktur, maka selama itu pula pertikaian dan konflik dimungkinkan ada. Pertanyaannya adalah apakah mungkin elemen-elemen dalam struktur tidak memiliki perbedaan dalam motif, maksud, kepentingan, atau tujuan? Tidak, kata ahli teori struktural konflik.

Untuk pemahaman lebih lanjut, kita masih tetap dengan contoh yang disajikan di atas. Perbedaan motif, maksud, kepentingan, atau tujuan antara Anda, Mpok Atun, Bang Togar, Kang Asep. Uda Buyung, dan Bang Abdi merupakan sumber penyebab terjadinya konflik antar elemen dalam struktur di mana mereka berada. Pertikaian dan konflik akan tetap ada sepanjang mereka memiliki motif, maksud, kepentingan, atau tujuan yang tidak sama. Namun seperti diingatkan di atas, ketidaksamaan motif, maksud, kepentingan, atau tujuan adalah realitas kehidupan sosial, menurut teoritisi konflik.

c. Setiap Elemen dalam Suatu Masyarakat Menyumbang Disintegrasi dan Perubahan

Perbedaan motif, maksud, kepentingan, atau tujuan dari berbagai elemen, seperti dijelaskan diatas, merupakan sumber pertikaian dan konflik. Selanjutnya, pertikaian dan konflik menyebabkan disintegrasi dan perubahan dalam struktur sosial. Ini berarti bahwa berbagai elemen yang membentuk struktur tersebut mempunyai sumbangan terhadap terjadinya disintegrasi dan perubahan dalam struktur tersebut.

Kita masih menggunakan contoh di atas sebagai ilustrasi bagi pemahaman yang lebih dalam. Karena adanya perbedaan motif, maksud, kepentingan, atau tujuan antara Anda, Mpok Atun, Bang Togar, Kang Asep, Uda Buyung, dan Bang Abdi maka dimungkinkan terjadinya perpecahan dan konflik antar mereka. Pada gilirannya, pertikaian dan konflik antara sesama mereka akan menghasilkan disintegrasi dan perubahan dalam masyarakat. Dengan demikian, Anda, Mpok Atun, Bang Togar, Kang Asep, Uda Buyung, dan Bang Abdi memiliki sumbangan terjadinya disintegrasi dan perubahan dalam masyarakat.

d. Setiap Masyarakat Didasarkan pada Paksaan dari Beberapa Anggotanya Atas Orang Lain

Keteraturan, keharmonisan atau kenormalan yang terlihat dalam masyarakat, dipandang oleh teoritis konflik, sebagai suatu hasil paksaan dari sebagian anggotanya terhadap sebagian anggota yang lainnya. Kemampuan memaksa dari sebagian anggota masyarakat berasal dari kemampuan mereka untuk memperoleh kebutuhan dasar yang bersifat langka seperti hak istimewa, kekuasaan, kekayaan, pengetahuan, dan prestise lainnya.

Sekarang kita masuk ke dalam contoh. Katakanlah bahwa keteraturan, keharmonisan dan kenormalan yang Anda temui di provinsi dimana Anda tinggal berasal dari pelaksanaan aturan perundangan yang ada. Jika Anda sependapat dengan itu maka Anda tentu sependapat pula bahwa aturan perundangan tersebut dibuat oleh sebagian dari anggota masyarakat yang memiliki kewenangan untuk merumuskan, memutuskan dan menetapkan suatu aturan perundangan seperti top eksekutif dan anggota legislatif. Dalam kenyataannya, belum tentu semua anggota legislatif setuju dengan semua isi suatu aturan perundangan. Demikian pula rakyat belum tentu setuju. Oleh karena aturan perundangan tersebut sudah ditetapkan dan berlaku maka dengan terpaksa semua rakyat, tanpa terkecuali, harus patuh.

3. Teori Interaksionisme Simbolik

Teori interaksionisme simbolik memahami realitas sebagai suatu interaksi yang dipenuhi berbagai simbol. Kenyataan merupakan interaksi interpersonal yang menggunakan simbol-simbol. Penekanan pada struktur oleh dua teori makro yang dibahas sebelumnya, yaitu struktural fungsional dan struktural konflik, telah mengabaikan proses interpretatif dimana individu secara aktif mengkonstruksikan tindakan-tindakannya dan proses interaksi di mana individu menyesuaikan diri dan mencocokkan berbagai macam tindakannya dengan mengambil peran dan komunikasi simbol (Johnson, 1986 : 37).

Untuk memahami lebih jelas tentang teori interaksionisme simbolik, mari kita lihat apa asumsi yang ada dalam teori ini. Kemudian kita akan diskusikan bagaimana pandangan salah seorang teoritis interaksionisme simbolik.

Asumsi Teori Interaksionisme Simbolik

Dalam mendiskusikan asumsi teori interaksionisme simbolik, kita menggunakan pendapat dari Turner (1978 : 327-330). Menurut Turner ada empat asumsi dari teori interaksionisme simbolik, yaitu:

a. Manusia adalah makhluk yang mampu menciptakan dan menggunakan simbol

Tindakan sosial dipahami suatu tindakan individu yang memiliki arti atau makna (*meaning*) subjektif bagi dirinya dan dikaitkan dengan orang lain. Dalam proses melakukan tindakan sosial terdapat proses pemberian arti atau pemaknaan. Proses pemberian arti atau pemaknaan menghasilkan simbol. Ketika tindakan sosial dilakukan oleh dua orang atau lebih maka pada saat itu dua anak manusia atau lebih sedang menggunakan atau menciptakan simbol.

Selanjutnya kita masuk kepada sebuah contoh. Misalkan Anda mempunyai seorang adik kecil atau keponakan yang masih anak-anak. Karena Anda belajar sosiologi maka rasa ingin tahu Anda terhadap apa, kenapa dan bagaimana orang berpikir atau melakukan sesuatu itu tinggi. Ketika Anda dapati adik atau anak kecil sedang bermain dengan teman sebayanya, Anda menyapa mereka dengan bertanya, “sedang ngapain, dek?”. Mereka menjawab sedang mengenderai mobil. Apa yang dimaknai sebagai mobil

adalah sofa di ruangan tamu. Jadi, pada saat mereka bermain, mereka menciptakan simbol, yaitu dengan memaknai sofa di ruangan tamu sebagai simbol mobil. Pada saat yang sama, mereka juga menggunakan simbol mobil, misalnya melalui mulut mereka dikeluarkan bunyi suara mobil sedang melaju kencang.

Kehidupan orang dewasa lebih kurang seperti anak kecil diatas: orang dewasa menggunakan dan menciptakan simbol. Perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa terletak pada tingkat kerumitan atau kesederhanaan penciptaan dan penggunaan simbol. Dalam dunia orang dewasa, penciptaan dan penggunaan simbol berkaitan banyak aspek lain kehidupan seperti aspek kekuasaan, spritualitas, ekonomi, dan sebagainya. Sedangkan dalam dunia anak-anak, penciptaan dan penggunaan simbol terbatas sampai bagaimana mereka bisa saling berkomunikasi tanpa ada kaitannya dengan aspek lain dari kehidupan. Sarung dalam dunia orang dewasa, misalnya, bisa dimaknai dengan berbagai macam cara. Sarung bisa diinterpretasikan sebagai simbol kekolotan, keterbelakangan atau ketradisionalan. Tetapi juga bisa dimaknai sebagai simbol kesederhanaan atau kereligiusan.

b. Manusia menggunakan simbol untuk saling berkomunikasi

Untuk apa manusia menciptakan atau menggunakan simbol? Jawabannya adalah untuk saling berkomunikasi. Manusia menciptakan simbol melalui pemberian nilai atau pemaknaan terhadap sesuatu (baik berupa bunyi, kata, gerak tubuh, benda, atau hal yang lainnya). Sesuatu yang telah diberi nilai atau makna disebut dengan simbol. Melalui simbol tersebut manusia saling berkomunikasi. Kembali kepada contoh kita diatas, pemaknaan sofa di ruang tamu sebagai simbol mobil. Pada saat bermain, termasuk bermain mobil-mobilan oleh anak-anak diatas, mereka perlu saling berkomunikasi. Bermain tidak akan bisa berlangsung atau terjadi jika tidak terjadi saling berkomunikasi. Oleh sebab itu, anak-anak menggunakan sofa sebagai simbol mobil agar mereka bisa saling berkomunikasi untuk bisa saling bermain.

Pasti contoh yang paling jelas dan tegas adalah bahasa. Seperti Anda ketahui, bahasa adalah simbol utama yang diperlukan dalam berkomunikasi. Oleh sebab itu, sukar dibayangkan seseorang dapat berkomunikasi jika tidak dapat menguasai satupun bahasa, paling tidak bahasa isyarat. Sebuah komunikasi akan berjalan lancar, apabila pihak-pihak

yang terlibat komunikasi menggunakan simbol yang dapat dipahami secara bersama. Biasanya simbol yang dapat dipahami bersama adalah bahasa pengantar yang dapat dipakai dimana saja seperti bahasa nasional atau bahasa internasional (bahasa Inggris).

c. Manusia berkomunikasi melalui pengambilan peran (*role taking*)

Untuk memahami asumsi ini, terlebih dahulu Anda harus paham dengan konsep pengambilan peran (*role taking*). Pengambilan peran (*role taking*) merupakan proses pengambilan peran yang mengacu pada bagaimana kita melihat situasi sosial dari sisi orang lain di mana dari dia kita akan memperoleh respon. Dalam proses pengambilan peran, seseorang menempatkan dirinya dalam kerangka berpikir orang lain. Jadi, seseorang mengambil peran polisi, misalnya, adalah berusaha menempatkan diri dalam kerangka berpikir polisi, atau melihat situasi atau perilaku seseorang seperti yang dilakukan oleh polisi. Atau contoh lain, Anda mengambil peran gubernur, misalnya, adalah berupaya memposisikan diri dalam perspektif berpikir gubernur, atau melihat situasi atau perilaku seseorang seperti yang dilakukan oleh gubernur. Kita akan kembali ke topik ini ketika membicarakan pengambilan peran politik melalui perspektif George Herbert Mead pada bab selanjutnya.

d. Masyarakat terbentuk, bertahan, dan berubah berdasarkan kemampuan manusia untuk berpikir, untuk mendefinisikan, untuk melakukan refleksi-diri dan untuk melakukan evaluasi

Masyarakat dibentuk, dipertahankan dan diubah berdasarkan kemampuan manusia yang dikembangkan melalui interaksi sosial. Kemampuan manusia dalam berpikir, mendefinisikan, refleksi-diri dan evaluasi berkembang melalui interaksi sosial. Jadi, proses interaksi sosial adalah sangat penting dalam mengembangkan kemampuan manusia. Dengan kemampuan tersebut, melalui proses interaksi juga, manusia membentuk, mempertahankan dan merubah masyarakat. Misalnya, lembaga perkawinan dibentuk, dipertahankan dan diubah melalui kemampuan aktor-aktor, yang membentuknya, dalam berpikir, mendefinisikan, refleksi diri dan evaluasi melalui interaksi sosial.

4. Teori Pertukaran

Teori pertukaran melihat dunia ini sebagai arena pertukaran, tempat orang-orang saling bertukar ganjaran/hadiah. Apapun bentuk perilaku sosial seperti persahabatan, perkawinan, atau perceraian tidak lepas dari soal pertukaran. Semua berawal dari pertukaran, begitu kata tokoh teori pertukaran. Untuk memahami teori ini lebih dalam kita akan membahas asumsi yang dikandung dalam teori ini dan selanjutnya didiskusikan pandangan salah seorang tokoh tentang teori ini.

Asumsi Teori Pertukaran

Apabila kita pahami dari berbagai pemikiran teori yang dikemukakan oleh George Caspar Homans, Peter M. Blau, Richard Emerson, John Thibout dan Harold H. Kelly maka dapat ditarik suatu pemahaman bahwa teori pertukaran memiliki asumsi dasar sebagai berikut:

a. Manusia adalah makhluk yang rasional, dia memperhitungkan untung dan rugi

Pemikiran tentang manusia merupakan makhluk yang rasional telah didiskusikan di atas. Teori pertukaran melihat bahwa manusia terus menerus terlibat dalam memilih di antara perilaku-perilaku alternatif, dengan pilihan mencerminkan *cost and reward* (biaya dan ganjaran) yang diharapkan berhubungan dengan garis-garis perilaku alternatif itu. Tindakan sosial dipandang ekuivalen dengan tindakan ekonomis. Suatu tindakan adalah rasional berdasarkan perhitungan untung rugi.

Dalam rangka interaksi sosial, aktor mempertimbangkan keuntungan yang lebih besar dari pada biaya yang dikeluarkannya (*cost benefit ratio*). Oleh sebab itu, semakin tinggi ganjaran (*reward*) yang diperoleh makin besar kemungkinan suatu perilaku akan diulang. Sebaliknya, makin tinggi biaya atau ancaman hukuman (*punishment*) yang akan diperoleh maka makin kecil kemungkinan perilaku yang sama akan diulang.

Teori pertukaran dapat digunakan untuk memahami mengapa kelompok berpendidikan rendah tidak memilih-milih pekerjaan dibandingkan dengan yang lebih tinggi. Pengalaman masa lampau telah banyak memberikan pelajaran bahwa tidak

memilih-milih pekerjaan akan dapat bertahan hidup (*survive*). Atau kita bisa memahami, misalnya, mengapa orang menciptakan hubungan persahabatan? Melalui teori pertukaran, kita pahami bahwa persahabatan dibuat dan dipertahankan karena disana diperoleh keuntungan.

- b. Perilaku pertukaran sosial terjadi apabila: (1) perilaku tersebut harus berorientasi pada tujuan-tujuan yang hanya dapat dicapai melalui interaksi dengan orang lain” dan (2) perilaku harus bertujuan untuk memperoleh sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tersebut.

Asumsi dari Blau ini, menurut Poloma (1984), juga sejalan dengan pemikiran Homans tentang pertukaran. Perilaku sosial terjadi melalui interaksi sosial yang mana para pelaku berorientasi pada tujuan. Untuk memperoleh kasih sayang, misalnya, seseorang harus berorientasi pada perolehan kasih sayang tersebut. Perolehan kasih sayang tersebut hanya mungkin dilakukan melalui interaksi dengan orang lain. Tidak mungkin bertepuk sebelah tangan. Perilaku untuk mendapatkan kasih sayang tersebut memerlukan sarana bagi pencapaiannya, misalnya, hubungan persahabatan atau perkawinan. Dalam hubungan persahabatan atau perkawinan, pihak terlibat (antara dua sahabat atau antara suami istri) melakukan interaksi dengan mengorientasikan perilakunya untuk memperoleh kasih sayang. Dengan cara tersebut pertukaran sosial bisa terjadi.

- c. Transaksi-transaksi pertukaran terjadi hanya apabila pihak yang terlibat memperoleh keuntungan dari pertukaran itu

Sebuah tindakan pertukaran tidak akan terjadi apabila dari pihak-pihak yang terlibat ada yang tidak mendapatkan keuntungan dari suatu transaksi pertukaran. Keuntungan dari suatu pertukaran, tidak selalu berupa ganjaran ekstrinsik seperti uang, barang-barang atau jasa, tetapi juga bisa ganjaran intrinsik seperti kasih sayang, kehormatan, kecantikan, atau keperkasaan.

Seperti yang telah dikatakan di atas, tidak mungkin bertepuk sebelah tangan. Dalam kaitan dengan asumsi ini, tidak mungkin suatu pertukaran sosial terjadi kalau satu pihak saja mendapat keuntungan, sedangkan yang lain tidak mendapat apa-apa, apalagi

kalau pihak lain tersebut justru mendapatkan kerugian. Hubungan persahabatan atau hubungan perkawinan, seperti telah kita bahas di atas, tidak mungkin terjadi kalau ada pihak yang tidak memperoleh keuntungan, apalagi ada pihak yang merugi karena hubungan tersebut. Jika ada pihak yang tidak mendapatkan apa-apa atau malah rugi maka hubungan persahabatan atau perkawinan tersebut bisa bubar, menurut pandangan teori ini.

D. PERCABANGAN DAN REVITALISASI SOSIOLOGI PERDESAAN

Kajian perdesaan dalam sosiologi telah berlangsung sejak ilmu ini dibangun. Tokoh peneroka sosiologi seperti Karl Marx, Emile Durkheim dan Max Weber merupakan para ilmuwan yang mengkaji bagaimana terjadinya perubahan dari masyarakat pra industrial perdesaan menjadi masyarakat industrial perkotaan. Sosiologi perdesaan merupakan salah satu cabang dari disiplin ilmu sosiologi. Namun sosiologi perdesaan baru terdengar melalui daftar program tahunan American Sociological Association 1955-1965 dengan nomenklatur *Sociology of Rural Life*. Seiring dengan perjalanan waktu, sosiologi perdesaan berkembangbiak dengan tumbuhnya berbagai cabang baru, yang pada akhirnya terlepas dari inangnya, yaitu antara lain:

1. Sosiologi Pertanian

Bahagian terbesar dari wilayah perdesaan adalah daerah pertanian, yang dihuni oleh masyarakat agraris. Karakteristik masyarakat agraris yang terikat dengan lahan pertanian merupakan fenomena menarik tersendiri bagi para sosiolog untuk menjadikannya sebagai pokok bahasan terpisah dalam suatu kajian bidang ilmu, yaitu sosiologi pertanian. Inilah penyebab kenapa sosiologi pertanian berpisah dari inangnya di Indonesia. Bidang kajian ilmu ini meliputi pembahasan yang fokus terhadap fenomena sosial, budaya, ekonomi, politik, dan agama dalam bingkai masyarakat agraris seperti budaya petani, agama petani, ekonomi moral petani, ekonomi rasional petani, ekonomi politik petani, pemberontakan petani, dimensi sosiologis pembangunan pertanian, pemberdayaan petani, dan lain sebagainya. Menariknya, Rahardjo, sosiolog Universitas

Gadjah Mada, menggabungkan sosiologi perdesaan dan sosiologi pertanian dalam pembahasan terintegrasi pada bukunya Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian (1999).

Sedangkan Ulrich Planck (1990) menyebutkan bahwa kelahiran sosiologi pertanian di Jerman sebagai reaksi terhadap perkembangan di Eropa, khususnya Jerman, semakin menipisnya perbedaan antara kota dan desa. Hal ini dikarenakan terdapat sekelompok petani yang tidak tinggal di desa. Oleh sebab itu, lanjut Planck, objeknya adalah undang-undang pertanian, organisasi sosial pertanian (struktur), usaha pertanian, bentuk organisasi pertanian, terutama koperasi pertanian, dan posisi petani dalam masyarakat.

Perbedaan pokok bahasan kajian sosiologi pertanian antara Indonesia dan Jerman atau masyarakat Barat lainnya, seperti dipaparkan di atas, merupakan keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri. Hal ini dikarenakan fenomena pertanian Indonesia berbeda dengan Jerman atau masyarakat Barat lainnya. Oleh sebab itu, kemungkinan teori baru sosiologi pertanian muncul dari pengkajian tentang masyarakat Indonesia khususnya, dan Asia Tenggara umumnya terbuka lebar, karena teori ekonomi moral dan ekonomi rasional muncul dari masyarakat Asia Tenggara, termasuk Indonesia di dalamnya. Di masa akan datang dimungkinkan muncul lagi teori sosiologi pertanian yang baru. Inilah tugas sosiolog dan perguruan tinggi di Indonesia.

2. Sosiologi Masyarakat Pesisir

Bahagian wilayah perdesaan lainnya berada di tepi pantai, yang dihuni oleh masyarakat pesisir. Berbeda dengan masyarakat pertanian, masyarakat pesisir yang terdiri dari para nelayan menggantungkan hidupnya kepada sumberdaya yang tidak terkontrol dan bersifat *open access* (akses terbuka). Kenyataan ini membuat para ilmuwan, khususnya para sosiolog dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang dimotori Arif Satria, mengembangkan suatu disiplin ilmu baru, yaitu sosiologi masyarakat pesisir. Untuk mengembangkan bidang ilmu baru ini, Arif Satria menulis buku Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir. Dalam buku tersebut Arif Satria membahas karakteristik sosial

masyarakat pesisir, struktur sosial masyarakat pesisir, perubahan sosial masyarakat pesisir, konflik-konflik masyarakat pesisir, dan ekonomi masyarakat pesisir.

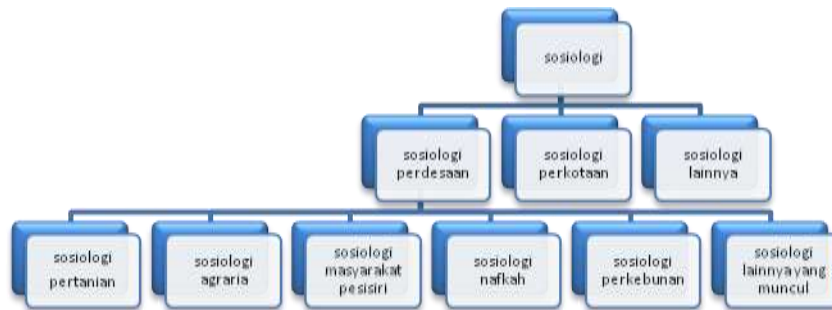
3. Sosiologi Agraria

Lahan merupakan salah barang yang langka di bumi ini. Kelangkaan lahan ini memunculkan persaingan, bahkan konflik di antara pemangku kepentingan. Realitas ini menjadi kajian menarik bagi ilmuwan sosiologi. Sosiologi agraria tidak saja membicarakan konflik lahan yang melibatkan masyarakat adat, negara, dan pebisnis, tetapi juga membicarakan tentang bagaimana konstruksi hukum adat, hukum negara, praktek penggunaan lahan dalam kehidupan sehari-hari. Konstruksi sosiologi agraria di Indonesia telah diletakkan fondasinya oleh Sediono M.P. Tjondronegoro, melalui bukunya *Sosiologi Agraria*, yang diedit oleh M.T. Felix Sitorus dan Gunawan Wiradi. Di samping itu, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas telah berkembang studi sosiologi agraria, seperti Afrizal melalui bukunya “*Sosiologi Konflik Agraria*” mengembangkan sosiologi agraria dengan memokuskan kajian pada konflik agraria, Azwar dengan bukunya “*Eksistensi Tanah Ulayat Kaum dan Dinamika Relasi Sosial Masyarakat Minangkabau di Wilayah Pinggiran Kota*”, yang mengkaji tanah ulayat pada masyarakat pinggiran kota.

4. Sosiologi Nafkah

Sosiologi nafkah sebagai cabang sosiologi perdesaan dikembangkan di Indonesia oleh Arya Hadi Dharmawan, sosiolog dari Institut Pertanian Bogor. Sosiologi nafkah atau sosiologi penghidupan merupakan studi tentang keseluruhan hubungan antara manusia, sistem sosial, dengan sistem penghidupannya. Ia mempelajari “proses manipulasi sosio-ekonomi atas berbagai sumber penghidupan (*livelihood sources*) dan proses penyusunan mekanisme bertahan hidup yang diterapkan oleh seseorang atau kelompok orang (rumah tangga) ataupun keseluruhan sebuah komunitas” (2007: 175-176). Studi tentang sosiologi nafkah telah diteroka oleh Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo dalam berbagai studi tentang strategi masyarakat desa dan kaum wanita dalam mencari nafkah.

Percabangan sosiologi perdesaan melalui tumbuh-kembangnya bidang kajian sosiologi baru tidak akan terelakkan di masa akan datang. Hal itu terlihat dengan munculnya bidang kajian baru yang menarik bagi para sosiolog seperti fenomena perkebunan yang memungkinkan munculnya sosiologi perkebunan. Juga fenomena menarik lainnya bagi para sosiolog adalah strategi kehidupan masyarakat perdesaan di tepi hutan. Kenyataan ini memungkinkan merupakan bibit bagi tumbuhnya sosiologi masyarakat perhutanan. Berikut ilustrasi gambar percabangan sosiologi perdesaan yang sedang dan akan berkembang di masa akan datang.



Gambar 2.2. Percabangan Sosiologi Perdesaan

Perkembangan kajian sosiologi perdesaan di Indonesia berbeda dengan Jerman, Amerika, atau masyarakat Barat lainnya. Sepanjang masyarakat adat beserta hukum adat masih dipertahankan keberadaannya, maka sepanjang itu pula kajian sosiologi perdesaan tetap menarik, karena keberadaan adat dan hukum adat tersebut membingkai cara pandang, bertindak dan berperilaku masyarakat, sehingga karakteristik perdesaannya dipertahannya. Hal inilah akan menyebabkan kajian sosiologi perdesaan menjadi lebih menarik karena tradisi dipertahankan dalam kehidupan kekinian.

Selain itu, argumen utama dan mendasar tentang revitalisasi sosiologi perdesaan adalah proses kehidupan dan relasi sosial. Tema yang selalu marak dan menarik bagi pengkaji ilmu-ilmu sosial dan humaniora adalah tentang kehidupan kota (*urban life*), yang tidak bisa dilepaskan perbandingannya dengan kehidupan desa (*rural life*). Proses kehidupan komunitas kota dan desa, kelihatannya, merupakan kajian ilmu sosial, termasuk sosiologi, selalu aktual dan menemukan berbagai dimensinya ketika ia dikaitkan dengan ruang. Ketika dasar, kualitas dan sifat hubungan antara manusia dikaitkan dengan ruang maka kajian sosiologi perdesaan dan sosiologi perkotaan akan tetap menjadi selalu hangat dan relevan sepanjang masa. Kenapa demikian? Kalau kita bersepakat bahwa manusia adalah makhluk sosial dan karenanya tidak bisa hidup tanpa hubungan dengan orang lain. Maka sepanjang hubungan sosial tersebut didasarkan oleh dua kehendak manusia (*Wille/will*) yang berbeda, yaitu *Wessenwille* (kehendak alamiah) dan *Kurwille* (kehendak rasional), seperti yang dinyatakan oleh Ferdinand Tönnies (pada Bab 1 dan akan didiskusikan lebih dalam pada Bab 3), dikaitkan dengan ruang, yaitu lokalitas (tempatan), maka sepanjang itu pula studi tentang sosiologi perdesaan dan sosiologi perkotaan akan tetap relevan dan menarik. Sehingga dengan berpikir seperti itu, dimungkinkan melihat realitas masyarakat desa di perkotaan dan sebaliknya masyarakat kota di perdesaan. Karena *Wessenwille* yang bercirikan kualitas hubungan masyarakat desa yang intim, pribadi, dan afeksi bisa muncul di perkotaan misalnya. Untuk memahami realitas ini mari kita pahami Herbert Gans dalam bukunya *The Urban Villager* (1962: 12) yang menulis:

Setelah hidup beberapa pekan di West End (di Boston), pengamatan dan persepsi saya tentang daerah itu, berubah drastis. Saat saya mencari suatu apartemen, saya dengan cepat menyadari bahwa bagian dalam dari ruangan apartemen biasanya berada dalam keadaan yang lebih baik daripada bagian luar atau lorong dalam bangunannya. Setelah itu, ketika berjalan-jalan di sepanjang West End, saya mengembangkan semacam persepsi selektif di mana mata saya hanya berfokus pada bagian daerah yang digunakan oleh orang. Bangunan kosong dan toko yang tertutup papan tidak lagi tampak dan juga gang atau jalan yang sangat jarang dilalui, baik oleh saya maupun oleh orang West End...

Karena banyak kehidupan di daerah itu berlangsung di jalanan, saya dengan cepat mengenali orang sekitar. Saya bertemu dengan tetangga dan di depan bangunan saya. Dan, selanjutnya saya mengembangkan suatu pola belanja yang tetap, saya sering bertemu dengan pelayan toko yang sama, maupun "oknum-oknum" di daerah itu yang tiap harinya berjalan-jalan melalui suatu rute dan jadwal yang teratur. ... Singkat cerita, saya menemukan orang secara rutin mengunjungi kerabat dan terlibat dalam suatu jaringan pertemanan dan perkenalan.

Apa yang dikemukakan oleh Gans tersebut menunjukkan adanya komunitas desa di perkotaan. Realitas ini merupakan kajian interdisipliner antara sosiologi perdesaan dan sosiologi perkotaan, sebagaimana pula studi tentang masyarakat suburban atau periferi.

Kehendak (*wille/will*) manusia sebagai landasan perbedaan antara desa dan kota, dipertajam dengan ciri berikutnya yaitu keberadaan ekonomi pasar. Karakteristik ekonomi pasar, sebagai pembeda antara desa dan kota, muncul melalui perdagangan jarak jauh, yaitu suatu bentuk perdagangan eksternal. Perdagangan eksternal ini mendorong tumbuhkembangnya suatu lokalitas yang mengakomodasikan *kurwille* (kehendak rasional) dalam kehidupan komunitas secara mayoritas. Kehendak rasional seperti meraih keuntungan, mengakumulasi modal, dan seterusnya akan mendorong individu untuk meraih apa yang dia mau tanpa batas dalam suatu lokalitas “baru”, dikenal dengan kota, yang dibangun atas dasar permintaan dan penawaran terhadap suatu barang dan jasa. Komunitas ini berbeda sama sekali dengan komunitas yang dikonstruksi berdasarkan *wissenwille* (kehendak alamiah), yaitu dicirikan dengan karakteristik yang intim, pribadi, dan afeksi. Karakteristik *wissenwille* ini menghambat atau paling tidak memperlambat berkembangnya ekonomi pasar. Realitas seperti inilah yang didiskusikan dalam tulisan Clifford Geertz tentang involusi pertanian, James C. Scott tentang ekonomi moral petani dan resistensi petani, Hans-Dieter Evers tentang ekonomi moral pedagang, Samuel L. Popkin tentang ekonomi rasional petani, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, sosiologi perdesaan, sebagaimana sosiologi perkotaan, masih tetap relevan dikaji di perguruan tinggi di Indonesia. Tentunya dengan merevitalisasi pokok bahasan dari sempit dan parsial menjadi lebih luas dan holistik sehingga sosiologi perdesaan mengalami tumpangtindih kajian yang sangat banyak dengan berbagai cabang sosiologi lainnya seperti sosiologi perkotaan, sosiologi politik, sosiologi ekonomi, sosiologi pendidikan, sosiologi keluarga, sosiologi kebudayaan, dan lainnya.

Bahasan kajian sosiologi perdesaan dalam buku ini mencakup semua aspek masyarakat perdesaan, sehingga bisa tumpangtindih dengan kajian sosiologi politik, sosiologi pendidikan, sosiologi keluarga, sosiologi kebudayaan, dan sosiologi lainnya. Di samping itu, juga pembahasan kajian dalam buku ini termasuk di dalamnya sosiologi pertanian, sosiologi agraria, sosiologi masyarakat pesisir, sosiologi masyarakat perhutanan, sosiologi perkebunan, dan yang lainnya.

Apa yang dikemukakan tentang cakupan kajian sosiologi pedesaan dan munculnya percabangan sosiologi pedesaan, sebenarnya telah menjadi perbincangan luas di kalangan ahli sosiologi pedesaan di Institut Pertanian Bogor seperti berbagai tulisan Prof. Dr. Sajogyo yang dirangkum dalam buku “Ekososiologi: Deideologi Teori, Restrukturasi Aksi” dan Prof. Dr. Sediono M.P. Tjondronegoro yang tersaji dalam buku “Ranah Kajian Sosiologi Pedesaan”. Sajogyo membangun cakupan bidang sosiologi pedesaan relatif cukup luas antara lain pembangunan pedesaan, kemiskinan, pendidikan penyuluhan, transmigrasi, industrialisasi desa, revolusi hijau, dan peningkatan gizi. Sedangkan Tjondronegoro mendiskusikan berbagai topik pembangunan pedesaan, agraria, kelembagaan, kependudukan dan lingkungan hidup, kemiskinan di pedesaan, perubahan sosial, dan metodologi penelitian pedesaan.

BAB 4

SISTEM SOSIAL BUDAYA

MASYARAKAT PERDESAAN

A. PENGERTIAN SISTEM SOSIAL BUDAYA

Dalam bagian ini didiskusikan berbagai definisi atau pengertian tentang sistem, sosial, budaya, sistem sosial, sistem budaya, dan sistem sosial budaya. Semua definisi atau pengertian tersebut ditelusuri pada pengertian kamus dan para ahli.

1. Pengertian Sistem

Secara etimologis, menurut bahwa kata sistem merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *systema*, *systematos*, yang berasal dari kata *synistani*. Sedangkan kata *synistani* terdiri dari 2 suku kata, yaitu *syn* dan *hystanat*. Sedangkan kata *syn* bermakna bersama; sedangkan *hystanat* memiliki arti sebagai menempatkan. Jadi *synistani* memiliki pengertian sebagai menempatkan bersama. Sedangkan berdasarkan penelusuran etimologis Tatang Amirin (2003) menyimpulkan bahwa *systema* memiliki pengertian berikut: (1) suatu hubungan yang tersusun atas sekian banyak bagian, dan (2) hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen-komponen secara teratur. Jadi, *systema* itu mengandung arti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan.

Pengertian sistem dapat juga dipahami dengan menemukan arti atau makna dari kamus. Jika ditelusuri pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, ditemukan bahwa kata sistem memiliki 3 arti, yaitu: satu, perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Dua, susunan teratur dari pandangan, teori, asas, dsb. Tiga, metode.

Apa yang dapat disimpulkan dari pengertian kamus dari sistem? Dari penelusuran etimologis kata sistem dan pengertian kamusnya dapat dipahami bahwa sistem

merupakan “suatu keteraturan hubungan antar unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga membentuk totalitas”.

Sedangkan beberapa ahli telah membahas tentang konsep sistem dan memberi batasan tentang sistem, yaitu antara lain:

a. Winardi

Pengertian sistem dikemukakannya dalam bukunya *Pengantar tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem*. Adapun pemikiran Winardi sebagai berikut: “sistem merupakan suatu kelompok elemen-elemen yang interdependen yang antar berhubungan atau yang saling mempengaruhi satu sama lain. Sistem merupakan suatu konglomerat hal-hal tertentu yang secara keseluruhan membentuk suatu keseluruhan yang menyatu.”

b. Gabriel A. Almond

Gabriel A. Almond, (1981: 2) menulis definisi sistem pada bab “*Studi Perbandingan Sistem Politik*” dalam buku *Perbandingan Sistem Politik* yang diedit oleh Mochtar Mas’oed dan Collin MacAndrews. Adapun pandangan Almond sebagai berikut: “sistem diartikan sebagai suatu konsep ekologis yang menunjukkan adanya suatu organisasi yang berinteraksi dengan suatu lingkungan, yang mempengaruhinya maupun dipengaruhi.”

c. Robert M.Z. Lawang

Dalam buku modul Universitas Terbuka, *Sistem Sosial Indonesia*, Robert M.Z. Lawang (1985: 3-5) menjelaskan definisi sistem. Adapun inti gagasan tentang sistem Lawang sebagai berikut: “suatu saling ketergantungan antara satu komponen dengan komponen lainnya dalam hubungan timbal-balik yang konstan. Konstan artinya apa yang terjadi kemarin merupakan perulangan dari yang sebelumnya, dan besok akan diulang kembali dengan cara yang sama. Dan karena sifatnya yang sifat konstan itulah, maka pola hubungan interaksi itu memiliki sistem tertentu.”

Apa yang dapat kita simpulkan dari pandangan para ahli tentang konsep sistem tersebut? Dari pandangan ketiga ahli tersebut, dengan memperhatikan titik perhatian masing-masing tokoh, dapat disimpulkan bahwa “sistem merupakan suatu kelompok

elemen-elemen yang saling berhubungan secara interdependen (saling ketergantungan) dan konstan”

2. Pengertian Sosial

Kata sosial kalau dirujuk asal usulnya, salah satunya, dapat berakar dari kata Latin, yaitu *socius*, yang berarti bersama-sama, bersatu, terikat, sekutu, berteman; atau kata *socio* yang bermakna menyekutukan, menjadikan teman, mengikat atau mempertemukan. Dari pengertian dua kata tersebut maka sosial dapat dipahami sebagai pertemanan atau masyarakat.

Sedangkan apabila ditelusuri pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, ditemukan bahwa kata sistem memiliki 2 arti, yaitu: satu, berkenaan dengan masyarakat. Dua, suka memperhatikan kepentingan umum (suka menolong, menderma, dsb), dalam bentuk ragam cakapan.

Berdasarkan penelusuran etimologis dan pengertian kamusnya dapat disimpulkan bahwa kata sosial dimengerti sebagai sesuatu yang dihubungkan atau dikaitkan dengan teman, pertemanan, atau masyarakat.

Selanjutnya dari hasil penelusuran pengertian kata sosial dari perspektif ahli ditemukan seorang sosiolog yang membahas tuntas makna kata tersebut yaitu Robert M.Z. Lawang (1985a:7) dalam buku modul Universitas Terbuka, *Pengantar Sosiologi*. Lawang mengemukakan pandangannya tentang pengertian kata sosial sebagai berikut: “arti subjektif yang memperhitungkan perilaku orang lain yang terlibat dalam suatu tindakan. Arti subjektif menunjuk pada arti yang diberikan oleh orang yang bertindak untuk tindakannya sendiri”

3. Pengertian Sistem Sosial

Pengertian sistem dan sosial telah didiskusikan sebelumnya secara terpisah atau sendiri-sendiri. Pada bagian ini dicoba untuk memahami secara utuh kedua konsep tersebut. Pada pengertian kamus, baik pengertian yang berdasarkan penelusuran etimologis maupun merujuk pada kamus, tidak ditemukan penjelasan kata sistem sosial sekali gus. Oleh sebab itu, kedua pengertian tersebut, baik penelusuran etimologis

maupun rujukan kamus, disatukan untuk dipahami makna atau artinya secara keseluruhan. Apabila kedua makna kata-kata tersebut dipahami secara keseluruhan, maka sistem sosial bisa dipahami sebagai saling keterkaitan yang teratur antar individu sehingga membentuk totalitas. Definisi sistem sosial seperti ini mencakup berbagai fenomena: mulai dari persahabatan sampai pada masyarakat, mulai dari kelompok kelompok sampai pada negara. Kenapa hubungan persahabatan antara dua orang individu, katakanlah antara Inas dan Tsabita, bisa dikatakan sebagai sistem sosial? Sebab hubungan yang terjalin antara Inas dan Tsabita membentuk suatu saling keterkaitan secara teratur antara individu dan individu sebagai suatu totalitas, yang dikenal sebagai persahabatan.

Berbeda dari pengertian kamus, pada pengertian ahli ditemukan pandangan berbagai ahli tentang konsep sistem sosial. Berikut dikemukakan beberapa pengertian berbagai ahli tentang konsep sistem sosial tersebut:

a. Robert M.Z. Lawang

Dalam buku modul Universitas Terbuka, *Pengantar Sosiologi*, Robert M.Z. Lawang (1985a: 56) menjelaskan definisi sistem sosial. Adapun inti gagasan Lawang tentang sistem sosial sebagai berikut: “sejumlah kegiatan atau sejumlah orang yang hubungan timbal-baliknya kurang lebih bersifat konstan.”

b. Talcott Parsons

Pemikiran Parsons tentang sistem telah didiskusikan pada Bab 2. Sekedar mengingat kembali bahwa Parsons menjelaskan ada empat persyaratan fungsional yang dibutuhkan oleh suatu sistem, yaitu: Adaptation/adaptasi (A), Goal attainment/pencapaian tujuan (G), Integration/integrasi (I), dan Latent pattern maintenance/pola pemeliharaan laten (L). Prasyarat fungsional adaptasi (A) merupakan suatu kebutuhan sistem untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dihadapinya. Goal attainment/pencapaian tujuan (G) merupakan prasyarat fungsional yang menentukan tujuan dan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang ada. Prasyarat fungsional integrasi (I) adalah suatu kebutuhan sistem yang dapat mengkoordinasikan dan menciptakan kesesuaian antar bagian-bagian atau anggota-anggota dalam suatu sistem. Sedangkan latent pattern maintenance/pola

pemeliharaan laten (L) adalah prasyarat fungsional yang dibutuhkan sistem untuk menjamin kesinambungan tindakan dalam sistem sesuai dengan beberapa aturan atau norma-norma.

Dalam melihat sistem sosial, buku ini mempertimbangkan kritik Robert K. Merton terhadap teori sistem. Ada 3 postulat yang dikritik Merton. Satu, postulat kesatuan fungsional masyarakat. Postulat ini meyakini bahwa semua pola tindakan atau institusi sosial dalam masyarakat berhubungan secara harmonis dan menyumbang kesatuan masyarakat atau sistem sosial. Menurut Merton dalam kenyataan tidak selalu seperti yang digambarkan postulat tersebut. Sebab selain ia memiliki fungsi, juga bisa terjadi disfungsi atau non fungsi. Disfungsi menunjuk pada berkurang atau mengecilnya fungsi suatu institusi sosial sehingga dapat menghancurkan sistem sosial secara keseluruhan. Sedangkan konsep non fungsi menunjuk pada tidak relevannya lagi suatu institusi sosial untuk menunjang pada integrasi sistem sosial. Dua, postulat fungsionalisme universal. Postulat ini melihat bahwa “seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif”. Seperti argumentasi kritik Merton di atas bahwa ternyata bentuk sosial dan kebudayaan tidak hanya memiliki fungsi positif, tetapi juga fungsi negatif (disfungsi) atau non fungsi. Oleh sebab itu, dalam analisis sosiologi perlu menimbang antara fungsi positif dan fungsi negatif. Cara ini dikenal sebagai keseimbangan konsekuensi-konsekuensi fungsional. Tiga, postulat *indispensability*. Postulat ini menyatakan bahwa “dalam setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan, ide, obyek materil, dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem secara keseluruhan”. Dalam kenyataan suatu item yang fungsional dapat digantikan oleh unsur lain, sehingga kebutuhan fungsional tetap terpenuhi.

Dengan menggunakan pendekatan Parsons, misalnya, agama memiliki fungsi untuk mempertahankan dan meningkatkan integrasi sosial, mengembangkan semangat altruistik dan menguatkan solidaritas sosial. Namun dalam kenyataan, fungsi agama tidak selalu demikian. Agama sepanjang sejarah ternyata juga menciptakan konflik dan membawa perpecahan. Hal ini yang dikritik oleh Merton. Menurut Merton, seperti dikemukakan di atas, fungsi terdiri dari dua jenis, yaitu fungsi manifest dan fungsi latent.

Fungsi manifest berkaitan dengan konsekuensi objektif yang disengaja atau dimaksudkan (*intended*) dan diketahui atau diakui (*recognized*). Dengan demikian, apabila agama memiliki fungsi integrasi bagi suatu sistem sosial maka penganut agama tersebut mempunyai maksud yang disengaja dan diakui untuk menjadikan agama tersebut sebagai pemersatu atau memiliki fungsi integratif. Tetapi dalam realitas, sering terjadi perpecahan dan konflik antar pemeluk agama, malah tidak jarang inter pemeluk suatu agama. Konflik antar atau inter agama tersebut biasanya tidak disengaja, tidak dimaksudkan, dan tidak diharapkan terjadi. Fungsi seperti ini dikenal sebagai fungsi latent dari agama.

Bagaimana posisi buku ini tentang konsep sistem sosial? Setelah mendiskusikan berbagai konsep yang ada dari berbagai sudut pandang, sudut kamus/etimologi dan ahli, maka sistem sosial dalam buku ini dimengerti sebagai saling keterkaitan yang teratur atau konstan antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, serta antara kelompok dan kelompok sehingga membentuk totalitas.

4. Pengertian Budaya

Seperti halnya membicarakan pengertian sistem dan sosial, pengertian budaya juga dicoba dipahami melalui pengertian kamus dan pengertian ahli. Budaya, secara etimologis dan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu buddayah, bermakna budi, akal, dan pikiran. Jika budaya dilengkapi awalan ke dan akhiran an sehingga menjadi kebudayaan maka maknanya adalah hal-hal yang berkaitan dengan budi, akal dan pikiran. Sedangkan budaya jika dirujuk pada bahasa asing, bahasa Latin misalnya, berakar dari kata *colere*, berarti mengolah atau mengerjakan, dalam hal ini mengolah tanah atau bertani. Kata tersebut berkembang menjadi *culture*, dalam bahasa Inggris misalnya, bermakna segala kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam (Koentjaraningrat, 1965).

Pada bab 1 kita telah membahas dua pengertian ahli tentang kebudayaan, yaitu Sir Edward Tylor serta P.B. Horton dan C.L. Hunt. Sekedar untuk mengingatkan maka berikut ini ditampilkan lagi definisi mereka tentang kebudayaan. Taylor mendefinisikan kebudayaan sebagai kompleks keseluruhan dari pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan semua kemampuan dan kebiasaan yang lain yang

diperoleh oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Sedangkan Horton dan Hunt (1987: 58) mendefinisikan kebudayaan sebagai segala sesuatu yang dipelajari dan dialami bersama secara sosial oleh para anggota suatu masyarakat.

5. Pengertian Sistem Budaya

Tetap konsisten dengan cara pemahaman di atas, bagian ini juga akan menelusuri batasan sistem budaya melalui pengertian kamus dan ahli. Pada pengertian kamus tidak ditemukan penjelasan kata sistem budaya sekali gus. Oleh sebab itu, kedua pengertian tersebut, baik penelusuran etimologis maupun rujukan kamus, disatukan untuk dipahami makna atau artinya secara keseluruhan. Apabila kedua makna kata-kata tersebut dipahami secara keseluruhan, maka sistem budaya bisa dipahami sebagai suatu keteraturan hubungan antar unsur-unsur atau bagian-bagian yang berhubungan dengan segala kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam sehingga membentuk totalitas.

Koentjaraningrat dkk (2003) merumuskan sistem budaya sebagai rangkaian gagasan, konsepsi, norma, adat-istiadat yang menata tingkahlaku manusia dalam masyarakat dan yang merupakan wujud ideologis kebudayaan.

Bagaimana posisi penulis buku ini tentang konsep sistem budaya? Setelah mendiskusikan berbagai konsep yang ada dari berbagai sudut pandang, sudut kamus/etimologi dan ahli, maka sistem budaya dalam tulisan ini dipahami sebagai suatu keteraturan hubungan antar unsur-unsur atau bagian-bagian, (meliputi gagasan, nilai dan norma), yang berhubungan dengan segala kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam, baik sebagai sesuatu yang dipelajari, dialami, maupun dibangun bersama secara sosial oleh para anggota suatu masyarakat, sehingga membentuk totalitas.

6. Hubungan Sistem Sosial dan Sistem Budaya

Sistem apa yang mengatur tindakan manusia? Parsons melihat bahwa sistem yang mengatur tindakan manusia adalah sistem tindakan. Suatu sistem tindakan terdiri dari sistem budaya, sistem sosial, sistem kepribadian, dan sistem organisme perilaku.

Tabel 4.1. Sistem Tindakan dan Persyaratan Fungsional

Sistem Tindakan	Persyaratan Fungsional
Sistem Budaya	Pemeliharaan pola laten
Sistem Sosial	Integrasi
Sistem Kepribadian	Pencapaian tujuan
Sistem Organisme Perilaku	Adaptasi

Sistem budaya mengemban fungsi pemeliharaan pola laten, karena sistem ini mengembangkan nilai dan norma budaya yang dilembagakan dalam sistem sosial. Sementara sistem sosial menjaga fungsi integrasi, karena sistem ini mengkoordinasikan dan menciptakan kesesuaian antar bagian-bagian atau anggota-anggotanya. Sedangkan sistem kepribadian menyanggah fungsi pencapaian tujuan, karena sistem ini mengarahkan individu untuk meraih tujuan individu yang tidak berseberangan atau bertentangan dengan orientasi bersama. Terakhir, sistem organisme perilaku memelihara fungsi adaptasi, karena masalah adaptasi ditentukan sebagian besar oleh sifat-sifat biologis individu sebagai organisme yang berperilaku dengan persyaratan biologis dasar tertentu yang harus dipenuhi oleh mereka supaya tetap hidup.

Dari penjelasan Parsons tersebut di atas, antara sistem sosial dan sistem budaya memperlihatkan suatu hubungan yang saling ketergantungan antara satu sama lainnya. Demikian pula dengan dua sistem lainnya, yaitu sistem kepribadian dan sistem organisme perilaku. Sistem budaya merupakan abstraksi dari sistem sosial. Gejalanya hanya dapat ditangkap pada gejala sistem sosialnya saja, baik pada masyarakat sebagai keseluruhan maupun pada perseorangan sebagai produk dari masyarakatnya (Rahman dan Yuswadi, 2005: 8).

7. Pengertian Sistem Sosial Budaya

Rahman dan Yuswadi (2005: 15) memberi batasan sistem sosial budaya sebagai suatu bentuk kompleksitas perilaku masyarakat yang relatif konstan dan dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat karena bersumber dari nilai-nilai budaya yang telah menjadi bagian pola hidup kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sedangkan buku ini memberikan batasan sistem sosial budaya sebagai saling keterkaitan yang teratur atau konstan antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, serta antara kelompok dan kelompok dalam hubungannya dengan segala kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam, baik sebagai sesuatu yang dipelajari, dialami maupun dibangun bersama secara sosial, meliputi gagasan, nilai dan norma, oleh para anggota suatu masyarakat, sehingga membentuk totalitas.

B. MASYARAKAT PERDESAAN SEBAGAI SUATU SISTEM

Sesuai dengan cara pandang paradigmatis Ritzer, konsep masyarakat dapat pula dibagi pengertiannya dalam 3 sudut pandang: yaitu masyarakat pedesaan sebagai sistem sosial, sistem interaksi, dan sistem pertukaran sosial. Dengan kata lain, perspektif dalam melihat masyarakat sebagai suatu sistem berbeda dari berbagai sudut pandang. Hal itu bisa dipahami lewat gambar 4.1. di mana dari sudut yang berbeda akan memperoleh perspektif yang berbeda dalam melihat masyarakat sebagai sistem.



Gambar 4.1. Masyarakat Pedesaan Sebagai Sistem

1. Masyarakat Perdesaan Sebagai Sistem Sosial

Seperti telah didiskusikan di atas bahwa sistem sosial merupakan saling keterkaitan yang teratur atau konstan antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, serta antara kelompok dan kelompok sehingga membentuk totalitas. Masyarakat dipandang suatu sistem sosial bila terdapat bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan dan ketergantungan antara satu sama lain. Dalam masyarakat bisa dilihat terdiri dari beberapa sub-sistem seperti sub sistem keluarga, pendidikan, ekonomi, agama, dan lainnya. Kesemua sub sistem tersebut saling berhubungan dan ketergantungan satu sama lain sehingga membentuk suatu keseluruhan. Setiap bagian-bagian atau unsur-unsur dari pembentuk sistem sosial memiliki fungsi. Misalnya keluarga sebagai sub sistem dari masyarakat, termasuk masyarakat perdesaan, sebagai sistem sosial memiliki beberapa fungsi. Menurut Horton dan Hunt (1987: 274-279) keluarga memiliki fungsi: satu, fungsi pengaturan seksual, yaitu bagaimana keluarga sebagai wahana bagi masyarakat untuk mengatur dan mengorganisasikan kepuasan keinginan seksual; Dua, fungsi reproduksi, yaitu keluarga sebagai wahana untuk “memproduksi” anak; Tiga, fungsi sosialisasi, yaitu keluarga merupakan tempat pertama bagi anak mempelajari nilai, norma dan peranan; Empat, fungsi afeksi, yaitu bagaimana keluarga memberikan kebutuhan afeksi berupa kasih sayang, cinta, atensi, dan sejenisnya kepada para anggotanya; Lima, fungsi penentuan status, yaitu seseorang mewarisi status dari keluarganya; Enam, fungsi perlindungan, yaitu keluarga memberikan perlindungan fisik, ekonomik, dan psikologis bagi seluruh anggotanya; Tujuh, fungsi ekonomi, yaitu terutama keluarga sebagai unit ekonomi dasar. Kesemua fungsi keluarga tersebut dipahami memberikan sumbangan positif bagi keberlangsungan dan bertahannya suatu masyarakat.

2. Masyarakat Perdesaan Sebagai Sistem Interaksi

Apakah itu sistem interaksi? Seperti telah didiskusikan di atas, konsep sistem dipahami sebagai sekumpulan dari bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan dalam ketergantungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan konsep interaksi (sosial) diartikan di sini sebagai suatu tindakan

timbal-balik antara dua orang atau lebih melalui suatu kontak dan komunikasi. Dari penjelasan konsep sistem dan interaksi (sosial) di atas dan bab terdahulu, diulang lagi, bahwa sistem interaksi (sosial) merupakan suatu tindakan timbal-balik atau saling berhubungan antara dua orang atau lebih melalui suatu kontak dan komunikasi dalam ketergantungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Dari definisi tersebut maka dalam masyarakat perdesaan terdapat berbagai macam sistem interaksi seperti hubungan persahabatan, hubungan sedukuh/sedusun, hubungan sesuku/semarga/seklan, hubungan suami-istri, dan hubungan pacaran misalnya, juga dapat dipandang sebagai suatu masyarakat. Sebab persahabatan, hubungan suami-istri, hubungan sedukuh/sedusun, hubungan sesuku/semarga/seklan, dan hubungan pacaran merupakan suatu interaksi sosial, di mana dalam konsep persahabatan, hubungan suami-istri dan pacaran mengandung suatu tindakan timbal-balik antara dua orang atau lebih melalui suatu kontak dan komunikasi. Di samping itu persahabatan, hubungan suami-istri, hubungan sedukuh/sedusun, hubungan sesuku/semarga/seklan, dan hubungan pacaran dapat dipandang sebagai suatu sistem, yaitu sebagai sekumpulan dari bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan dalam ketergantungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Oleh karena itu pula persahabatan, hubungan suami-istri, hubungan sedukuh/sedusun, hubungan sesuku/semarga/seklan, dan hubungan pacaran dapat dilihat sebagai sistem interaksi (sosial).

Untuk pemahaman lebih dalamnya, mari kita menilik pada hubungan suami-istri sebagai sistem interaksi. Hubungan suami-istri terdiri dari dua individu yang terikat pada suatu ikatan pernikahan. Sebelum mereka membentuk hubungan suami-istri, sebagai individu, masing-masing mereka memiliki motif, keinginan, kepentingan, kebutuhan dan orientasi sendiri tentang berbagai macam hal. Pada masa awal pernikahan, hubungan antara mereka, sebagai suami dan istri, sedang mengalami penajakan pembentukan pola. Masing-masing individu memberikan sinyal, tanda, persepsi, sikap, dan tindakan tentang sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan hubungan mereka berdua. Setelah masa penajakan berakhir, secara perlahan, muncul pola hubungan antara berdua. Dalam pola hubungan antara mereka berdua, tidak semua motif, keinginan, kepentingan, kebutuhan dan orientasi yang dimiliki oleh masing-masing individu tercakup dalam pola tersebut. Namun ketika suatu pola hubungan suami-istri telah terbentuk maka ia menjadi milik

bersama dan menjadi rujukan dalam perilaku dan tindakan masing-masing individu. Dalam pola hubungan tersebut berisi berbagai “kesepakatan”, seperti tentang anak, keuangan, pekerjaan, dan sebagainya. Dalam “kesepakatan” tersebut terkandung prinsip bahwa bahwa mereka memiliki saling ketergantungan satu sama lain, antara suami dan istri, dalam menjalani roda kehidupan. Pola hubungan tersebut juga menjadi pengontrol perilaku masing-masing. Pola hubungan tersebut dilihat sebagai sistem interaksi.

3. Masyarakat Perdesaan Sebagai Sistem Pertukaran

Dalam melihat masyarakat sebagai sistem pertukaran, masyarakat, termasuk masyarakat perdesaan, dipandang terdiri dari bagian-bagian (individu atau kelompok individu) yang saling ketergantungan dalam suatu pertukaran yang terpolas. Dengan kata lain, bagian-bagian, unsur-unsur atau item-item memiliki ketergantungan terhadap suatu pertukaran yang terus-menerus dan ajek. Pertukaran dilakukan karena bagian-bagian, dalam hal ini individu-individu, dilihat sebagai makhluk yang rasional, dia memperhitungkan untung rugi. Suatu sistem bertahan apabila semua unsur pembentuk sistem memperoleh untung atau minimal tidak mendapatkan kerugian. Kenyataan bahwa keuntungan tidak selalu bersifat ekstrinsik tetapi juga bisa bersifat intrinsik. Jika ada bagian atau unsur pembentuk sistem mengalami kerugian, maka diperkirakan sistem tidak bisa terbentuk atau apabila sistem telah ada maka bisa jadi sistem akan bubar.

Mari kita pahami lebih dalam dengan contoh hubungan suami-istri. Melalui cara pandang masyarakat sebagai sistem pertukaran, kita bisa melihat bahwa hubungan suami-istri sebagai suatu sistem pertukaran. Hubungan suami-istri sebagai suatu sistem pertukaran terbentuk apabila unsur-unsur atau item-item, dalam hal ini suami dan istri, memiliki ketergantungan terhadap suatu pertukaran yang terus-menerus dan ajek. Dalam sistem pertukaran, suami dan istri dipandang mempunyai ketergantungan satu sama lain dalam rangka memperoleh keuntungan, baik bersifat ekstrinsik berupa materi dan benda maupun intrinsik berupa perhatian, cinta dan kasih sayang. Apakah sistem pertukaran bisa bubar? Bisa! Melalui perspektif masyarakat sebagai sistem pertukaran, perceraian bisa terjadi apabila salah satu pihak tidak hanya tidak memperoleh manfaat dan keuntungan tetapi juga kerugian dari hubungan suami-istri yang mereka bisa selama ini.

Banyak hubungan yang terjadi dalam masyarakat perdesaan merupakan sistem pertukaran, misalnya sistem pertukaran patron dan klien antara petani dan pedagang, antara tuan tanah dan petani penggarap, antara kepala desa dan warga desa, dan sebagainya. Relasi pertukaran inilah menjadikan masyarakat perdesaan sebagai sistem pertukaran.

C. SISTEM SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PERDESAAN

Pada bab sebelumnya, kita telah membahas lebih dalam tentang definisi atau batasan dari masyarakat perdesaan. Sedangkan definisi sistem sosial budaya telah kita bahas secara mendalam pada bagian atas. Sehingga melalui definisi tersebut, kita memahami konsep sistem sosial budaya masyarakat perdesaan sebagai saling keterkaitan yang teratur atau konstan antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, serta antara kelompok dan kelompok dalam hubungannya dengan segala kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam, baik sebagai sesuatu yang dipelajari, dialami, dan dibangun bersama secara sosial, meliputi gagasan, nilai dan norma, oleh para anggota suatu masyarakat, sehingga membentuk totalitas, yang berada di wilayah luar kota (perkotaan).

Ada unsur penting yang perlu menjadi fokus perhatian kita membahas sistem sosial budaya masyarakat perdesaan yaitu gagasan, nilai dan norma yang dipelajari, dialami, dan dibangun bersama secara sosial.

1. Gagasan

Gagasan merupakan suatu konstruksi pemikiran yang dibangun secara sosial di antara pengembangan kebudayaan dalam menyikapi lingkungan dan alam sekitarnya. Gagasan tersebut, pada akhirnya berujung menjadi, berupa nilai, norma, pengetahuan dan teknologi. Gagasan yang terpenting didiskusikan di sini adalah berupa kearifan lokal atau kearifan tradisi. Dalam studi sosiologi dan antropologi, kearifan lokal tercermin dari sistem pengetahuan dan teknologi lokal, yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan relasi mereka dengan alam sekitarnya.

Kearifan lokal dimiliki hampir setiap suku bangsa di Indonesia. Kearifan lokal tersebut masih menjadi bahagian yang tidak terlepas dari kebanyakan masyarakat desa di Indonesia. Hampir setiap suku bangsa Indonesia memiliki kearifan sosial berupa sistem pengetahuan dan teknologi lokal seperti subak di Bali, tanah ulayat di Minangkabau dan Papua, Jamu di Jawa dan Kalimantan, dan lain sebagainya. Kita akan kembali ke tema ini pada bab 7.

2. Nilai

Nilai adalah gagasan mengenai apakah suatu pengalaman berarti, berharga, bernilai dan pantas atau tidak berarti, tidak berharga, tidak bernilai dan tidak pantas. Gagasan seperti ini dikenal sebagai nilai. Nilai, oleh karena itu pula, berkait dengan ide yang dimiliki secara bersama tentang sesuatu itu baik atau buruk, diharapkan atau tidak diharapkan (William, 1970: 27). Misalnya, tidak ada persoalan apakah musik dangdut itu benar atau salah secara moral. Namun bagi orang tertentu mendengar alunan seruling dangdut dengan tembang “Begadang” merupakan pengalaman yang berharga, sedangkan bagi orang lain bisa saja sesuatu yang memuakkan dan dipandang cengeng.

Nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat perdesaan banyak. Namun dari sekian banyak nilai, yang relevan dengan diskusi tentang sistem sosial budaya masyarakat perdesaan adalah kepercayaan, resiprositas, dan rasa tanggungjawab.

a. Kepercayaan

Dalam terminologi sosiologi, konsep kepercayaan dikenal dengan *trust*. Definisi kepercayaan (*trust*) dalam Oxford English Dictionary dijelaskan sebagai *confidence in* yang berarti yakin pada dan *reliance on* yang bermakna percaya atas beberapa kualitas atau atribut sesuatu atau seseorang, atau kebenaran suatu pernyataan.

Bagaimana para teoritisi memberi batasan pada konsep kepercayaan? Torsvik (2000: 458), menyebutkan kepercayaan merupakan “kecenderungan perilaku tertentu yang dapat mengurangi risiko yang muncul dari perilakunya”. Konsep kepercayaan yang dikaitkan dengan risiko, juga dikemukakan oleh Luhmann (1979; 1988), suatu istilah yang hanya muncul pada zaman modern. Pengertian kepercayaan yang dikaitkan dengan risiko dikritik oleh beberapa teoritisi, salah satu di antaranya adalah Giddens (2005). Menurut Giddens (2005: 44) kepercayaan pada dasarnya terikat, bukan kepada risiko,

namun kepada berbagai kemungkinan. Kepercayaan selalu mengandung konotasi keyakinan di tengah-tengah berbagai akibat yang serba mungkin, apakah dia berhubungan dengan tindakan individu atau dengan beroperasinya sistem. Dalam kasus kepercayaan terhadap agen manusia, dugaan akan keyakinan melibatkan “kebaikan” (penghargaan) atau cinta kasih. Itulah mengapa kepercayaan kepada seseorang secara psikologis mengandung konsekuensi bagi individu yang percaya: sandera moral terhadap keberuntungan diserahkan. Jadi, apa batasan kepercayaan menurut Giddens? Kepercayaan, menurut Giddens (2005: 45), didefinisikan sebagai keyakinan akan reliabilitas seseorang atau sistem, terkait dengan berbagai hasil atau peristiwa, di mana keyakinan itu mengekspresikan suatu iman (*faith*) terhadap integritas atau cinta kasih orang lain, atau terhadap ketepatan prinsip abstrak (pengetahuan teknis).

Definisi kepercayaan yang tidak dikaitkan dengan risiko, juga dikemukakan oleh Zucker (1986). Zucker memberi batasan kepercayaan sebagai “seperangkat harapan yang dimiliki bersama-sama oleh semua yang berada dalam pertukaran”. Definisi Zucker tersebut dekat dengan batasan yang diberikan oleh Lawang. Menurut Lawang (2004: 36) kepercayaan merupakan “hubungan antara dua belah pihak atau lebih yang mengandung harapan yang menguntungkan salah satu pihak atau kedua belah pihak melalui interaksi sosial”. Selanjutnya Lawang (2004) menyimpulkan inti konsep kepercayaan sebagai berikut: (1) Hubungan sosial antara dua orang atau lebih. Termasuk dalam hubungan ini adalah institusi, yang dalam pengertian ini diwakili orang. (ii) Harapan yang akan terkandung dalam hubungan itu, yang kalau direalisasi tidak akan merugikan salah satu atau kedua belah pihak. (iii) Interaksi yang memungkinkan hubungan dan harapan itu berwujud.

Dari semua definisi di atas, dalam tulisan ini, lebih cocok menggunakan batasan yang diberikan oleh Giddens. Selain mencakup berbagai fenomena dan peristiwa kepercayaan, juga memiliki irisan dengan beberapa pendapat teoritis lain seperti Zucker dan Lawang, misalnya.

Dalam masyarakat perdesaan, Giddens menggunakan konsep masyarakat pra modern, ditemukan 4 lingkungan yang menumbuhkembangkan kepercayaan, yaitu hubungan kekerabatan, komunitas masyarakat lokal, kosmologi religius, dan tradisi. Pada masyarakat pra-modern hubungan kekerabatan merupakan konteks lingkungan

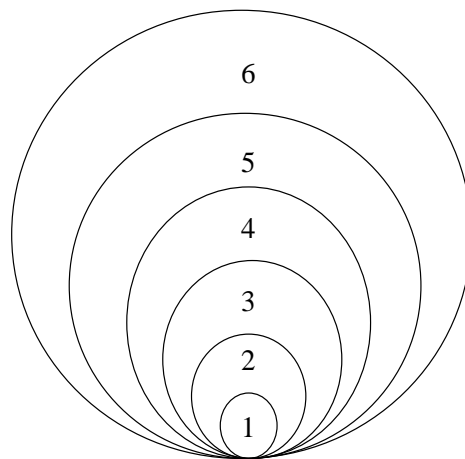
yang dapat menjadi asal muasal tumbuhkembangnya suatu kepercayaan. Hubungan kekerabatan menyediakan suatu mata rantai hubungan sosial yang dapat diandalkan yang, secara prinsip dan umum dilakukan, membentuk media pengorganisasian relasi kepercayaan (Giddens, 2005: 133). Dalam masyarakat Minangkabau, misalnya, memperlihatkan bahwa jaringan hubungan yang dibentuk oleh sistem kekerabatan matrilineal yang bermula dari hubungan semande, seperut, senenek, seninik, sekaum dan sesuku telah menjadi perekat hubungan sesama satu kerabat dan sebagai jembatan yang menghubungkan dengan kelompok, terutama kelompok luar. Hubungan kekerabatan Minangkabau yang menjadi perekat dan jembatan relasional tersebut, pada gilirannya, menerbitkan bibit kepercayaan, baik antara sesama kerabat maupun dengan kelompok luar. Berkembang atau tidaknya suatu bibit kepercayaan tergantung bagaimana aktor beserta jaringannya memelihara kepercayaan tersebut. Ketika seorang pemuda dari Galo Gandang¹ Rambatan Tanah Datar Sumatera Barat pergi merantau ke Tanah Abang Jakarta, misalnya. Pemuda tersebut akan pergi kepada jaringan kekerabatan matrilinealnya, yaitu hubungan kerabat semande, seperut, senenek, seninik, sekaum atau sesuku. Kepada kerabat semande, seperut, senenek, seninik, sekaum atau sesuku pemuda tersebut akan mengutarakan maksud kedatangannya ke Jakarta, biasanya, dengan membawa pesan (referensi atau rekomendasi) dari kampung halaman. Selanjutnya si pemuda diuji tentang kesahihan akan pesan (referensi atau rekomendasi) yang dibawanya tersebut. Setelah lulus dari uji kesahihan (referensi atau rekomendasi), biasanya si pemuda akan diberikan pekerjaan oleh salah satu jaringan kerabat matrilinealnya di Tanah Abang Jakarta. Berkembang atau tidaknya kepercayaan yang dimiliki si pemuda tergantung pada bagaimana dia mengelola kepercayaan dalam kaitannya dengan kerabat matrilinealnya. Beberapa indikator berkembang atau tidaknya suatu kepercayaan dapat dilihat dari ada atau tidaknya mobilitas sosial ekonomi ke atas atau peningkatan jenjang pekerjaannya (dari pelayan toko menjadi seorang pedagang mandiri, misalnya) atau jumlah hutang atau kredit yang diperoleh dari kerabat matrilinealnya untuk kegiatan perdagangan.

¹ Tanah Abang dikenal sebagai pusat perdagangan grosir di Indonesia. Salah satu etnis yang dominan dalam perdagangan di sini adalah Minangkabau. Sedangkan Galo Gandang merupakan salah satu daerah asal utama pedagang Minangkabau yang berdagang di Tanah Abang Jakarta.

Komunitas masyarakat lokal memberikan lingkungan yang baik bagi tumbuh kembangnya kepercayaan di masyarakat perdesaan. Dalam perspektif Giddens, komunitas masyarakat lokal tidak dikaitkan dengan romantisme budaya, tetapi lebih kepada arti penting dari relasi lokal yang diatur dalam konteks tempat, di mana tempat belum ditransformasi oleh relasi ruang-waktu yang berjarak. Oleh karenanya, Giddens melihat komunitas lokal sebagai tempat yang menyediakan suatu milieu yang bersahabat. Kembali pada contoh masyarakat Minangkabau, selain jaringan kekerabatan matrilineal juga jaringan komunitas lokal yang dapat menjadi konteks bagi tumbuh kembangnya kepercayaan. Jaringan sedusun, sekampung, sejong, senagari, seluhak dan seminangkabau merupakan jaringan komunitas masyarakat lokal yang ditarik dari komunitas terkecil sampai terbesar pada setting masyarakat Minangkabau. Konsep dusun dan kampung tidak bisa dibuat perbedaan secara tegas, namun dalam beberapa kelompok masyarakat Minangkabau melihat dusun merupakan kumpulan geografis lokalitas yang lebih kecil dan terpencil dibandingkan dengan kampung. Sehingga kumpulan beberapa dusun yang terpencil dan tersebar tersebut dikelompokkan ke dalam satu kumpulan geografis lokalitas yang bernama kampung. Di beberapa daerah, suatu dusun mencerminkan pengelompokan marga (*clan*) seperti Dusun Koto atau Dusun Caniago. Pada daerah lain, karena perkembangan demografis dari suatu suku dan kepemilikan lahan yang luas maka ditemukan juga kampung identik dengan pengelompokan marga (*clan*) seperti Kampung Kutianya atau Kampung Piliang. Sedangkan konsep jorong menunjuk pada kumpulan dari beberapa kampung. Selanjutnya konsep nagari merupakan kumpulan dari beberapa jorong. Nagari merupakan suatu komunitas yang memiliki satu kesatuan adat, yang di dalamnya terkandung tata kelakuan, kebiasaan, hukum adat, serta sebagai unit pemerintahan yang terendah. Dalam konsepsi adat, luhak merupakan satu kesatuan teritorial di mana nenek moyang mereka berasal. Daerah Minangkabau secara tradisional dibagi ke dalam tiga luhak², yaitu Luhak Tanah Datar (sekitar Batusangkar), Luhak Agam (sekeliling Bukittinggi), dan Luhak Lima Puluh Kota (selingkar Payakumbuh). Dalam perkembangannya, konsep luhak tidak lagi populer sebagai lingkungan tumbuh kembangnya suatu kepercayaan. Pada saat ini, ada kecenderungan

² Menurut mitologis, pola migrasi Minangkabau bermula dari Pariangan Padang Panjang yang terletak di Luhak Tanah Datar, dikenal juga Luhak Tua, dan menyebar di sekitar Luhak Tanah Datar. Selanjutnya menyebar ke daerah Luhak Agam. Akhirnya menyebar ke daerah Luhak Lima Puluh Kota.

konsep luhak sebagai komunitas masyarakat lokal diganti dengan konsep administrasi pemerintahan dalam bentuk kabupaten dan / atau kota. Terakhir, konsep Minangkabau bisa dipandang sebagai komunitas masyarakat lokal yang terluas dari konsep konsep komunitas lokal lainnya. Kesatuan komunitas masyarakat lokal Minangkabau dapat merajut kepercayaan di antara anggota komunitas yang terkandung di dalamnya.



Gambar 4.2. Sistem Jaringan Komunitas Lokal Pada Masyarakat Minangkabau

Catatan :

Urutan 1 sampai 6 memperlihatkan urutan yang dimulai dari sedusun, sekampung, sejeorong, senagari, seluhak dan seminangkabau.

Dalam rajutan kepercayaan pada masyarakat Minangkabau, antara lingkungan hubungan kekerabatan dan komunitas masyarakat lokal kemungkinan besar tumpang-tindih dalam penggunaannya. Penggunaan secara bersamaan tersebut dikarenakan sebagian konsep hubungan kekerabatan beririsan dengan konsep komunitas masyarakat lokal, misalnya dusun dan kampung.

Sementara kosmologi religius merupakan bentuk kepercayaan dan praktik ritual yang menyediakan interpretasi *providential* atas kehidupan dan alam. Kosmologis religius menyediakan interpretasi moral dan praktik bagi kehidupan sosial dan kehidupan pribadi, dan bagi dunia alam, yang merepresentasikan lingkungan yang aman bagi

pemeluknya (Giddens, 2005: 136). Dalam agama Islam, misalnya, menyediakan lingkungan dalam bentuk interpretasi moral dan praktik bagaimana seseorang harus menjaga kepercayaan yang diembankan kepadanya. Banyak tuntunan agama, baik dalam al Quran maupun dalam Hadits, memberikan interpretasi dan praktik moral bagi seorang muslim untuk memegang teguh kepercayaan. Dalam satu hadits Muttafaq'alah, Nabi saw bersabda: "Ada empat sifat, yang barang siapa memiliki keempat-empatnya maka merupakan seorang munafik sejati dan siapa yang memiliki salah satunya berarti dia memiliki salah satu sifat munafik hingga ia menghilangkannya: jika mendapat kepercayaan dia berkianat, jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia tidak menepati, dan jika berselisih dia berbuat jahat." Bagaimana posisi orang munafik menurut perspektif Islam sehingga hal itu harus dihindarkan? Dalam al Quran surat An-Nisa' 4: 145 ditegaskan bahwa, "sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun buat mereka." Jadi, betapa besarnya risiko yang akan diterima seseorang memiliki sifat munafik di akhirat kelak. Oleh sebab itu, perilaku munafik sangat perlu dihindarkan. Menghindari sifat atau perilaku munafik memiliki fungsi laten untuk mengintegrasikan masyarakat sehingga kedamaian dan ketentraman bisa diperoleh. Bagaimana Nabi saw menjaga umat agar tidak masuk ke dalam perilaku munafik? Dalam sebuah riwayat yang berasal dari Muslim diceritakan bahwa Nabi saw melewati gundukan makanan (di pasar), lalu memasukkan tangan beliau ke dalamnya dan merasakan basah (meskipun dibagian luarnya kering). Nabi mengatakan, "wahai pemilik makanan, apa ini?" Si pemilik makanan menjawab, "makanan itu rusak terkena hujan, wahai Rasulullah." Lalu Nabi bilang, "Dan kamu tidak meletakkan makanan yang rusak oleh hujan ini di bagian luar sehingga orang bisa melihatnya! Barang siapa menipu, dia tidak termasuk umat kami." Bagaimana masyarakat menjalankan perintah tersebut? Disebutkan sebuah kisah pada zaman khalifah Umar bin Khatab, pada suatu inspeksi dadakan malam, tanpa diikuti oleh pengawal, khalifah mendengar dialog seorang anak perempuan penjual susu dengan ibunya. Dari luar rumah sayup terdengar sang anak disuruh ibunya, "anakku, apakah sudah dicampur susu dengan air". "tidak ibu", terdengar jawaban sang anak. "kenapa tidak, nak" tanya sang ibu. "bukankah itu perbuatan dilarang khalifah, bu", sayup terdengar jawaban sang anak. "tapi khalifah kan tidak tahu" bujuk

sang ibu. “tidak bu, tapi Tuhannya khalifah kan melihat!”, sanggah sang anak. Sang khalifah terkesima dan terharu terhadap perilaku sang anak. Kisah-kisah seperti ini sering dijumpai oleh khalifah Umar bin Khatab pada masa kekhalifahannya sebagai contoh implemementasi pemahaman terhadap pentingnya menjaga kejujuran, kepercayaan, dan amanah dalam hidup.

Terakhir, tradisi juga dapat menjadi lingkungan bagi perkembangan kepercayaan masyarakat. Tradisi merupakan sarana untuk mengaitkan masa kini dengan masa depan, berorientasi kepada masa lalu dan waktu yang dapat berulang. Tradisi adalah rutinitas. Namun dia adalah rutinitas yang penuh makna secara instrinsik, ketimbang hanya sekedar perilaku kosong yang hanya berorientasi kepada kebiasaan semata. Makna aktivitas rutin berada di dalam penghormatan atau pemujaan yang melekat dalam tradisi dan dalam kaitan antara tradisi dan ritual (Giddens, 2005: 138). Dalam masyarakat Minangkabau, melanjutkan contoh sebelumnya, memiliki tradisi bagaimana kepercayaan merupakan suatu hal penting dalam kehidupan. Dalam berbagai mamangan adat, petuah adat, atau tuntunan adat menyebutkan bahwa menjaga kepercayaan, menghindari dusta/berbohong, memegang amanah dan sejenisnya merupakan suatu bentuk ketinggian budi dan akhlak mulia seperti, “sekali lancung keujian, seumur hidup orang tidak percaya”, “berbuat baik pada-pada, berbuat jahat jangan sekali”, dan banyak yang lainnya.

b. Resiprositas

Resiprositas menunjuk pada gerakan di antara kelompok-kelompok simetris yang saling berhubungan. Ini terjadi apabila hubungan timbal balik antara individu-individu atau antara kelompok-kelompok sering dilakukan. Hubungan bersifat simetris terjadi apabila hubungan antara berbagai pihak (antara individu dan individu, individu dan kelompok, serta kelompok dan kelompok) memiliki posisi dan peranan yang relatif sama dalam suatu proses pertukaran. Misalnya dalam masyarakat Minangkabau terdapat tuntutan adat tentang resiprositas yaitu *”kaba baik bahimbauan, kaba buruak bahambauan”* (kabar baik dihimbaukan, kabar jelek berhamburan) yang bermakna bahwa jika ada berita yang menggembirakan (baik) seperti memanen padi maka petani pemilik sawah harus memberitahu kepada kerabat-kerabatnya tentang waktu dan tempat memanen padi sebelumnya, jika ia ingin dibantu dalam memanen padi. Sebaliknya,

kerabat-kerabatnya juga melakukan hal yang sama kepadanya apabila mereka akan memanen padi di sawah. Sedangkan berita buruk, misalnya tentang kematian, maka para kerabat dan kenalan datang tanpa diminta.

Pada aktifitas tersebut, berbagai pihak yang terlibat resiprositas memiliki posisi sosial yang sama, meskipun di antara mereka memiliki derajat harta kekayaan dan fungsionaris adat yang berbeda-beda. Posisi dan peranan sebagai pengundang, tuan rumah, atau pemberi dan yang diundang, tamu, atau penerima dalam kegiatan resiprositas terjadi secara bergiliran silih berganti. Dengan kata lain siapa saja individu atau kelompok yang memiliki aktifitas atau hajat resiprositas bisa mengambil peranan dan posisi sebagai pengundang, tuan rumah atau pemberi pada suatu waktu, dan pada waktu lain dia atau mereka diposisikan atau diberi peran sebagai yang diundang, tamu atau penerima. Hubungan seperti ini terjadi apabila hubungan berbagai pihak (antara individu dan individu, individu dan kelompok, serta kelompok dan kelompok) bersifat intim dan akrab. Hal ini ditunjukkan oleh hubungan personal antara individu yang ada, bukan dalam hubungan yang impersonal. Dengan kata lain, mereka, yang terlibat dalam aktifitas resiprositas, saling kenal antara satu sama lain. Dalam hubungan seperti ini, resiprositas merupakan kewajiban membayar atau membalas kembali kepada orang atau kelompok lain atas apa yang mereka berikan atau lakukan untuk kita, atau dalam tindakan nyata membayar atau membalas kembali kepada orang atau kelompok lain.

Dari berbagai kepustakaan yang ada tentang resiprositas dapat disimpulkan terdapat dua jenis resiprositas, yaitu resiprositas sebanding (*balanced reciprocity*) dan resiprositas umum (*generalized reciprocity*). Resiprositas sebanding merupakan kewajiban membayar atau membalas kembali kepada orang atau kelompok lain atas apa yang mereka berikan atau lakukan untuk kita secara setara, seringkali, langsung, dan terjadwal. Resiprositas sebanding menekankan pada apa yang diterima dari seseorang atau kelompok pada masa lampau haruslah setara dengan apa yang akan diberikan kepada orang atau kelompok pemberi. Sifat langsung ditunjukkan oleh siapa memberikan apa kepada siapa dan akan menerima apa dari siapa. Sedangkan sifat terjadwal menunjuk pada kepastian seseorang kapan akan memperoleh pembayaran atau pembalasan atas pemberian atau kegiatan yang dilakukan sebelumnya. Mari kita ambil contoh, dalam masyarakat Minangkabau, terutama dari daerah Pariaman, dikenal tradisi *badoncek*.

Tradisi ini merupakan suatu bentuk resiprositas sebanding di mana orang akan menyumbangkan sejumlah uang tertentu untuk suatu acara, misalnya acara perkawinan atau acara mendirikan rumah. Setiap orang pada kegiatan *badoncek* dalam acara perkawinan, misalnya, akan diminta untuk menyebutkan sejumlah uang yang akan diberikan kepada tuan rumah. Tuan rumah akan menulis jumlah uang tersebut beserta nama dari pemberinya. Penulisan itu penting dilakukan sebab pada kesempatan lain di mana jika si pemberi mengundang pada suatu acara dan ada kegiatan *badoncek*-nya maka dia harus membayar kembali sejumlah uang yang sama dengan yang diterimanya sebelumnya. Jadi pada tradisi ini terlihat kepastian akan jumlah uang dan jadwal. Resiprositas sebanding masih banyak ditemui dalam masyarakat Indonesia. Tradisi *sambatan* dalam masyarakat Jawa, tradisi *julo-julo* dalam masyarakat Minangkabau, atau tradisi arisan dalam berbagai masyarakat di Nusantara merupakan contoh dari resiprositas berbanding. Pada masyarakat perkotaan bisa juga ditemukan resiprositas sebanding. Pemberian kado atau hadiah pada saat ulang tahun, misalnya, bisa dilihat sebagai resiprositas sebanding jika para pelakunya saling menghadihkan dan mencatatnya pada saat aktifitas itu berlangsung. Jadi resiprositas sebanding dapat diidentifikasi dengan kenyataan bahwa individu dengan sengaja dan terbuka mengkalkulasi apa yang mereka berikan kepada orang lain dan secara terbuka dinyatakan sifat pengembalian yang akan diperoleh. Setiap pihak yang berinteraksi mengharapkan keuntungan, tetapi ada harapan yang jelas akan adanya keuntungan timbal-balik, dan jarang ada “eksploitasi” (Sanderson, 2003: 117-118).

Sedangkan resiprositas umum merupakan kewajiban memberi atau membantu orang atau kelompok lain tanpa mengharapkan pengembalian, pembayaran atau balasan yang setara dan langsung. Berbeda dengan resiprositas berbanding, resiprositas umum tidak menggunakan kesepakatan terbuka atau langsung antara pihak-pihak terlibat. Ada harapan bersifat umum (*general*) bahwa pengembalian setara atau hutang ini akan tiba pada saatnya, tetapi tidak ada batas waktu tertentu pengembalian, juga tidak ada spesifikasi mengenai bagaimana pengembalian itu dilakukan. Istilah pengembalian dalam resiprositas umum sangat samar (Sanderson, 2003: 118). Dalam masyarakat etnik di Indonesia terdapat berbagai kearifan lokal yang mengandung nilai dan norma yang menyuruh orang untuk berbuat baik kepada semua orang tanpa menegaskan bentuk dan

waktu pengembaliannya, misalnya: “berbuat baik pada-padaai berbuat buruk jangan sekali”, “manusia mati meninggalkan nama, harimau mati meninggalkan belang”, “nan kurik kundi nan merah saga, nan baik budi nan indah basa”, “hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati”.

c. Rasa Tanggungjawab

Sedangkan nilai tanggungjawab merupakan salah satu nilai yang diagungkan dalam banyak masyarakat dunia. Dalam dunia Melayu dikenal pepatah, „tangan mencencang, bahu memikul“. Pepatah ini bermakna bahwa siapa yang melakukan suatu perbuatan atau aktifitas, dia yang harus mempertanggungjawabkannya. Masyarakat Minangkabau memahami nilai tanggungjawab lewat pepatah adat, “*bakato sapatah dipikiri, bajalan salangkah maliek suruit, muluit tadorong ameh timbangannyo, kaki tataruang inai padahannyo*” (berkata sepatah dipikiri, berjalan selangkah lihatlah ke belakang, mulut terdorong dibayar dengan emas, kaki terdorong diberi inai”. Dalam aktifitas bisnis, semua keputusan memiliki risiko. Ketika suatu keputusan dibuat, berarti seseorang telah siap dengan segala konsekuensi yang akan mengikutinya, baik positif maupun negatif. Nilai tanggungjawab, dalam aktifitas bisnis, berkaitan dengan nilai kepercayaan. Pertanggungjawaban seseorang terhadap segala konsekuensi dari suatu tindakan bisnis yang dilakukannya dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kepercayaan orang lain terhadap dirinya.

3. Norma

Norma, sebagai sumber daya sosial terakhir, dipahami sebagai aturan main bersama yang menuntun perilaku seseorang. Norma memberikan kita suatu cara di mana kita mengorientasikan diri kita terhadap orang lain. Norma menuntun kita dalam melakukan definisi situasi. Norma, oleh karena itu, menjadi kompas dalam menemukan jalan-jalan di belantara kehidupan sosial. Sullivan dan Thompson (1984: 39-41) membagi norma atas tiga macam: kebiasaan (*folksways*), tata kelakuan (*mores*), dan hukum (*law*). Kebiasaan adalah cara-cara yang lazim, wajar, dan berulang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap sesuatu. Dalam berjabat tangan, misalnya, kebiasaan di Jepang diiringi dengan membungkukkan badan, sedangkan di Indonesia dengan badan tegak. Horton dan

Hunt membagi kebiasaan atas dua golongan: (1) hal-hal yang seharusnya diikuti sebagai sopan santun dan perilaku sopan, (2) hal-hal yang harus diikuti karena yakin kebiasaan itu penting untuk mensejahterakan masyarakat (1984: 66).

Selanjutnya Horton dan Hunt menegaskan bahwa apabila kebiasaan tersebut dikaitkan dengan gagasan tentang salah dan benar maka ia dipandang sebagai tata kelakuan. Dengan demikian tata kelakuan merupakan gagasan yang kuat mengenai salah dan benar yang menuntut tindakan tertentu dan melarang yang lain. Ini berarti adat istiadat/tata kelakuan berkaitan erat dengan moral. Berbagai tabu dan pantangan yang terdapat dalam masyarakat adalah bentuk dari tata kelakuan. Jika merujuk pada jumlah suku bangsa Indonesia maka sebanyak itu pula jumlah adat di Indonesia. Terdapat perbedaan tentang besaran dari suku bangsa di Indonesia. Hildred Geertz misalnya menyebut lebih dari 300 suku bangsa sedangkan Skinner membilang angka lebih dari 35 suku bangsa dengan bahasa dan adat masing-masing. Realitas adat dan masyarakat adat di Indonesia terdapat di desa. Seperti didiskusikan pada bab awal bahwa sepanjang adat masih dipegang dan hukum adat masih dijunjung maka sepanjang itu pula masyarakat desa tetap dipertahankan. Persoalan muncul ketika suku bangsa Betawi misalnya komunitasnya sebagian besar telah bertransformasi menjadi kota. Meskipun demikian, masih ada kampung Betawi di tengah kota Jakarta. Bahkan meskipun secara fisik Jakarta telah menjadi kota, namun secara relasi sosial masih desa. Sehingga kota Jakarta dikenal sebagai kampung besar.

Apabila tata kelakuan diformalkan dan dikodefikasikan dengan penerapan sanksi dan hukuman oleh otoritas pemerintah maka ia dipandang sebagai hukum.

D. SISTEM SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PETANI

1. Ekologi Desa Pertanian

Sebelum mendiskusikan tentang sistem budaya masyarakat petani, perlu kiranya terlebih dahulu mendiskusikan tentang ekologi desa pertanian, khususnya Indonesia. Untuk mendiskusikan ini Clifford Geertz dalam bukunya *Involusi Pertanian* (1983) telah mendeskripsikan dengan baik tentang ekologi desa pertanian Indonesia.

a. Persawahan

Sawah, kata Geertz (1983: 30-31), merupakan suatu struktur buatan, sangat khusus, terus menerus ditanami, dan terbuka. Sawah tidak bisa dilepaskan hubungannya dengan air. Air sawah bisa berasal dari air hujan yang terkumpul, dikenal dengan sawah tadah hujan, atau air sawah bisa juga berasal dari sumber mata air yang dialirkan melalui irigasi teknis atau semi teknis. Oleh sebab itu, hubungan antara masyarakat desa Indonesia dengan lingkungan alam, dalam hal ini sawah, telah menghasilkan kearifan dan pengetahuan lokal yang terkait dengan tata kelola air seperti subak di Bali, Kincir di Minangkabau dan Jawa, teknologi panen, dan seterusnya.

b. Perladangan

Ladang, dalam pandangan Geertz dengan mengutip Kampto Utomo, merupakan suatu sistem di mana “hutan alam diubah menjadi hutan yang dapat dinikmati hasilnya” dengan cara bercocok tanam berpindah-pindah (*shifting cultivation*) atau dengan tebang bakar (*slash and burn*). Konsekuensi pola pertanian seperti ini mengakibatkan pengundulan dan erosi tanah yang serius ditandai dengan lenyapnya pohon-pohon rindang yang digantikan oleh alang-alang. Keseimbangan sistem hutan yang dinikmati ini jauh lebih ringkih dibandingkan dengan hutan alami.

2. Siapakah Petani?

Dalam literatur dalam Bahasa Inggris, petani dibedakan antara *farmer* dan *peasant*. *Farmer* dipahami sebagai petani yang menguasai faktor produksi secara memadai dengan tanah pertanian yang relatif luas, mengakumulasi surplus usaha pertaniannya sehingga mempunyai modal yang relatif kuat dan mempunyai jaringan dengan elit (politik, agama, dan ekonomi).

Sedangkan *peasant* adalah petani yang menguasai sangat sedikit faktor produksi seperti tanah, yang hasilnya untuk kebutuhan subsistensi, hanya dapat untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya, dikenal sebagai petani gurem; atau bahkan juga mereka yang tidak memiliki tanah dan menggantungkan hidupnya pada bagi hasil dan/atau pengerjaan usaha pertanian, dikenal sebagai buruh tani (Dewi, 2007; Wahyudi, 2005; dan Rahardjo, 1999).

Apa yang membedakan antara *farmer* dan *peasant* adalah jiwa entrepreneur dan jiwa subsisten. Jiwa entrepreneur dikaitkan dengan *farmer*. Jika ada petani yang memiliki tanah yang memadai namun tidak ditujukan untuk mengakumulasi surplus maka dia dikategorikan *peasant*. Sebab *peasant* dikaitkan dengan jiwa subsisten.

3. Arti Subsistensi

Subsistensi, menurut Rahardjo (1999: 68), dipahami sebagai cara hidup yang cenderung minimalis. Usaha-usaha yang dilakukan cenderung ditujukan untuk sekedar hidup. Selanjutnya, ekonomi subsisten, menurut Abercrombie dkk (2010: 562) dimaksud sebagai ekonomi untuk mencukupi diri atau ekonomi alamiah. Subsistensi ekonomi ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- (1) unit-unit produksi, seperti keluarga petani, memproduksi untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. (2) unit-unit tersebut tidak tergantung pada pasar dalam memenuhi konsumsinya; dan (3) hanya ada sedikit pembagian atau spesialisasi kerja.

Subsistensi ekonomi, lanjut Abercrombie dkk, dipandang sebagai suatu kelaziman di dalam pra-kapitalisme atau wilayah-wilayah terpencil yang belum dimasuki kapitalisme. Ekonomi subsisten karenanya dibatasi sebagai ketiadaan pertukaran ekonomi di pasar.

Sedangkan Clifton R. Wharton, seperti dikutip oleh Rahardjo (1999: 68), membuat perbedaan antara subsistensi produksi dan subsistensi hidup. Subsistensi produksi ditandai dengan derajat komersialisasi dan monetisasi yang rendah. Sementara itu, yang dimaksud dengan subsistensi hidup adalah tingkat hidup minimal sekedar untuk bertahan hidup (*survive*).

Dalam kenyataan *peasant* yang hidup secara subsisten tidak berarti hidup sekedar mengonsumsi apa yang ditanam, barter hasil apa yang diproduksi dengan barang yang dibutuhkan, tetapi juga sudah (ada) menggunakan uang untuk transaksi, namun dasar dari aktifitas tersebut bukan untuk mengakumulasi modal, tetapi untuk bertahan hidup.

4. Tanah dalam Konsepsi Masyarakat Adat

Tidak ada tanah, tidak ada masyarakat petani. Oleh sebab itu, penting untuk memahami konsepsi masyarakat adat tentang tanah. Setiap masyarakat adat memiliki

konsepsi tentang tanah, namun konsepsi yang dimiliki mempunyai derajat yang beragam: ada yang sederhana dan ada pula yang komplit.

Dalam masyarakat Amungme, suku yang mendiami kawasan pegunungan Biji di Papua, misalnya, yang sebagian besar wilayahnya termasuk konsensi PT Freeport, seperti yang dikutip oleh Erari (1999: 34-35) dari Tomas Beanal memandang bahwa tanah adalah ibu atau mama. Ibu yang melahirkan, memberi makan, memelihara, mendidik, membesarkan, hingga sekarang ini. Tanah sesungguhnya adalah rahim dan buah kandung yang membentuk dan menciptakan orang Amungme. Oleh sebab itu, tanah dipandang sebagai kehidupan manusia. Ia adalah rumah, yang memberikan perlindungan dan tempat bersemayamnya arwah nenek moyang, sebagai sumber kekuatan hidup manusia. Konsepsi tanah seperti ini menyebabkan orang Amungme merasa bahagian tidak terpisah dari alam dan tidak akan pernah merusaknya.

Sedangkan dalam masyarakat Mandailing melihat tanah sebagai status sosial. Penghargaan terhadap seorang Mandailing, menurut Pelly (1994: 45-48) dikaitkan dengan kemampuan dia mengembangkan kerajaan pribadi (*sahala harajoan*). Tanah dan anak merupakan indikator dari kerajaan pribadi (*sahala harajoan*) seseorang: semakin banyak anak dan luas tanah yang dimiliki maka semakin besar kerajaan pribadi (*sahala harajoan*) seseorang. Selanjutnya semakin besar kerajaan pribadi (*sahala harajoan*) seseorang maka semakin tinggi pula status sosial seseorang (*sahala hasangopan*).

Masyarakat Minangkabau mengembangkan persepsi tentang tanah yang relatif komplit. Bagi masyarakat Minangkabau, menurut Damsar (2005: 43-46), memandang tanah bukan sekedar obyek fisik material tetapi juga telah dikonstruksi secara sosial, budaya, politik, dan ekonomi sehingga tanah bermakna sebagai identitas kultural, status sosial, perekat sosial dan sumber ekonomi.

Bagi orang Minangkabau, menurut Damsar (2005: 43), tanah dilihat sebagai identitas kultural (*cultural identity*). Identitas diri (*self identity*) orang Minangkabau selain dikaitkan dengan suku dan nagarnya juga dihubungkan dengan tanah: “*batapian tampek mandi, basasok bajarami, bapandam bakuburan*” (memiliki sumber air, memiliki tanah pertanian, memiliki tanah pemakaman). Oleh karena itu, seseorang yang mengaku sebagai orang Minangkabau selain harus bisa menjelaskan suku dan nagari asalnya juga dituntut untuk mampu menunjukkan di mana lokasi “*tapian, sasok jarami, dan pandam*

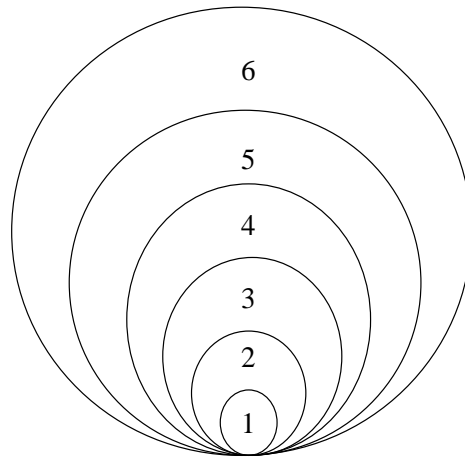
pakuburan” (sumber air, tanah pertanian, dan pemakaman) kaum atau suku mereka. Identitas suku dan nagari asal merupakan identitas kultural yang dikonstruksi secara sosial mitologis. Identitas suku mengandung makna bahwa seseorang memiliki hubungan atau kaitan geneologis mitologis dengan dua nenek moyang orang Minangkabau, yaitu Datuk Katamanggungan dengan Koto Piliangnya dan Datuk Perpatih nan Sabatang dengan Bodi Caniagonya. Identitas nagari memiliki arti bahwa seseorang mempunyai hubungan geneologis dalam pembentukan ruang untuk hidup bersama dari sejarah migrasi awal orang Minangkabau.

“*Tapian, sasok jarami, dan pandam pakuburan*” memiliki makna penting bagi masyarakat Minangkabau, karena, menurut Damsar (2005), berkait dengan prasyarat kehidupan dan simbol keberadaan mereka. Sumber air dan tanah merupakan syarat utama bagi kelangsungan hidup; sedangkan pemakaman menunjuk pada suatu identitas diri sesudah meninggal dari suatu kaum atau suku, atau identitas pemukiman nenek moyang mereka. Ketidakmampuan untuk menunjukkan ketiga prasyarat kehidupan dan simbol tersebut akan diragukan keabsahan dirinya sebagai orang Minangkabau.

Masyarakat Minangkabau memandang tanah sebagai status sosial. Orang Minang melihat bahwa tanah telah terbagi habis dan ada yang memilikinya: “*kok tanah nan sabingkah alah bamiliak, kok rumpuik nan saalai alah bapunyo, malu nan alun babagi*” (jika tanah sekeping telah dimiliki, jika rumput yang sehelai telah ada yang punya, tinggal malu yang belum berbagi). Menurut adat Minangkabau, kata Damsar (2005), tanah hutanpun telah ada kepemilikannya yaitu hak ulayat nagari di mana semua anak nagari dapat memanfaatkannya: “*jiko tanah alah bakabuang, jiko rimbo baanjiulang*” (tanah sudah berbagi, hutan bertanda anjilung). Oleh karena itu, dalam masyarakat Minangkabau, tanah dapat dijadikan indikator status sosial seseorang: makin banyak tanah pusaka dimiliki, makin tinggi status sosial seseorang atau kaum. Banyaknya tanah pusaka yang dimiliki berhubungan erat dengan “keaslian” seseorang atau kaum sebagai penduduk asal. Sebaliknya orang atau kaum yang *malakok* (pendatang yang diterima secara adat sebagai anggota kaum atau suku oleh penduduk asal). Penduduk asal merupakan keturunan matrilineal langsung dari peneroka suatu nagari.

Tanah pusaka dalam masyarakat Minangkabau merupakan perekat hubungan sosial (Damsar: 2005). Makin dekat seseorang ke pusat lingkaran pewarisan tanah

pusaka, makin dekat hubungan kekerabatan matrilineal dan makin kental pula rekatan hubungan sosial. Pusat lingkaran pewarisan tanah pusaka bermula dari inti kemudian melebar ke pinggiran, yaitu *semande* (seketurunan), kemudian *saparuik* (seibu), *sanenek*, *saniniek*, *sakaum*, dan *sasuku*. Lihat gambar berikut sebagai ilustrasi menajamkan pemahaman.



Gambar 4.3. Lingkaran Pewarisan Tanah Pusaka dan Jarak Hubungan Sosial Masyarakat Minangkabau

Catatan (1) *semande* (2) *seperut* (3) *senenek* (4) *seniniek* (5) *sekaum* (6) *sesuku*

Dalam konsepsi masyarakat Minangkabau semua tanah memiliki manfaat ekonomi: “*nan lereang tanami padi, nan tunggang tanami bambu, nan gurun jadikan parak, nan padek ka parumahan, nan munggu jadikan pandam, nan gauang ka tabek ikan, nan padang tampek gubalo, nan lacah kubangan kabau, nan rawang ganangan itiak* ” (yang lereng tanami padi, yang curam tanami bambu, yang gurun jadikan kebun, yang padat untuk perumahan, yang ketinggian jadikan kuburan, yang berlubuk jadikan tambak ikan, yang padang tempat gembala, yang berlumpur kubangan kerbau, yang berawa renangan itik).

Konsepsi manfaat ekonomi tanah merupakan refleksi dari kesadaran etnoekologis masyarakat tentang lingkungan, khususnya tanah. Dari konsepsi tersebut terlihat bahwa

jenis, bentuk, dan posisi tanah memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat. Konsepsi adat dalam masyarakat Minangkabau semua jenis, bentuk dan posisi tanah dalam arti fungsional secara ekonomi.

5. Solidaritas Sosial Masyarakat Petani

Salah satu kualitas relasi sosial masyarakat perdesaan yang banyak diperbincangkan ketika membahas desa adalah solidaritas sosial, dalam hal ini solidaritas mekanik. Konsepsi solidaritas mekanik, seperti telah kita bahas pada bab sebelumnya, merupakan kesadaran kolektif yang didasarkan atas keyakinan dan konsensus bersama. Dalam masyarakat petani, salah satu bentuk solidaritas sosial mekanik yang menarik untuk didiskusikan adalah kemiskinan berbagi (*shared poverty*), oleh Sajogyo disebut kemiskinan bersama.

Kemiskinan berbagi, menurut Geertz (1983: 102), merupakan konsekuensi dari involusi usaha pertanian, di mana tingkat produktifitas yang tidak menaik (atau bahkan turun) mendorong pembagian rezeki kepada pembagian tingkat nafkah yang rendah bagi semua. Tekanan demografis yang meningkat dengan sumber daya yang terbatas, masyarakat desa Jawa tidak terbelah menjadi dua, yaitu antara golongan tuan tanah besar dan golongan setengah budak yang diperas, melainkan tetap mempertahankan homogenitas sosial dan ekonomis yang cukup tinggi melalui membagi-bagi rezeki yang ada, hingga makin lama makin sedikit yang diterima masing-masing anggota masyarakat. Inilah disebut Geertz sebagai kemiskinan berbagi.

Kemiskinan berbagi bisa dipahami melalui dua etika, yaitu etika “*mangan ora mangan waton kumpul*” (makan atau tidak, asal berkumpul) dan etika subsistensi. “*Mangan ora mangan waton kumpul*” menunjukkan suatu masyarakat yang relasi sosialnya diikat erat oleh kehendak alamiah (*wessenwille*). Hubungan sosial yang intim, pribadi, dan afeksi dalam suatu lokalitas (tempatan) lebih dipenting ketimbang migrasi ke daerah lain untuk mempernaiki kehidupan. Etika “*mangan ora mangan asal ngumpul*” diperkuat keberadaannya dengan etika subsistensi, yaitu apapun aktifitas kehidupan perdesaan yang dilakukan oleh siapaun tidak akan dipersoalkan sepanjang kebutuhan subsisten setiap orang dijaga agar jangan sampai tenggelam mati kelaparan. Hal ini akan didiskusikan lebih dalam pada bab 5.

6. Jaminan Sosial Masyarakat Petani

Dengan sudut pandang yang berbeda, apakah kemiskinan berbagi (*shared poverty*) bisa dilihat sebagai suatu bentuk jaminan sosial masyarakat petani Jawa? Jawabannya, bisa. Kemiskinan berbagi bisa dilihat sebagai suatu mekanisme sosial terhadap kepastian penerimaan pendapatan meskipun kecil, agar para petani bisa bertahan untuk tidak tenggelam dalam kelaparan dan bisa bertahan hidup (*survival*) dengan subsisten minimalnya.

Jaminan sosial bisa juga diperoleh melalui relasi patron – klien. Relasi patron-klien dalam masyarakat petani bisa terbentuk antara buruh tani dan petani pemilik tanah, petani penggarap dan petani pemilik tanah, petani gurem dan pedagang (pengumpul) hasil pertanian, pedagang (pengumpul) hasil pertanian dan pedagang besar (distributor) hasil pertanian, dan seterusnya. Relasi patron – klien terbentuk karena hubungan yang terjalin yang sudah relatif lama sehingga terbentuk *trust* (kepercayaan) di antara mereka. Relasi ini tidak hanya meliputi aspek bisnis semata tetapi telah merambah ke aspek sosio-budaya dan psikologis. Ketika klien mengalami kesulitan ekonomi atau ada acara seremonial yang dilakukan oleh klien maka patron akan “membantunya” dalam bentuk uang atau material.

Dalam masyarakat petani di mana koperasi berkembang juga bisa sebagai lembaga yang memiliki fungsi jaminan sosial. Ketika masyarakat memerlukan suatu pembiayaan yang terkait dengan siklus kehidupan mereka maka salah satu andalannya adalah koperasi. Di samping itu, rentenir, meskipun dipandang lembaga yang mencekik petani, karena memberikan pinjaman dengan bunga sangat tinggi, namun keberadaannya telah memberikan “jalan keluar” sesaat ketika petani terdesak oleh suatu kebutuhan yang penting, misalnya biaya sekolah anak. Antara koperasi dan rentenir, dalam beberapa kasus masyarakat petani, sangat tipis perbedaan. Malahan untuk sebagian petani menyebut rentenir lebih mudah sebagai pelepas uang dibandingkan koperasi.

Apakah ada jaminan sosial lainnya dalam masyarakat petani? Pemerintah diberi kewajiban oleh konstitusi untuk melaksanakan suatu sistem jaminan sosial formal berskala nasional melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Untuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial berskala

nasional tersebut diterbitkanlah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Melalui UU BPJS ini maka setiap warga negara Indonesia, termasuk petani, dan warga asing yang sudah berdiam di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS. Setiap warga negara Indonesia, termasuk warga miskin, wajib membayar iuran yang besarnya ditentukan sesuai dengan jenis pelayanan yang diharapkan. Bagi warga miskin, termasuk petani, pemerintah memberikan subsidi melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Sistem jaminan sosial nasional seperti ini memberikan ketenangan hidup bagi kelompok masyarakat miskin, termasuk petani, karena, jika sakit, mereka tidak tenggelam lebih dalam lagi masuk ke jurang kemiskinan, yang kita ketahui akan berujung pada kematian.

Selain itu, penetrasi pasar dalam masyarakat petani telah memberikan ruang bagi perusahaan asuransi untuk memasarkan berbagai jenis bentuk jaminan sosial formal seperti asuransi jiwa, asuransi haji, asuransi pendidikan, dan lain sebagainya. Asuransi tersebut dinikmati oleh kelompok petani farmer.

E. SISTEM SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PESISIR

1. Ekologi Desa Pesisir

Desa pesisir merupakan desa yang terletak pada wilayah tepi pantai atau pulau-pulau kecil. Berdasarkan letak geografis desa pesisir sedemikian, maka memiliki ekologi:

a. Pertambakan

Tepian pantai, yaitu wilayah menghubungkan antara daratan dan laut(an), merupakan daerah yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan budidaya ikan, udang, dan jenis binatang laut lainnya. Untuk melakukan pembudidayaan tersebut diperlukan pembuatan tambak atau kolam sesuai dengan jenis budidaya yang akan dilakukan.

b. Laut (lepas)

Laut merupakan tempat mencari ikan dan binatang laut lainnya. Jarak penangkapan ikan yang bisa dilakukan tergantung dengan jenis teknologi mobilitas dan

penangkapan apa yang dimiliki. Semakin modern teknologi mobilitas dan penangkapannya, maka semakin jauh laut yang bisa diharungi. Selain itu, laut juga bisa menjadi lahan bagi pembudidayaan rumput laut dan tiram mutiara.

2. Siapa itu Nelayan?

Berdasarkan ekologi desa pesisir, nelayan bisa dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu nelayan penangkap dan nelayan pembudidaya. Nelayan penangkap dicirikan dengan: satu, *open access*, di mana laut terbuka untuk dimanfaatkan oleh semua orang. Hal itu dikarenakan. Dua, *common property*, yaitu sumberdaya laut merupakan kekayaan milik bersama. Memang untuk beberapa masyarakat hukum adat mengembangkan suatu lembaga perairan/pesisir/laut ulayat, yang mana ada pengaturan dalam tata kelola laut misalnya lembaga panglima laut di Aceh dan kepulauan Riau, *sasi kewang* di Maluku, dan lain sebagainya. Tiga, mobilitas sumberdaya tinggi. Ikan tidak memiliki tempat tinggal tetap, seperti ternak peliharaan (sapi, kerbau, kuda, dll). Empat, ada risiko. Karena mobilitas ikan tinggi, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, maka ada elemen risiko yang dihadapi oleh nelayan. Nelayan harus berpindah pula. Lima, tidak ada rekayasa. Nelayan penangkap tidak bisa melakukan rekayasa, misalnya dalam hal merawat dan menggemukan supaya beratnya lebih banyak (Pollnac, 1988: 240; Semedi, 1998).

Berbeda dengan nelayan penangkap, nelayan pembudidaya dicirikan dengan: satu, terikat dengan tanah. Pembudidaya ikan, pada umumnya terikat dengan tanah, paling tidak pada satu lokasi tetap. Pembudidaya ikan memerlukan kolam ikan atau paling tidak lokasi tetap yang diperlukan bagi peralatan pembudidayaan ikan. Dua, *close access*, yaitu hanya pemilik provertilah yang bisa memanfaatkannya, selain itu terlarang. Tiga, *private proverty*, yaitu semua proverti dimiliki secara pribadi, atau paling tidak disewa, misalnya tanah untuk pertambakan. Empat, dapat diprediksi. Berbeda dengan nelayan penangkap yang tidak bisa meramalkan di mana ikan berada dan dalam jumlah berapa ikannya bisa ditangkap, nelayan pembudidaya bisa memprediksi dan mengontrol ikan dan panenannya. Lima, ada rekayasa, di mana terdapat rekayasa manusia dalam membibit, membesarkan dan memperbanyak.

Perbedaan yang begitu banyak antara nelayan penangkap dengan nelayan pembudidaya, maka oleh beberapa ahli tidak memasukkan nelayan pembudidaya sebagai

nelayan (Pollnac, 1988: 240; Semedi, 1998). Jadi, kemana nelayan pembudidaya dikelompokkan? Mereka mengelompokkan nelayan pembudidaya sebagai petani, karena karakteristiknya lebih sesuai dengan karakteristik petani. Buku ini juga mengikuti alur pemikiran sama, memasukkan nelayan pembudidaya sebagai petani.

3. Laut dalam Konsepsi Nelayan

a. Laut sebagai Karunia Ilahi

Laut dilihat sebagai karunia Ilahi bagi makhluknya. Tuhan telah memberikan laut bagi manusia untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan umat manusia. Oleh sebab itu, apa yang telah diagugerahkan oleh Tuhan kepada manusia harus disyukuri dan dijaga. Konsepsi menjaga dan mensyukuri atas segala karunia Ilahi kepada manusia, masyarakat nelayan memiliki tradisi tentang menjaga dan mensyukuri melalui upacara seremonial tahunan seperti sedekah laut, ruwat laut atau bersih laut.

Bila Tuhan murka atas makhluknya karena tidak mensyukuri nikmat, karunia dan berkah yang diberikanNya melalui laut, maka Tuhan tidak memberikan hasil laut atau menurunkan bala, tragedi atau bencana kepada manusia. Atas kekeliruan langkah dan perbuatan manusia sehingga Tuhan murka, maka masyarakat menciptakan upacara sedekah laut, tolak bala atau tolak bencana.

b. Laut sebagai Sumberdaya yang tidak pernah kering

Laut dipandang sebagai sumber yang tidak pernah kering akan ikan dan binatang laut lainnya. Sepanjang laut berkembang, sepanjang itu pula ikan datang. Ikan akan silih berganti datang untuk ditangkap dan pergi menelusuri arus, musim, dan bulan bila lepas dari tangkapan nelayan, dan akan datang lagi untuk ditangkap nelayan. Pemikiran ini menciptakan pola hidup yang tidak memiliki perencanaan (*planning*). Untuk apa membuat perencanaan hidup (merencanakan, menyimpan dan membelanjakan pendapatan pada saat yang tepat secara efektif dan efisien bagi seluruh aktifitas kehidupan: menikah, menyambut kedatangan bayi, menyekolahkan anak, menikahkan anak, dan sebagainya), karena sumberdaya ikan melimpah sepanjang masa. Pola pikir seperti ini telah mengkristal dalam kehidupan sehari-hari dalam waktu yang panjang

sehingga ketika alam tidak lagi seperti apa yang dialami sebelumnya, maka untuk merubah sikap dan perilaku sebagai orang atau masyarakat yang memiliki perencanaan mengalami kesulitan. Masyarakat nelayan tetap hidup tanpa perencanaan.

Situasi alam yang *gemah ripah loh jinawi* tersebut berakhir ketika keseimbangan demografis dan ekologis terjadi. Pertambahan penduduk menyebabkan peningkatan persaingan dalam menangkap ikan. Ketika persaingan begitu ketat, maka untuk memenangi persaingan digunakan teknologi modern seperti motor mesin dan pukat/jala yang canggih. Banyaknya pemakaian teknologi canggih ini menyebabkan laut menjadi kering ikan (*overfishing*). Semula melaut hanya beberapa mil dari pantai, karena ketatnya persaingan untuk menangkap ikan, laut dekat sudah tidak ada lagi ikan maka para nelayan bersaing menangkan ikan ke laut yang lebih jauh. Pertambahan jarak melaut berarti pertambahan risiko dalam melaut: pertambahan biaya dan waktu melaut serta ganasnya laut jauh. Semakin bertambah jarak melaut, semakin bertambah biaya untuk melaut, semakin bertambah waktu untuk melaut, dan semakin ganas laut yang dihadapi.

c. Laut sebagai sumber “rezeki harimau”

Laut adalah sumber rezeki bagi nelayan. Tidak seperti petani, rezeki yang diperoleh nelayan dipenuhi oleh ketidakpastian. Pendapatan nelayan tergantung pada musim. Pada musim badai dan terang bulan nelayan memperoleh sedikit ikan. Ketika musim baik, laut memberikan kelimpahan ikan. Dalam kondisi kelimpahan ikan yang tidak terduga inilah dipandang sebagai “rezeki harimau”. Pendapatan yang melimpah, sehingga bisa membeli barang-barang yang sebelumnya diimpikan untuk dimiliki adalah fenomena “rezeki harimau”.

Persepsi laut sebagai sumber “rezeki harimau” seyogyanya melahirkan kebiasaan membuat perencanaan bagi masyarakat nelayan. Namun hal itu tidak terjadi. Tampaknya pandangan laut sebagai sumber yang tidak pernah kering berseberangan dengan persepsi laut sebagai sumber “rezeki harimau”. Kontestansi antara dua esensi persepsi yang berbeda tersebut kelihatannya dimenangkan oleh pandangan laut sebagai sumber yang tidak pernah kering.

4. Gejala Garret Hardin Pada Nelayan

Gejala Garret Hardin dicirikan dengan barang milik umum, udara, air sungai, hutan dan ikan-ikan di laut selalu berada dalam kondisi buruk, karena orang berbondong-bondong memetik manfaatnya tetapi tidak seorangpun mau mengeluarkan pengorbanan untuk menjaganya. Gejala Garret Hardin tampaknya menggejala pada banyak komunitas nelayan yang mana tidak memiliki hukum adat laut. Pada umumnya Masyarakat pesisir di Indonesia memiliki hukum adat yang terkait dengan ulayat laut, misalnya adat *pelekarang* pada masyarakat Enggros dan Tobati di Papua, hukum adat ulayat laut Minangkabau di komunitas nelayan di Nagari Punggasan Sumatera Barat, hukum adat *Sasi Kewang* di Maluku, dan lain sebagainya. Hukum adat yang terkait hak ulayat laut tersebut mencakup aturan adat tentang aturan penangkapan ikan atau eksploitasi hasil laut (peralatan, waktu dan pembagian hasil serta hak dan kewajibannya).

Pada saat hukum adat ulayat laut diabaikan oleh kepentingan pebisnis yang berkolusi bersama aparat pemerintah, komunitas nelayan tidak berdaya menyainginya maka tumbuhlah pemikiran dalam kepentingan individual nelayan, “bila ikan kecil tidak saya tangkap, ikan tersebut akan ditangkap oleh nelayan lain”. Eksploitasi masif sumberdaya laut, ikan khususnya, yang berhulu pada pengabaian hukum adat ulayat laut dan hukum formal pemerintah telah menyebabkan *overfishing* yang bermuara kepada degradasi terhadap sumberdaya (Semedi, 1998).

Hukum adat ulayat laut mengkristal kembali pada saat otonomi daerah bersemi dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Ini adalah momen kebangkitan lagi kejayaan Indonesia sebagai penghasil hewan laut terbesar dunia. Merajut otonomi daerah berharap merajut kembali tegaknya hukum adat ulayat laut dan penegakan supremasi hukum formal dalam tata kelola yang baik kelautan dan masyarakat pesisir di Indonesia.

5. Solidaritas Sosial

Dalam masyarakat perdesaan, termasuk juga masyarakat nelayan, terjalin solidaritas sosial di antara sesama anggotanya. Kelembagaan kemiskinan berbagi (*shared poverty*), dalam bentuk lain, juga terjadi pada masyarakat nelayan. Pada masyarakat pesisir Barat Sumatera Barat, komunitas nelayan, misalnya, memiliki lembaga *lauk gulai*, di mana sebagian kecil hasil tangkapan “diberi” kepada kerabat atau orang yang

menolong. Pertolongan yang diberikan dalam bentuk “remeh temeh dan sederhana”, misalnya menyisihkan ikan dari jaring atau pukot ke dalam keranjang ikan atau mengangkat keranjang ke dermaga pelelangan ikan.

Selain itu ada juga lembaga *lauk sabalah*, yaitu adanya kewajiban juragan atau tauke jika harga tangkapan jatuh di bawah harga normal untuk mencari jalan keluarnya seperti mengolah ikan tangkapan (diasinkan atau dikeringkan).

6. Jaminan Sosial Masyarakat Pesisir

Jaminan sosial pada masyarakat pesisir tidak berbeda dengan masyarakat perdesaan lainnya, masyarakat petani misalnya. Lembaga jaminan sosial apa yang ada di masyarakat petani juga ada dalam masyarakat pesisir. Lembaga kemiskinan berbagi (*shared poverty*), patron-klien, koperasi, dan rentenir yang ada dalam masyarakat petani juga ada dalam masyarakat pesisir.

Relasi patron-klien pada masyarakat pesisir ditunjukkan oleh hubungan antara juragan/pemilik alat produksi (induk semang) adalah patron bagi kliennya yang berposisi sebagai pekerja / nelayan (anak semang). Hubungan patron-klien pada masyarakat pesisir, sebagaimana juga pada masyarakat nelayan, dikonstruksi secara paternalistik (kebakakan). Relasi ini memiliki fungsi positif sebagai sumber dana dan jaminan sosial (*social security*). Namun relasi ini juga memiliki sisi negatipnya, yaitu ketergantungan dan eksploitasi. Ketergantungan kepada patron, disadari maupun tidak, sukar diputuskan mata rantainya oleh klien, karena cengkaman hubungan tersebut telah mengikat erat seluruh aspek kehidupan. Ketika hutang uang telah berbalas, bisa terbayar lunas, namun hutang budi tetap melekat dalam ruang kehidupan : “karena hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati.” Relasi patron-klien, oleh sebab itu, bersifat eksploitatif, meski dirasakan atau tidak oleh klien. Produk klien berupa hasil pertanian atau tangkapan ikan, udang atau hewan laut lainnya diwajibkan dijual kepada patron dengan harga yang ditentukan sepihak. Kewajiban menjual dan penentuan harga sepihak merupakan indikator eksploitasi. Semakin besar ketergantungan kepada patron, semakin besar pula kemungkinan eksploitasi yang mungkin terjadi.

Sistem jaminan sosial nasional yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan tumpuan masyarakat miskin, termasuk nelayan, bagi jaminan

sosial, khususnya kesehatan. Persoalan kesehatan yang mendera keluarga miskin, di dalamnya ada nelayan, bisa berkurang, sehingga mereka bisa fokus untuk menyediakan kebutuhan hidup lainnya seperti sandang, pangan dan pendidikan.

F. STRATIFIKASI SOSIAL MASYARAKAT PERDESAAN

Sanderson, seperti telah didiskusikan bab sebelumnya, membedakan masyarakat perdesaan atas : masyarakat pemburu dan peramu, masyarakat hortikultura sederhana, hortikultura intensif, masyarakat agraris, dan ditambah dengan masyarakat pastoralis. Tipologi yang dibuat Sanderson tersebut berdasarkan atas sistem stratifikasi sosial, cara pemenuhan subsistensinya, dan sistem ekonominya (2003: 85-147). Pada diskusi ini, kita hanya membahas satu basis tipologi yaitu strategi pemenuhan subsistensi. Sedangkan dua yang lainnya akan dibahas pada bab-bab berikutnya.

Masyarakat pemburu dan peramu dicirikan sebagai masyarakat yang tidak memiliki stratifikasi sosial. Dalam masyarakat ini tidak muncul ketidaksamaan prestisenya. Memang terdapat ketidaksamaan kecil terjadi dalam masyarakat, tetapi dipandang tidak signifikan seperti ketidaksamaan berbasis usia, jenis kelamin, dan karakteristik pribadi seperti keberanian dan keterampilan dalam berburu.

Masyarakat hortikultura sederhana, lanjut Sanderson, memiliki karakteristik sebagai masyarakat yang telah menampakkan ketidaksamaan yang lebih mengkristal terutama bagi penguasa redistributor mereka, namun belum sampai tahap terjadinya stratifikasi sosial. Kristalisasi ketidaksamaan terjadi pada ketidaksamaan prestise personal dan kemasyhuran yang ditujukan bagi pengusaha distributor mereka. Selain itu, ketidaksamaan usia dan jenis kelamin masih tetap ada, seperti masyarakat pemburu dan peramu.

Masyarakat hortikultura intensif merupakan tipe masyarakat yang pertama mengalami stratifikasi sosial. Masyarakat dibagi atas tiga strata yaitu penguasa, sub-penguasa, dan massa. Meski penguasa memiliki kekuasaan dan hak istimewa, namun kesemua itu dibatasi oleh tuntutan massa. Agar stratifikasi tidak terjadi secara ekstrim maka strata bukan penguasa menuntut diperlakukannya etika redistribusi.

Masyarakat agraris telah mengalami stratifikasi yang lebih mengkristal, yang ditandai dengan adanya proses eksploitasi dalam masyarakat. Kaum tani adalah budak sebagai pengolah lahan dan pelayan bagi tuannya yang menguasai lahan pertanian dan pemerintah. Kedudukan seseorang dalam suatu strata ditentukan oleh kelahirannya, di samping juga dimungkinkan terjadinya melalui mobilitas.